

LAPORAN TAHUNAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 2023



MENDUNIA 2 DEKADE MENJAGA INDONESIA



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



FATF **INDONESIA**
MEMBER OF FATF since OCT 2003
GLOBAL STANDARD-SETTER
FOR AML - CTF - CPF

MENDUNIA, 2 DEKADE MENJAGA INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN PPAK TAHUN 2023

Diterbitkan oleh:

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Penanggung Jawab: Supriadi (Kepala Pusat Pemberdayaan Kemitraan APU-PPT)

Koordinator Tim : Andi Emil Hidayat

Tim Penyusun & Kontributor: Adeck Herwin Indriani, Rieke Widyasari, Tri Andriyanto, Dyah Ferawati, Dinda Ulfa Sri Rejeki, Wendhiarto Arief Digdoyo, Kristina Widhi Prasetyanti, Tri Indah Purwanti, Otniel Yustitia Kristian, Arya Hendro Yudo, Retno Dwi Larasati, Muhammad Miftah Farid, Dwiki Krisna Saputra, Ratih Putri Pertiwi, Shanti Dewi Siawanta, Putri Artika R, Bachtiar Amri, Sani Nuraida, Aqsal Rizky Ramadhani

Editor & Penjamin Mutu : Ellya Sulistiyani, Agung Andiojaya

Desain, Layout dan Perwajahan: Mulyana, Imam Apriyogo, Irwansyah

21x21 cm - xiv,267 halaman

ISSN : 2623-2766

SK Nomor 0005.26232766/Jl.3.1/SK.ISSN/2018.09

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat

www.ppatk.go.id

VISI

Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui **pengecahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju** yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong

MISI

- 01.** Meningkatkan **kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan** dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- 02.** Meningkatkan **peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal** di lingkup nasional maupun internasional
- 03.** Meningkatkan **keandalan sistem informasi**
- 04.** Meningkatkan **kapabilitas sumber daya anti pencucian uang** serta tata kelola kelembagaan PPATK

TUGAS

01. Mencegah dan Memberantas **Tindak Pidana Pencucian Uang**

02. Mencegah dan Memberantas **Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**

FUNGSI

01. Pencegahan dan Pemberantasan **Tindak Pidana Pencucian Uang**

02. **Pengelolaan Data dan Informasi** yang diperoleh PPATK

03. Pengawasan terhadap **Kepatuhan Pihak Pelapor**

04. **Analisis atau Pemeriksaan** laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lainnya

05. Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan **tindak pidana pendanaan terorisme.**



Core Values "BerAKHLAK" dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) "Bangga Melayani Bangsa" yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021, bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar (core values) bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo

menegaskan bahwa setiap ASN harus memegang teguh nilai-nilai dasar serta semboyan yang sama. PPATK sebagai Lembaga Negara turut serta mengadopsi Core Values "BerAKHLAK" dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Core values BerAKHLAK yang dimaksud sendiri merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
- Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Core Value ASN PPATK BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
- Menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- Bertindak proaktif.

Kolaboratif

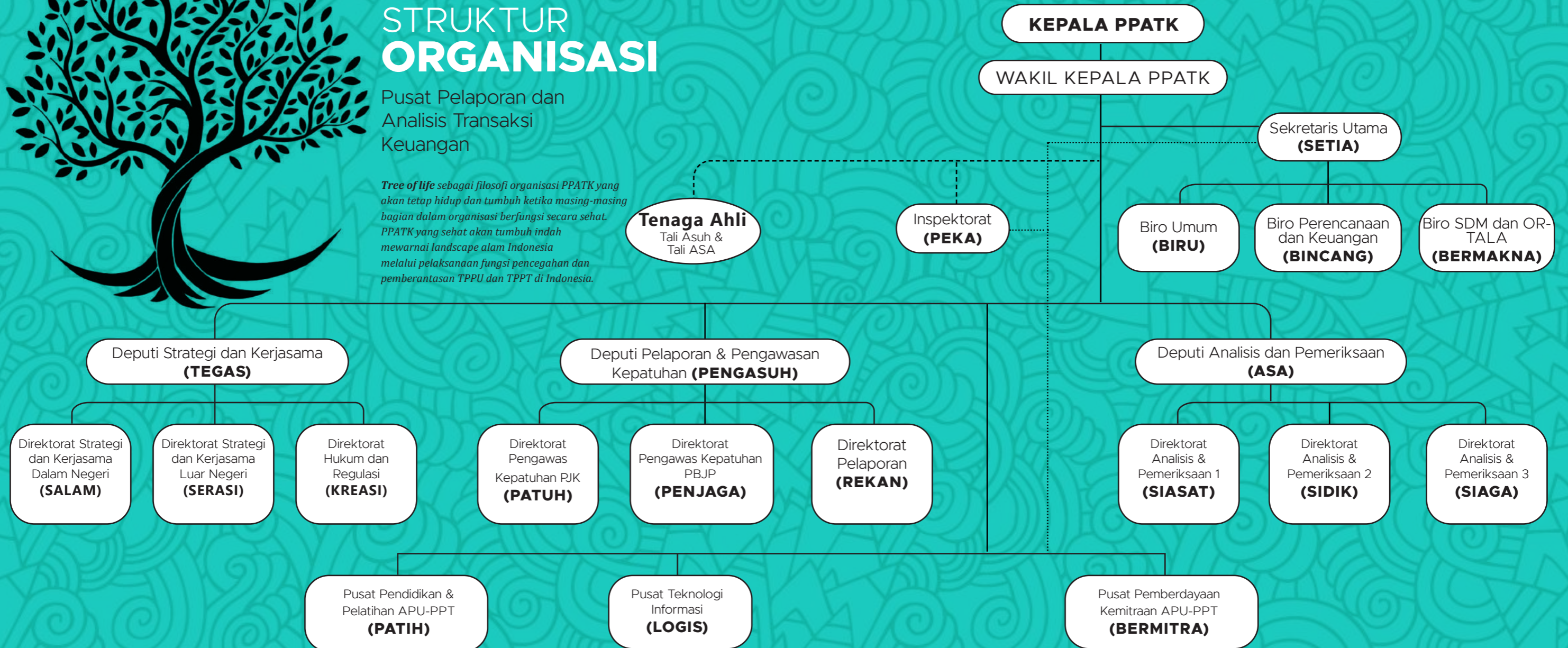
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.



STRUKTUR ORGANISASI

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Tree of life sebagai filosofi organisasi PPATK yang akan tetap hidup dan tumbuh ketika masing-masing bagian dalam organisasi berfungsi secara sehat. PPATK yang sehat akan tumbuh indah mewarnai landscape alam Indonesia melalui pelaksanaan fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia.



KATA PIMPINAN

Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

"Jalan yang sulit sering kali mengarah ke tujuan yang indah."

Ungkapan tersebut rasanya pas dengan kondisi PPATK di Tahun 2023 ini. Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM) bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Namun, bukan berarti tidak bisa. Upaya menjalankan tugas, fungsi dan wewenang PPATK terus dilakukan meski dibutuhkan usaha ekstra ditengah keterbatasan.

Perjuangan itu pun nyata hasilnya, setelah melalui proses yang panjang, Indonesia secara resmi diumumkan telah menjadi anggota penuh (*full membership*) *Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing* (FATF) ke-40. Ini merupakan capaian bersejarah yang diperoleh dengan susah payah oleh PPATK sebagai *focal point* pemberantasan dan pencegahan TPPU dan TPPT.

Upaya PPATK untuk mencapai hal tersebut dilakukan sejak tahun 2018 saat Indonesia ditetapkan sebagai negara *observer* FATF. Selanjutnya, dilakukan rangkaian tahapan penilaian teknis kepatuhan 40 rekomendasi dan 11 *Immediate Outcome* FATF dalam *Mutual Evaluation Review* (MER). PPATK berupaya untuk memenuhi seluruh rekomendasi dan penilaian MER tersebut hingga di tahun 2022. Tentunya dengan bekerja sama dengan semua pihak, baik kementerian/lembaga, *stakeholder*, pihak pelapor, lembaga pengawas serta pengatur, media dan masyarakat umum.

PPATK kemudian mendapat perolehan *fast-track* dalam proses keanggotaan Indonesia di FATF. Proses tersebut diwujudkan dalam bentuk *Action Plan* yang berfokus pada peningkatan aspek pengawasan kepatuhan pihak pelapor, aspek perampasan aset, dan aspek pencegahan PPSPM.

Dalam hal kontribusi realisasi penerimaan negara, di tahun 2023 PPATK telah menyumbangkan penerimaan negara dari produk intelijen keuangan PPATK yang di sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebesar **Rp2.959.480.532.021,00** yang salah satunya melalui tiga hasil pemeriksaan atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan atas tiga Hasil Pemeriksaan tersebut telah berkontribusi pada penerimaan negara melalui denda sebesar Rp16,25 miliar, serta uang pengganti sebesar Rp2,5 miliar dan USD 54 juta.

Kemudian, upaya PPATK dalam pengawalan pemilu tahun 2024, PPATK menyampaikan Hasil Analisis/Informasi dan Hasil Pemeriksaan terkait Pemilu diantaranya: 35 Hasil Analisis disampaikan kepada Kejaksaan, 21 Hasil Analisis dan 5 Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada KPK, 1 Hasil Analisis dan 1 Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Kepolisian RI, 1 Informasi disampaikan kepada OJK, 3 Informasi disampaikan kepada BIN, 3 Informasi disampaikan ke Bawaslu.

PPATK juga melakukan riset/penelitian terkait pemilu yang telah menghasilkan 2 hasil analisis strategis (eksekutif dan legislatif) dan 1 hasil analisis tipologi yang ditujukan untuk memetakan kerentanan dan risiko TPPU peserta pemilu, kesiapan lembaga pengawas pemilu dan penyedia jasa keuangan dalam menghadapi pemilu 2024, serta untuk mengetahui pola/modus indikasi pelanggaran pemilu.

PPATK juga membentuk Tim Kerja *Collaborative Analysis Team* (CAT) Pemilu/Pilkada 2024 yang merupakan komitmen bersama dan wujud nyata kerjasama serta koordinasi bersama dengan seluruh *stakeholders* rezim APU-PPT PPSPM yang diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya pelanggaran Pemilu/Pilkada.

Dalam bidang analisis dan pemeriksaan, PPATK telah menyampaikan 1.297 Laporan Intelijen Keuangan secara proaktif maupun reaktif kepada Aparat Penegak Hukum (Apgakum) dan instansi terkait, diantaranya adalah 1.272 Hasil Analisis dan Informasi dengan nilai akumulasi transaksi terkait dengan indikasi Tindak Pidana Asal sejumlah total Rp545.767.391.524.637,- serta 25 Hasil Pemeriksaan (HP) dengan dengan nilai akumulasi transaksi terkait dengan indikasi Tindak Pidana Asal sejumlah total Rp563.691.667.847.653,-.

Sepanjang tahun 2023, PPATK meraih sejumlah penghargaan dan prestasi kinerja baik seperti: penghargaan kompetisi *Best Egmont Case Award* (BECA) 2023 antar FIU di seluruh dunia, Posisi Ke-3 AML Hackathon 2023 TrackAML yang diselenggarakan oleh Financial Intelligence Consultative Group dan Bank Negara Malaysia dengan tema "*Outsmarting Financial Crime with Innovative Solutions*"; RAN PE Awards 2023 pada pilar III tentang Kemitraan dan Kerja Sama Internasional; BKN Awards 2023 sebagai Kategori Utama Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik; Predikat AA "Sangat Memuaskan" Anugerah Kearsipan Tahun 2023; Penghargaan BNN terkait Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotik, dan BAZNAS Award terkait

kategori lembaga pendukung ekosistem zakat sejahteraan umat, dan masih banyak lagi pencapaian yang terukir di tahun 2023 ini.

PPATK mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penguatan Rezim APU-PPT di Indonesia, seluruh Kementerian/Lembaga, pihak pelapor, lembaga pengawas dan pengatur, seluruh *stakeholder*, mitra kerja, dan masyarakat Indonesia yang telah bersama-sama berkomitmen menjaga sistem keuangan dan perekonomian Indonesia tetap terjaga dan berintegritas.

Upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM PPATK akan selalu menempuh jalan yang terjal. Sebab, praktik tersebut termasuk *extraordinary crime* yang membutuhkan penanganan luar biasa juga. Sungguh diibaratkan jalan yang dilalui memiliki medan yang berat, penuh rintangan dan tantangan. *Fortis Fortuna Adiuvat*. Keberuntungan adalah milik orang-orang pemberani: mereka yang menempuh jalan tak mudah. PPATK terus mengambil langkah berani, semata demi tujuan yang indah, Indonesia bebas dari pencucian uang dan terorisme.

Wassalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Jakarta, 31 Desember 2023

Kepala PPATK

Ivan Yustiavandana



DAFTAR ISI

Visi, Misi, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Nilai Dasar PPATK.....	iv	Diseminasi FIR on ML/TF.....	68	SETIA, Memberikan Dukungan Manajemen.....	146	Penghargaan & Pencapaian 2023.....	228
Struktur Organisasi.....	x	Satu Data.....	70	Ringkasan Keuangan.....	148	Track-Aml Indonesia Raih Posisi Ke-3	
Kata Pimpinan.....	xii	Peningkatan Kualitas Data Pelaporan.....	72	Opini Laporan Keuangan PPATK.....	154	Dalam AML Hackathon 2023.....	230
Daftar Isi.....	xiv	Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Data.....	73	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah....	157	BECA AWARD.....	232
Strategi Nasional.....	2	Pengelolaan Registrasi Pihak Pelapor.....	74	Nilai Kinerja Anggaran.....	164	PPATK Raih RAN PE Awards 2023.....	234
Rencana Strategis.....	3	Tabel Statistik.....	76	Renstra dan RPJMN.....	166	Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.....	236
Mendunia, Dua Dekade Menjaga Indonesia.	4	Direktori Pihak Pelapor.....	79	Komposisi Sumber Daya Manusia PPATK.....	168	BKN Award 2023.....	240
Jaga NKRI, Jaga Demokrasi.....	16	Rapat Koordinasi Tahunan 2023.....	80	Manajemen Internal.....	170	Predikat AA Sangat Memuaskan	
ASA, Menjaga Negeri Melalui Kegiatan Analisis dan Pemeriksaan.....	26	Pengawasan Kepatuhan.....	86	Pengelolaan Barang Milik Negara.....	174	Kearsipan PPATK.....	242
Hasil Analisis dan Pemeriksaan PPATK 2023.	28	Tema Pengawasan Kepatuhan PJK 2023.....	88	Pengelolaan Kearsipan.....	180	PPATK Raih Penghargaan dari BNN.....	244
Kontribusi PPATK Terhadap Penerimaan Negara.....	32	Kelemahan PJK.....	90	Festival Kreatif Anti Pencucian Uang.....	182	Sinergi PPATK - Ditjen Pajak	
Pemanfaatan Produk Intelijen Keuangan PPATK.....	34	Rencana Audit PJK 2024.....	93	Jangkauan Edukasi Publik Melalui Media Sosial.....	185	Optimalisasi Penegakan Hukum Pajak.....	246
Pengungkapan Perkara TPPU.....	36	Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang Jasa Lain Dan Profesi.....	94	Pengadaan Barang/Jasa.....	186	Partisipasi dan Prestasi PPATK dalam Mendukung Keketuaan ASEAN 2023.....	250
<i>Green Financial Crime (GFC)</i>	42	TEGAS, Membangun Strategi dan Kerjasama.....	98	Unit Layanan Pimpinan.....	190	GATRA AWARD.....	252
Perdagangan Orang dan/atau <i>Child Sex Abuse</i>	46	Perkuat Kerja Sama Dalam Negeri.....	100	Indeks CSM dan Indeks KAMI.....	194	Keterbukaan Informasi Publik.....	254
Narkotika.....	48	Petakan Risiko Bersama.....	108	Indeks SPBE dan Indeks TKTI.....	196	GAKKUM AWARD TAHUN 2023.....	257
Perjudian <i>Online</i>	50	Agar Rezim APUPPT Semakin Kuat.....	112	TrackAML Hackathon.....	198	BAZNAS Award 2023.....	258
Penipuan dan Penggelapan.....	52	Semakin Bernas Bersama Satgas.....	115	Pelatihan APUPPT.....	200	ISO 37001.....	261
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.....	56	Komite TPPU.....	118	AML SMART Competition 2023.....	204	Kompetensi Award 2023.....	263
Tindak Pidana di Bidang Kesehatan.....	60	Tetap Pantau Tindak Lanjut.....	126	AML CTF Office Battle 2023.....	206	GLOSARIUM.....	264
Penghentian Sementara.....	62	Berantas Pendanaan Sampai Ke Akar.....	128	Kompetisi Debat APUPPT.....	208		
PENGASUH, Siap Asuh Pihak Pelapor dan Stakeholder.....	64	Koordinasi dan Asistensi.....	132	PPATK Mengajar.....	210		
Statistik Laporan Transaksi Keuangan.....	66	Kerjasama Internasional.....	134	Membangun Kolaborasi Pentahelix.....	212		
Penilaian Komitmen Pihak Pelapor.....	67	Saling Tukar Informasi.....	139	Pengaduan Masyarakat.....	214		
		PPATK 4th Legal Forum.....	140	Layanan Bantuan.....	216		
		Dukungan PPATK dalam Pemberian Keterangan Ahli.....	141	Membangun Literasi APUPPT.....	218		
		Peluncuran dan Diskusi Buku Pintar.....	142	Pengawasan Internal.....	220		
		Diseminasi PPATK.....	144	Indeks Efektivitas Kinerja PPATK.....	226		



STRATEGI NASIONAL

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU-TPPT TAHUN 2020-2024

STRATEGI 01

Meningkatkan kemampuan sektor privat untuk mendeteksi indikasi atau potensi TPPU, TPPT, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan memperhatikan penilaian risiko

STRATEGI 02

Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko

STRATEGI 03

Meningkatkan upaya pemberantasan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko

STRATEGI 04

Mengoptimalkan *asset recovery* dengan memperhatikan penilaian risiko

STRATEGI 05

Meningkatkan efektivitas *targeted financial sanction* dalam rangka mendisrupsi aktivitas terorisme, teroris, organisasi teroris, dan aktivitas pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal

RENCANA STRATEGIS

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TAHUN 2020-2024



TUJUAN

Memperkuat rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia



SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia



TARGET

2020 : 5.46
2021 : 5.73
2022 : 6.89
2023 : 7.23
2024 : 7.60

MENDUNIA, DUA DEKADE MENJAGA INDONESIA

MENUJU PENGAKUAN DUNIA

Setahun sebelumnya, tepatnya Oktober 2022, PPATK sudah berharap bahwa Indonesia akan diterima menjadi negara anggota penuh FATF. Harapan itu didukung atas ditetapkannya Indonesia menjadi *observer* FATF sejak 2018. Sejak itu, rangkaian tahapan penilaian teknis kepatuhan terhadap 40 rekomendasi dan 11 *Immediate Outcome* (IO) FATF dalam *Mutual Evaluation Review* (MER) dijalani hingga akhir tahun 2022. Saat *Plenary Meeting* bulan Februari 2023, Indonesia memperoleh capaian yang baik dalam penilaian MER tersebut. Atas hasil capaian yang baik tersebut, Presiden FATF yang kala itu dijabat oleh T. Raja Kumar dari Singapura memberikan tawaran berupa *fast-track* untuk proses keanggotaan Indonesia di FATF. *Fast-track* tersebut berupa *action plan* yang berfokus pada IO 3 tentang pengawasan kepatuhan, IO 8 tentang perampasan aset, dan IO 11 tentang pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Tawaran *fast-track* tersebut tidak disiasikan. Semaksimal mungkin, PPATK yang menjadi bagian dari delegasi Indonesia berupaya memenuhi fokus tiga IO tersebut. *Plenary Meeting* berikutnya, yang digelar pada

bulan Juni 2023, PPATK lebih optimis. Karena sejumlah pemenuhan rekomendasi pada 3 (tiga) IO yaitu IO 3; IO 8 dan IO 11 sudah dipenuhi. Namun, lagi-lagi Indonesia belum diterima menjadi anggota penuh FATF pada FATF Plenary bulan Juni 2023.

Namun, PPATK tidak menyerah. Sebagai *focal point* yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang di Indonesia, PPATK terus berupaya agar Indonesia menjadi anggota penuh FATF. PPATK bekerja sama dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU) dan seluruh Kementerian/Lembaga terkait senantiasa meningkatkan pemenuhan *Action Plan*. Selain itu, Delegasi Republik Indonesia (Delri) juga selalu berkontribusi aktif dalam setiap FATF Plenary baik dalam *Working Group Meetings* maupun dalam sidang pleno.



Hasilnya, optimisme Indonesia untuk diterima dalam FATF *Plenary* Oktober 2023 meningkat karena seluruh 48 item tindakan dalam *Action Plan* telah ditangani. Artinya, pemenuhan *Action Plan* telah meningkat dari 77% *Action Plan* pada periode sebelumnya menjadi 100% pada Oktober 2023.

HARI PENENTUAN

Sesi *Plenary* pada Rabu, 25 Oktober 2023 yang ditunggu-tunggu oleh Delri mulai berjalan dari satu mata agenda sampai agenda berikutnya. Hingga tiba di sore hari, mata agenda pembahasan keanggotaan FATF dibuka. Presiden FATF mempersilahkan Kepala PPATK, Dr. Ivan Yustiavandana selaku *Head of Delegations* Indonesia untuk menyampaikan

speech maksimal 3 menit. Dalam *speech* itu, Kepala PPATK secara lugas menjelaskan tentang kemajuan penegakan rezim APU-PPT yang didukung secara penuh di setiap tingkatan dari level Presiden sampai teknis dari seluruh komponen terkait. Komitmen kuat Indonesia tidak akan berhenti sampai *membership*, justru setelah *membership*, Indonesia akan semakin kuat dalam menegakkan Rezim APU-PPT.

Setelah itu, Presiden FATF membuat Sidang Pleno menjadi sesi tertutup, yaitu tanpa kehadiran Delri. Presiden FATF T. Raja Kumar bertanya kepada forum, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atas pidato yang disampaikan delegasi Indonesia. Suasana hening, tidak ada delegasi yang mengangkat tanda pengajuan komentar. Artinya, seluruh anggota FATF yang berjumlah 39 secara

LANGKAH PPATK dalam menjadi anggota penuh FATF secara rinci dijelaskan dengan sebagai berikut:

Penyusunan Kertas Posisi Indonesia dalam Forum Internasional:

- Penyampaian *Indonesia's 2nd Progress Report of Action Plan* kepada CG FATF (8 September 2023)
- Penyampaian *Additional Information* pada *2nd Progress Report of Action Plan* kepada CG FATF sebagai tindak lanjut pertemuan virtual dengan CG (22 & 23 September 2023)
- FGD Pembahasan draft kuesioner dalam penyusunan kajian regional terkait dengan CBCC (Minggu ke-2 November 2023)
- Penyampaian masukan terkait ISIS Al Qaeda dalam RTMG (FATF) pada 8 Desember 2023

- Penyampaian masukan terkait *NRA Guidance* dalam RTMG (FATF) pada 8 Desember 2023.

Proses Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Internasional:

- *FATF Plenary* Februari, Paris, tanggal 20-23 Februari 2023
- *FATF Plenary* Juni, Paris, tanggal 19-23 Juni 2023
- *FATF Plenary* Oktober dan diterimanya Indonesia menjadi anggota FATF, Paris, tanggal 23 - 27 Oktober 2023
- Rapat Pokja Kontribusi Organisasi Internasional sehubungan persiapan keanggotaan Indonesia Dalam FATF (9 Agustus 2023)

- Rapat Koordinasi secara daring untuk Pembahasan Progres Sementara Pemenuhan AP Indonesia untuk *Immediate Outcome* 3, 8 dan 11 (15 Agustus 2023)
- Memfasilitasi sosialisasi *Passenger Risk Management* (PRM) milik DJBC sebagai pemenuhan *Action Plan* (AP) IO 8 (9 September 2023)
- Rapat persiapan akhir pendalaman materi AP 3, 8, 11 (15 September 2023).

Keterlibatan Aktif Indonesia dalam Organisasi Internasional:

- Mengikuti kegiatan *FATF Standard Training*, Kuala Lumpur, Malaysia (6 – 10 November 2023)

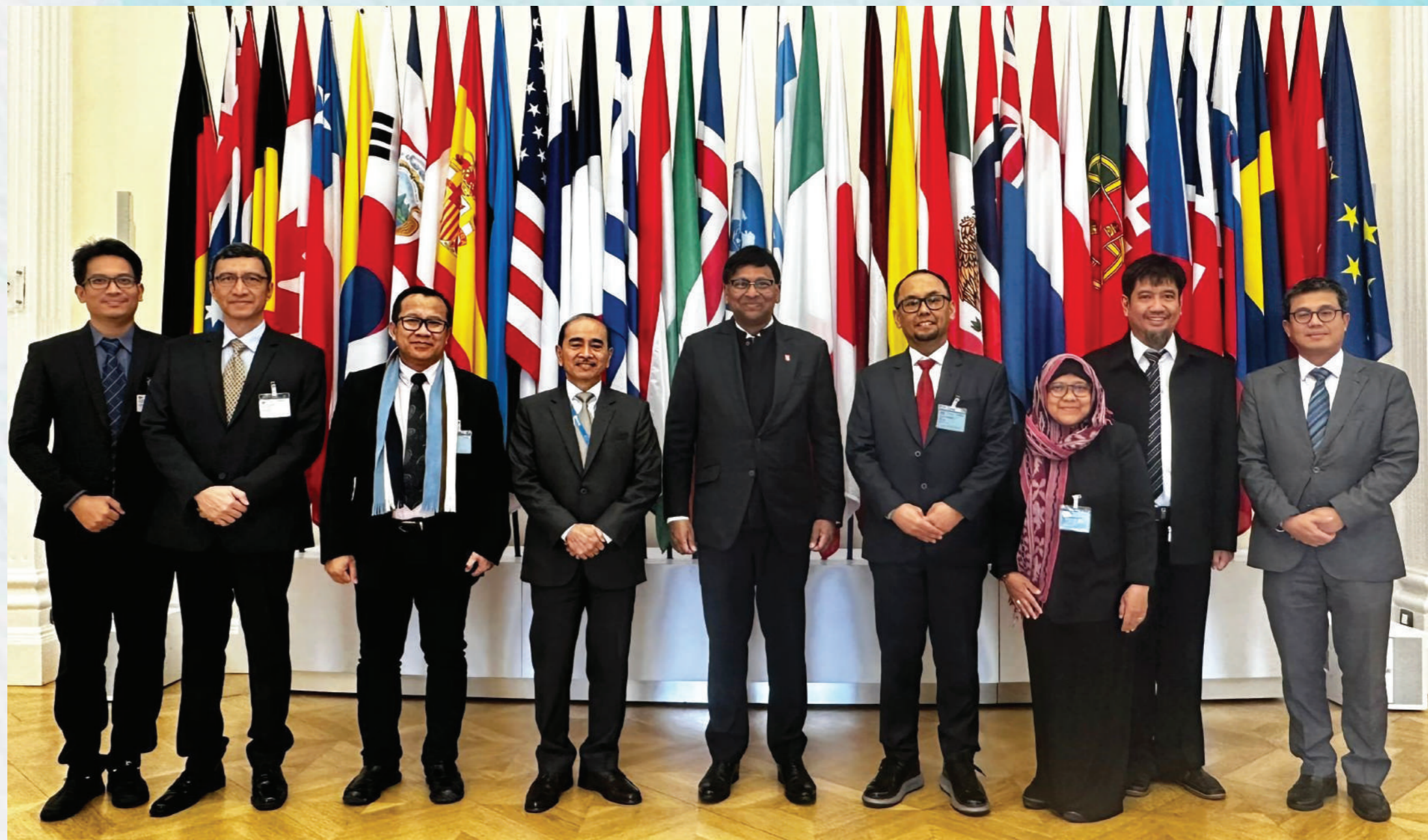
- *Asset Recovery Conference* (Egmont) Taipei, Taiwan (16 – 17 November 2023)
- Undangan pertemuan pembahasan revision Rec.16 ke BI dan OJK pada 28 November, 4 Desember & 8 Desember 2023
- Penyampaian undangan Sosialisasi amandemen R.8 & INP8 tentang *Non Profit Organization* (NPO) ke K/L terkait pada 18 Desember 2023
- Penyampaian *confidentiality letter* ICRG kepada FATF untuk keikutsertaan Indonesia di ICRG JG pada 6 & 13 Desember 2023
- Sidang Interpol ke-91 Vienna Austria – 28 November - 1 Desember 2023.



konsensus dan aklamasi menyatakan bahwa Indonesia telah memenuhi seluruh Action Plan dan layak untuk diterima menjadi anggota penuh FATF (*full membership*).

Selang satu menit dalam keheningan dan Presiden FATF memastikan tidak ada satupun anggota yang mau berkomentar, maka Presiden FATF mengetok palu keputusan Indonesia diterima menjadi anggota FATF. Ketok palu ini disambut sorak sorai tepuk tangan dan ucapan selamat memenuhi ruang rapat tersebut. Sejarah mencatat, pada Rabu, 25 Oktober 2023 pukul 17.50 CET (waktu Paris), Indonesia diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota FATF sebagai anggota tetap ke-40 pada FATF, dan melengkapi anggota G-20 yang seluruhnya telah menjadi anggota FATF. Keputusan tersebut diumumkan melalui *Public Statement* FATF pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023.

Keberhasilan ini turut mendapat apresiasi dari Presiden RI, Joko Widodo, yang menyebut keanggotaan ini penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akhirnya berdampak pada meningkatnya *confident*, meningkatnya *trust*





Indonesia di sisi bisnis dan iklim investasi. Presiden Jokowi juga berharap hal ini akan menjadi langkah awal menuju tata kelola rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indonesia yang lebih baik.

BANYAK MANFAAT

Keanggotaan FATF merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi, koordinasi dan implementasi rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal (APU-PPT PPSPM) di Indonesia. Dengan perolehan status ini, Indonesia akan mengikuti seluruh kegiatan resmi FATF sebagai negara anggota yang memiliki hak penuh dan dapat secara langsung menyuarakan gagasan dalam proses pengambilan kebijakan atau keputusan dalam forum FATF.

Status sebagai anggota FATF akan memberikan dampak positif

pada kondisi makro ekonomi Indonesia seperti *credit rating* dan membuka peluang bisnis, perdagangan, serta investasi global yang lebih luas. Hal ini terwujud karena pengakuan terhadap integritas sistem keuangan yang tinggi melalui penerapan standar-standar internasional untuk mencegah kejahatan di sektor keuangan.

Keanggotaan tersebut juga menjadi sarana untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia sebagai negara besar di Asia dan *emerging market* yang berdampak positif bagi perkembangan ekonomi domestik yang manfaatnya secara luas dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh FATF juga dapat memberikan kontribusi pada penentuan kebijakan strategis global terkait APU PPT sehingga semakin mempertegas Indonesia sebagai negara yang berintegritas dan mampu berkontribusi aktif di rezim APU PPT global. Hal ini selaras dengan amanat pembukaan Konstitusi untuk turut serta mewujudkan ketertiban dunia yang bersih dari praktik-praktik kejahatan keuangan, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Keanggotaan Indonesia di FATF juga akan meningkatkan kredibilitas perekonomian nasional dan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang kemudian akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik dalam maupun luar negeri. Kepercayaan investor kepada pemerintah akan meningkat karena keyakinan bahwa uang yang mereka investasikan di Indonesia aman dan berisiko rendah terhadap terjadinya pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Terkait penegakan hukum, Indonesia dapat meningkatkan efektifitas kerjasama internasional melalui dukungan kuat jejaring negara anggota FATF untuk mengungkap kasus TPPU dan TPPT lintas negara/jurisdiksi termasuk pemulihan aset.

Selain itu, dengan status sebagai anggota penuh FATF, kesempatan Indonesia semakin luas untuk memajukan kepentingannya dan merebut peluang emas di kancah internasional menuju Indonesia Emas 2045.

DELEGASI RI BERFOTO USAI FATF PLENARY MEETING
BULAN OKTOBER 2023



HASIL MER FATF

Hasil MER FATF Indonesia yang diadopsi pada FATF *Plenary* bulan Februari 2023 yang selanjutnya telah dipublikasikan pada April 2023 dapat diunduh pada link pada QR Code di samping.



Hasil MER FATF Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memperoleh hasil (*rating*) yang baik dari FATF dan mencapai kemajuan dalam penegakan Rezim APU PPT Indonesia. Dari 40 Rekomendasi dalam aspek *Technical Compliance/TC* yaitu dari segi kebijakan dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan, Indonesia memperoleh hasil yang baik sebagai berikut:

- Indonesia berhasil mendapatkan *Rating C (Compliant)* pada 6 Rekomendasi, *Rating LC (Largely Compliant)* pada 29 Rekomendasi, dan *Rating PC (Partially Compliant)* pada 5 Rekomendasi;
- Indonesia memperoleh C/LC pada lima rekomendasi kunci yaitu Rec 3 (Kriminalisasi TPPU), Rec 5 (Kriminalisasi TPPT), Rec 10 (*Customer Due Diligence*), Rec 11 (*Record Keeping*), dan Rec 20 (pelaporan LTKM).
- Tidak ada *Rating Non-Compliant* (tidak patuh).

Sementara itu, dari 11 *Immediate Outcome* (IO) pada aspek penilaian efektivitas implementasi kerangka hukum dan kelembagaan suatu negara

untuk mencapai penguatan penerapan APU-PPT, Indonesia memperoleh capaian yang baik yaitu:

- Indonesia mendapatkan kategori Substantial pada 4 IO, yaitu IO.1, IO.2, IO.6 dan IO.9.
- Tidak ada Rating Low (Rendah).

Berikut ini disampaikan rincian capaian Indonesia terkait kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi FATF dalam tabel sebagai berikut:

✓ *Technical Compliance Ratings*

Nomor Rekomendasi	Rekomendasi FATF	Nilai (Rating)
Rec. 1	<i>Assessing risks and applying a risk-based approach</i>	LC
Rec. 2	<i>National cooperation and coordination</i>	LC
Rec. 3	<i>Money Laundering Offence</i>	C
Rec. 4	<i>Confiscation and provisional measures</i>	LC
Rec. 5	<i>Terrorist financing offence</i>	LC
Rec. 6	<i>Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing</i>	PC
Rec. 7	<i>Targeted financial sanctions related to proliferation</i>	PC
Rec. 8	<i>Non-profit organisations</i>	PC
Rec. 9	<i>Financial institution secrecy laws</i>	LC
Rec. 10	<i>Customer due diligence</i>	LC
Rec. 11	<i>Record keeping</i>	LC
Rec. 12	<i>Politically exposed persons</i>	LC

Nomor Rekomendasi	Rekomendasi FATF	Nilai (Rating)
Rec. 13	<i>Correspondent banking</i>	LC
Rec. 14	<i>Money or value transfer services</i>	C
Rec. 15	<i>New technologies</i>	LC
Rec. 16	<i>Wire transfers</i>	LC
Rec. 17	<i>Reliance on third parties</i>	LC
Rec. 18	<i>Internal controls and foreign branches and subsidiaries</i>	C
Rec. 19	<i>Higher-risk countries</i>	LC
Rec. 20	<i>Reporting of suspicious transaction</i>	C
Rec. 21	<i>Tipping-off and confidentiality</i>	LC
Rec. 22	<i>DNFBPs: Customer due diligence</i>	LC
Rec. 23	<i>DNFBPs: Other measures</i>	LC
Rec. 24	<i>Transparency and beneficial ownership of legal persons</i>	LC
Rec. 25	<i>Transparency and beneficial ownership of legal arrangements</i>	PC
Rec. 26	<i>Regulation and supervision of financial institutions</i>	LC
Rec. 27	<i>Powers of supervisors</i>	LC
Rec. 28	<i>Regulation and supervision of DNFBPs</i>	PC
Rec. 29	<i>Financial intelligence units</i>	C
Rec. 30	<i>Responsibilities of law enforcement/ investigative authorities</i>	C
Rec. 31	<i>Powers of law enforcement and investigative authorities</i>	LC
Rec. 32	<i>Cash couriers</i>	LC
Rec. 33	<i>Statistics</i>	LC
Rec. 34	<i>Guidance and inquiry</i>	LC
Rec. 35	<i>Sanctions</i>	LC
Rec. 36	<i>International instruments</i>	LC
Rec. 37	<i>Mutual legal assistance</i>	LC
Rec. 38	<i>Mutual legal assistance: freezing and confiscation</i>	LC
Rec. 39	<i>Extradition</i>	LC

Nomor Rekomendasi	Rekomendasi FATF	Nilai (Rating)
Rec. 40	<i>Other forms of international cooperation</i>	LC

Keterangan: Urutan nilai (*rating*) dari tertinggi sampai terendah adalah:

- Compliant (C)*;
- Largely Compliant (LC)*;
- Partially Compliant (PC)*;
- Non-Compliant (NC)*

✓ *Effectiveness Ratings*

Nomor IO	IO dalam Rekomendasi FATF	Nilai (Rating)
IO 1	<i>Risk, Policy and Coordination</i>	<i>Substantial</i>
IO 2	<i>International Cooperation</i>	<i>Substantial</i>
IO 3	<i>Supervision</i>	<i>Moderate</i>
IO 4	<i>Prevention Measures</i>	<i>Moderate</i>
IO 5	<i>Legal Persons and Arrangements</i>	<i>Moderate</i>
IO 6	<i>Financial Intelligence</i>	<i>Substantial</i>
IO 7	<i>Money laundering investigation and prosecution</i>	<i>Moderate</i>
IO 8	<i>Confiscation</i>	<i>Moderate</i>
IO 9	<i>Terrorist financing investigation and prosecution</i>	<i>Substantial</i>
IO 10	<i>Terrorist financing preventive measures & financial sanctions</i>	<i>Moderate</i>
IO 11	<i>Proliferation Financing Sanctions</i>	<i>Moderate</i>

Keterangan: Urutan nilai (*rating*) dari tertinggi sampai terendah pada IO adalah:

- High level of effectiveness*
- Substantial level of effectiveness*
- Moderate level of effectiveness*
- Low level of effectiveness*



JAGA NKRI, JAGA DEMOKRASI

KONTESTASI Pemilihan Umum (Pemilu) khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) digelar di tahun 2024. Tidak dapat dimungkiri, ajang perhelatan tersebut dapat memunculkan potensi politik transaksional. Oleh karenanya, PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) turut berkontribusi mengawal pesta demokrasi Indonesia dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kerentanan dan risiko TPPU peserta pemilu, kesiapan lembaga pengawas pemilu dan penyedia jasa keuangan dalam menghadapi pemilu 2024, serta untuk mengetahui pola/modus indikasi pelanggaran pemilu.

SEPANJANG TAHUN 2023

PPATK TELAH MENYAMPAIKAN HASIL ANALISIS/INFORMASI DAN HASIL PEMERIKSAAN TERKAIT PEMILU DIANTARANYA:

- 35 HA** disampaikan kepada Kejaksaan,
- 21 HA** dan **5 HP** disampaikan kepada KPK,
- 01 HA** dan **1 HP** disampaikan kepada Kepolisian RI
- 01** Informasi disampaikan kepada OJK
- 03** Informasi disampaikan kepada BIN
- 03** Informasi disampaikan ke Bawaslu

Selain itu, PPATK juga melakukan **Riset/ Penelitian terkait Pemilu** yang telah menghasilkan:

- 02** Hasil Analisis Strategis (Eksekutif dan Legislatif)
- 01** Hasil Analisis Tipologi

Adapun poin-poin utama hasil penelitian adalah sebagai berikut.

HASIL ANALISIS STRATEGIS PEMILU LEGISLATIF

- Profil peserta pemilu legislatif yang memiliki risiko tinggi yaitu: pengusaha/wiraswasta, pejabat lembaga legislatif dan pemerintah, dan pegawai swasta.
- Metode transaksi yang termasuk kriteria risiko tinggi adalah pemindah-bukuan/transfer dan tunai.
- Jenis tindak pidana asal yang berisiko tinggi antara lain: korupsi, di bidang perpajakan, penyuapan, narkoba, penggelapan, dan perjudian.
- Wilayah yang berisiko tinggi antara lain: Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur.

HASIL ANALISIS STRATEGIS PEMILU EKSEKUTIF

- Profil kepala daerah petahana yang memiliki risiko tinggi yaitu: pejabat lembaga legislatif dan pemerintah, dan pengusaha/wiraswasta.

- Metode transaksi yang termasuk kriteria risiko tinggi adalah pemindahbukuan/transfer dan tunai.
- Jenis tindak pidana asal yang memiliki kerentanan tinggi antara lain: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, perjudian, dan di bidang perpajakan.
- Wilayah yang berisiko tinggi antara lain: Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

HASIL ANALISIS TIPOLOGI TINDAK PIDANA DALAM KEGIATAN PEMILIHAN UMUM

Modus dan operandi yang kemudian menjadi tipologi umum TPPU sebagai berikut:

- Penerimaan sumbangan dari beberapa perusahaan atau perorangan yang terafiliasi.
- Penerimaan sumbangan melalui pihak keluarga, kemudian dilakukan setoran ke bank secara bertahap.
- Penerimaan sumbangan yang berasal dari perusahaan dalam negeri yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).
- Penerimaan sumbangan yang berasal dari perusahaan yang sering menjadi rekanan pemerintah daerah setempat.



- Penerimaan sumbangan yang dilaporkan dalam Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) berasal dari dana pribadi, namun setelah ditelusuri diketahui berasal dari pihak lain.
- Penggunaan Rekening Dana Kampanye (RKDK) yang tidak dilaporkan untuk Menampung Sumbangan Dana Kampanye sebelum Periode Pembukaan RKDK.
- Ketidaksesuaian informasi penyumbang korporasi antara LPSDK dengan data penyumbang di mutasi rekening.
- Penggunaan rekening selain RKDK sebagai penampung dana untuk kepentingan kampanye.
- Pemberian uang atau barang kepada pemilih untuk memperoleh dukungan suara (politik uang).
- Penggunaan hasil tindak pidana untuk kepentingan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah.
- Penerimaan sumbangan dari perseorangan

yang dananya menggunakan hasil perusahaan pribadi di luar negeri.

- Penggunaan dana pinjaman perbankan untuk menyembunyikan asal usul sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- Penggunaan *nominee* untuk menyembunyikan asal usul sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- Pemanfaatan dana APBD untuk kampanye terselubung saat mendekati waktu Pemilihan Kepala Daerah.

Selain melakukan analisis, PPATK juga melakukan kesepakatan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait Pencucian Uang dan Pengawasan Dana Kampanye Pemilu. Kesepakatan itu dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) Kepala PPATK dengan Ketua Bawaslu RI. Hal ini merupakan salah satu bagian penting dari upaya PPATK untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta pencegahan dan penindakan

pelanggaran dan pengawasan dana kampanye pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan presiden tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Pelanggaran serta Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 di Surabaya, Rabu, 8 Februari 2023. Turut hadir sejumlah komisioner dan anggota Bawaslu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta beberapa pejabat PPATK. PPATK juga telah memberikan sosialisasi kepada 1.542 perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan 104 perwakilan Bawaslu Provinsi pada Rakornas Bawaslu di Surabaya, 7 Februari 2023.

Kepala PPATK juga melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteri Agama (Menag), dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada tanggal 15 September 2023 di Gedung KPU terkait penyelenggaraan pemilu 2024. Penandatanganan ini dihadiri langsung Ketua PPATK Ivan Yustiavandana, Menag Yaqut Cholil Qoumas, dan Menpora Dito Ariotedjo. Hal ini sebagai bentuk bahwa PPATK siap membantu pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pencegahan penindakan pelanggaran.



Ditjen Imigrasi Sepakat Kawal Pemilu Bersih 2024

PPATK menerima kunjungan audiensi dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi di Gedung PPATK, Rabu, 11 Oktober 2023. Hadir dalam kunjungan ini Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, beserta jajaran, yang diterima oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, didampingi oleh Sekretaris Utama, Irjen Pol. Alberd T.B. Sianipar beserta sejumlah pejabat Eselon II di lingkungan PPATK.

Tujuan dari pertemuan ini sebagai bentuk

silaturahmi guna meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam menegakkan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) terutama terkait pertukaran mata uang asing yang dilihat dari keluar masuknya orang dari dan keluar negeri, untuk menghadapi kontestasi politik yang sudah di depan mata, untuk mencegah dan mengawasi berbagai aliran dana yang mencurigakan.



PERKUAT PENGAWASAN PEMILU DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menyampaikan *keynote speech* pada acara BNI Forum Kepatuhan - Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT & PPSPM) Tahun 2023, Rabu, 30 Agustus 2023, bertempat di Jakarta.

Acara ini digelar untuk meningkatkan *awareness* terhadap jajaran *Senior Executive Vice President* (SEVP), Direksi dan Dewan Komisaris, karena berkembangnya tipologi kejahatan, transformasi digital, kesiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 dan bertepatan dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

Ivan menyampaikan bahwa perbankan sebagai pihak pelapor merupakan garda terdepan penegakan gerakan APU-PPT. Penting bagi garda terdepan untuk mengkinikan berbagai dinamika tipologi kejahatan, perkembangan transformasi digital, guna melakukan pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan PPSPM, terutama pada sektor jasa keuangan. Terlebih dalam waktu yang tak lama lagi, Pemilihan Umum (Pemilu) akan berlangsung, dan kesiapan maupun kesiapan harus dipastikan telah prima dan optimal.

Sebagai pelaksanaan implementasi Pilar Program APU-PPT yaitu Pengawasan Aktif dari Direksi dan Komisaris di lingkungan BNI, perlu adanya peningkatan pemahaman secara berkesinambungan dan *refreshment* bagi Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak. Berdasarkan hal tersebut BNI menghadirkan narasumber dari PPATK dan Otoritas Jasa



Keuangan (OJK), dengan 36 peserta (seluruh SEVP, Direksi, Dewan Komisaris BNI, Direktur Utama dan Komisaris Utama Perusahaan Anak BNI) secara *Offline*, dan Seluruh General

Manager (GM) BNI dan Seluruh Direksi & Dewan Komisaris Perusahaan Anak secara *Online*.



FORUM DISKUSI SENTRA GAKKUMDU

Wujudkan Pemilu Bersih



Jelang Pemilu 2024, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menjadi narasumber pada Forum Diskusi Sentra Gakkumdu dengan tema 'Wujudkan Pemilu yang Bersih', acara tersebut diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam RI pada Selasa, 8 Agustus 2023 di Surabaya.

Forum diskusi tersebut bertujuan untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang dapat menodai dan menggagalkan Pemilu, termasuk korupsi, sebab peningkatan volume terjadinya korupsi selalu sejalan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan mahasiswa se-Jawa Timur, sehingga diharapkan tujuan

kegiatan dapat tersampaikan ke masyarakat, khususnya kelompok muda yang akan menjadi pemilih terbesar dalam Pemilu 2024.

Kepala PPATK menegaskan, guna mewujudkan Pemilu bersih PPATK hadir menjaga dan mengawasi aliran dana terkait Pemilu 2024. Sementara itu, untuk pelanggaran aliran dana pemilu, PPATK berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU.

Apabila di Pemilu 2024 ada indikasi pelanggaran tindak pidana keuangan, PPATK akan langsung menindak bersama aparat penegak hukum.

ASA

Menjaga Negeri Melalui Kegiatan
Analisis dan Pemeriksaan



HASIL ANALISIS DAN PEMERIKSAAN PPATK 2023

1.297

Laporan Intelijen Keuangan baik secara proaktif maupun reaktif kepada Aparat Penegak Hukum (Apgakum) dan instansi terkait

1.272

Hasil Analisis (HA) dan Informasi

Rp545.767.391.524.637,00

nilai akumulasi transaksi terkait dengan indikasi tindak pidana asal

25

Hasil Pemeriksaan (HP)

Rp563.691.667.847.653,00

nilai akumulasi transaksi terkait dengan indikasi tindak pidana asal

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang, selama periode tahun 2023 PPATK telah menyampaikan 1.297 Laporan Intelijen Keuangan baik secara proaktif maupun reaktif kepada Aparat Penegak Hukum (Apgakum) dan instansi terkait. Diantaranya adalah 1.272 Hasil Analisis dan Informasi dengan nilai akumulasi transaksi terkait dengan indikasi tindak pidana asal

sejumlah total **Rp545.767.391.524.637,00** serta 25 Hasil Pemeriksaan (HP) dengan nilai akumulasi transaksi terkait dengan indikasi tindak pidana asal sejumlah total **Rp563.691.667.847.653,00**.

Guna mendukung pelaksanaan analisis atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud, selama periode Januari 2023 s.d Desember 2023 PPATK telah menyampaikan permintaan data dan informasi kepada Pihak Pelapor sebanyak 11.245 permintaan, diantaranya kepada Penyedia Jasa Keuangan Bank sebanyak 7.991 permintaan, Penyedia Jasa Keuangan Non Bank sebanyak 3.217 permintaan, dan kepada regulator dan/atau instansi lainnya sebanyak 37 permintaan.

11.245

Permintaan Data dan Informasi kepada Pihak Pelapor

selama periode Januari 2023 s.d Desember 2023

7.991

Permintaan kepada Penyedia Jasa Keuangan Bank

3.217

Permintaan kepada Penyedia Jasa Keuangan Non Bank

37

Permintaan kepada regulator dan/atau instansi lainnya

Disamping itu, pada tahun 2023 PPATK juga aktif melaksanakan pertukaran informasi dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU) di luar negeri dengan menyampaikan dan/atau menerima informasi berupa *Spontaneous Outgoing*, *Spontaneous Incoming*, *Outgoing Request*, dan *Incoming Request*.

Berikut merupakan data rincian statistik atas Produk Intelijen Keuangan sebagaimana dimaksud:

1. Hasil Analisis, informasi, dan hasil pemeriksaan

Produk Intelijen Keuangan	Proaktif	Reaktif	Total
Hasil Analisis	290	518	808
Hasil Pemeriksaan	23	2	25
Informasi	66	398	464
Total	379	918	1.297

Keterangan:

- Hasil Analisis (HA): Hasil analisis yang disampaikan ke Apgakum.
- Hasil Pemeriksaan (HP): Hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Apgakum.
- Informasi: Informasi yang disampaikan kepada Non APH termasuk dengan informasi seleksi jabatan strategis.
- Proaktif: HA, HP dan informasi proaktif yang disusun berdasarkan laporan yang diterima oleh PPATK.
- Reaktif: HA, HP dan informasi reaktif yang disusun berdasarkan permintaan dari stakeholder.

2. Permintaan data dan/atau informasi kepada pihak pelapor, regulator dan instansi terkait

Permintaan Informasi	Jumlah
a. Bank	7.991
b. Non Bank	3.217
c. Regulator/Instansi Lainnya	37
Total	11.245

3. Laporan pertukaran informasi antar FIU luar negeri

Jenis Pertukaran Informasi LN	Jumlah
<i>Spontaneous Outgoing</i>	21
<i>Spontaneous Incoming</i>	24
<i>Outgoing Request</i>	56
<i>Incoming Request</i>	77
Total	178

Keterangan:

- *Spontaneous Outgoing*: PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara proaktif.
- *Spontaneous Incoming*: PPATK menerima informasi proaktif dari FIU lain.
- *Outgoing Request*: PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta.
- *Incoming Request*: PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta.

KONTRIBUSI PPATK TERHADAP PENERIMAAN NEGARA

BERDASARKAN PENANGANAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN PERKARA TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pada tahun 2023, PPATK turut membantu penerimaan negara melalui tiga hasil pemeriksaan atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan atas tiga hasil pemeriksaan tersebut telah berkontribusi pada penerimaan negara melalui denda sebesar Rp16,25 miliar, serta uang pengganti sebesar Rp2,5 miliar dan USD 54 juta. Selain itu, sejumlah aset berupa tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor juga disita.

Selama periode tahun 2023, terdapat kenaikan realisasi penerimaan negara sebesar **Rp2.959.480.532.021,00** atas produk intelijen keuangan PPATK yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

PENANGANAN 3 HASIL PEMERIKSAAN TAHUN 2023

Rp16,25 Miliar

DENDA atas Tiga Hasil Pemeriksaan atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap

Rp2,5 Miliar + USD54 Juta

UANG PENGGANTI atas Tiga Hasil Pemeriksaan atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, ditambah **aset berupa tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor**

PRODUK INTELIJEN TERKAIT PAJAK

REALISASI penerimaan negara dari produk intelijen keuangan PPATK yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak

SELAMA TAHUN 2023
KENAIKAN Rp2,96 Triliun

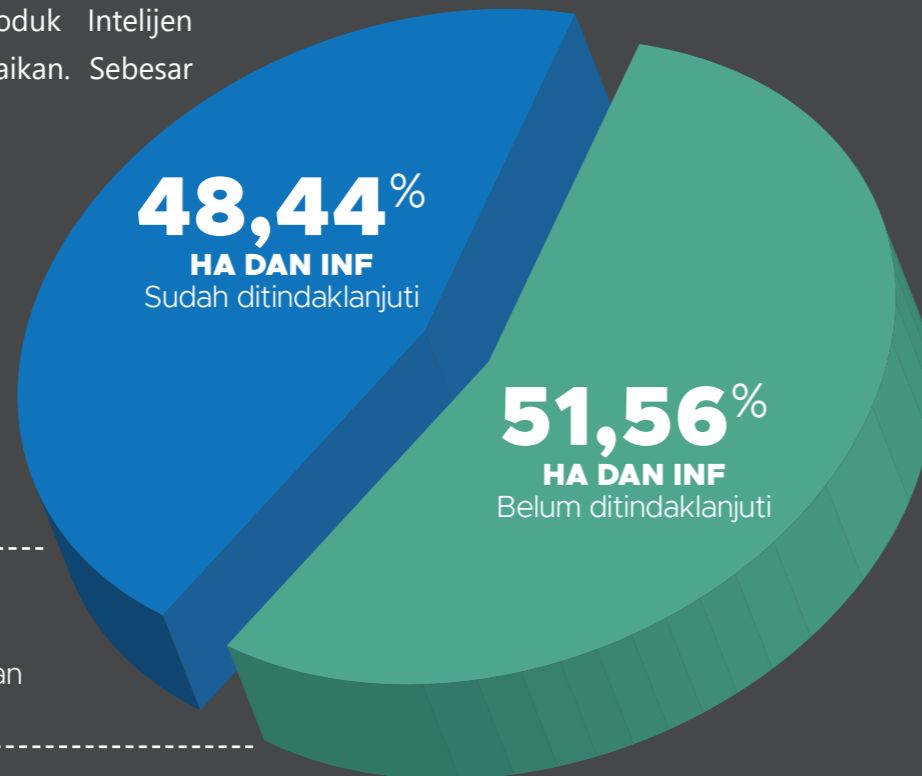


PEMANFAATAN PRODUK INTELIJEN KEUANGAN PPATK

PPATK secara rutin melakukan pemantauan pemanfaatan atas produk intelijen keuangan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Selama periode Januari 2020 s.d Desember 2023, PPATK telah menerima 2.623 *feedback* tindak lanjut atas 4.763 Produk Intelijen Keuangan yang telah disampaikan. Sebesar

48,44% produk intelijen keuangan PPATK telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait dengan kasus yang diproses minimal sampai dengan penyelidikan atau yang dipersamakan dan bernilai tambah bagi penyidik dalam pengembangan kasus.



PERIODE
JANUARI 2020
S.D **DESEMBER 2023**

4.763
PRODUK INTELIJEN Keuangan
yang telah disampaikan



PENGUNGKAPAN PERKARA TPPU

Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait dengan hasil analisis, informasi, dan hasil pemeriksaan:

KORUPSI DAN FISKAL

Korupsi

Selama periode tahun 2023, PPATK telah menyampaikan 286 produk intelijen keuangan kepada KPK, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan instansi terkait. Beberapa modus operasi atau tipologi pencucian uang yang ditemukan dalam kasus korupsi tersebut diantaranya sebagai berikut:

286

produk intelijen keuangan terkait **Kasus Korupsi Tahun 2023**

Dikirim kepada :

- KPK
- Kejaksaan RI
- POLRI
- Instansi Terkait

- a) Penerimaan dana menggunakan rekening milik ajudan pribadi, staf, dan lainnya sebagai pihak penerima dana untuk kepentingan *Politically Exposed Person*.
- b) Penggunaan rekening atas nama keluarga *Politically Exposed Person* untuk menampung dana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- c) Penggunaan rekening perusahaan baik aktif maupun fiktif sebagai *underlying* penerimaan dana terkait suap/gratifikasi untuk menampung dana untuk kepentingan *Politically Exposed Person*.
- d) Penggunaan rekening pribadi untuk menampung dana dari tindak pidana asal (*nominee*, keluarga, dan karyawan/staff).
- e) Pembelian aset berbentuk rumah/properti, kendaraan bermotor, batu mulia dan perhiasan, investasi, barang mewah lainnya.
- f) Penggunaan fasilitas *Safe Deposit Box* yang diduga untuk menyembunyikan dana hasil kejahatan.

- g) Penggunaan valuta asing dalam upaya suap/gratifikasi.
- h) Tarik dan setor tunai dalam jumlah besar (miliaran rupiah).
- i) Dana hasil korupsi diduga digunakan sebagai dana kampanye pemilihan umum.

Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian

Terdapat dugaan tindak pidana korupsi di Lingkungan Kementerian pada periode tahun 2022, yaitu adanya pungutan kepada ditjen dan badan di lingkungan kementerian pada tahun 2020 s.d. 2022. Tujuan dari permintaan/pengumpulan uang tersebut adalah

untuk membayar kebutuhan pribadi Tuan A beserta keluarganya. Diketahui bahwa Tuan A dan pihak keluarga selama menjabat sebagai Menteri, secara langsung dan tidak langsung diduga menerima dana dan/atau fasilitas sekurang-kurangnya sebesar Rp4.943.616.107,00 untuk kepentingan pribadi melalui Pegawai Kementerian yang bersumber dari para Pejabat Kementerian dan/atau Pihak Ketiga.

Sebagian sumber dana yang diperoleh Pegawai/Pejabat



kementerian tersebut diduga berasal dari penerimaan suap/gratifikasi yang diterima melalui transaksi setoran tunai maupun dana dari entitas perusahaan yang berpotensi konflik kepentingan dengan jabatan/wewenang yang dimiliki pejabat tersebut. Beberapa pihak ketiga yang teridentifikasi mengirimkan dana ke rekening pegawai/pejabat kementerian tersebut antara lain HP (Pemilik CV HKL), PI, PS, AB (CV MSA), AE pemilik-PT RRB-sayur mayur), dan MN.

Perbuatan tuan A dan pihak terkait tersebut diduga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11, Pasal 12 huruf i, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Tuan A dan Pihak Terkait juga patut diduga telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BIDANG PERPAJAKAN

a. Tindak Pidana Perpajakan atas Perusahaan Minyak Goreng

Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta tengah melakukan penyidikan atas sebuah perusahaan minyak goreng yang diduga telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap (indikasi pasal 39 atau 1 huruf d) dan diduga menggunakan rekening pribadi untuk menampung dana hasil usaha. Penyidik DJP menyampaikan permintaan analisis informasi keuangan perusahaan dan pemilik perusahaan melalui surat permintaan data untuk mengetahui aliran dana serta penelusuran harta kekayaan yang dapat digunakan untuk pemulihan kerugian negara.

Setelah dilakukan analisis transaksi keuangan, diketahui bahwa dana usaha tidak hanya ditampung dalam rekening perusahaan melainkan lebih banyak ditampung dalam rekening individu yang merupakan pemilik perusahaan dan beberapa pegawai yang rekeningnya digunakan. Rekening individu diketahui banyak bertransaksi dengan pihak lain yang profilnya terkait dengan industri minyak goreng. Analisis atas 49 rekening dengan total

dana masuk mencapai Rp561.386.338.775,00 dalam periode tahun 2017 s.d. 2022.

Beberapa modus yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menyembunyikan penerimaan dana hasil usaha adalah sebagai berikut:

- Penggunaan rekening individu (pemilik dan pegawai) untuk melakukan menampung dana hasil usaha.
- Transaksi dominan dilakukan secara tunai.
- Transaksi pada rekening individu berpola *pass-by* dan penggunaan transaksi tunai yang mengindikasikan bahwa rekening hanya digunakan sebagai rekening penampungan sementara.



b. Tindak Pidana Perpajakan atas Perusahaan Sarang Burung Wallet

Terdapat permintaan informasi ke PPATK dari Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 25 Mei 2022 perihal permintaan informasi. Diketahui bahwa terdapat dugaan tindak pidana di bidang perpajakan oleh wajib pajak atas nama PT ABC yang saat ini dalam tahap Pemeriksaan. Berdasarkan hasil analisis diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa modus yang digunakan oleh PT ABC adalah menggunakan rekening pemilik/pengurus/karyawan dalam menerima dana hasil usaha guna menghindari pelaporan perpajakan.
- Terdapat penggunaan WNA dalam menerima atau menyalurkan uang hasil usaha yang diduga merupakan hasil usaha PT ABC guna menghindari pelaporan perpajakan.
- Banyak transaksi yang dilakukan secara tunai yang diduga dilakukan untuk memutus jejak transaksi.
- Total perputaran dana yang diterima oleh PT ABC pada periode 2021 dan 2022 adalah sebesar Rp206.948.142.626,00 dan Rp105.356.039.389,00.

- Sedangkan total perputaran dana yang dilakukan oleh pemilik/pengurus/karyawan dan juga WNA yang diduga adalah makelar penerima dana dari usaha PT ABC pada periode 2021 dan 2022 adalah sebesar Rp2.672.869.488.427,09 dan Rp3.676.939.630.411,00.
- WNA yang terlibat diduga merupakan makelar dari banyak perusahaan yang digunakan dalam rangka menghindari pelaporan pajak. Sehingga Wajib Pajak melaporkan nilai penghasilan usaha tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Terdapat permintaan informasi ke PPATK dari Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 6 Desember 2022 perihal permintaan informasi wajib pajak. Dalam menjalankan usahanya, wajib pajak dan perusahaannya diduga melakukan pelanggaran mengenai kewajiban cukai dan pajak, modus yang digunakan antara lain:

- Terdapat dugaan penggunaan pita cukai dari pabrik rokok yang sudah tidak berproduksi.

- Manifes pengiriman barang ke berbagai daerah di Indonesia yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Pemakaian jenis pita cukai SKT (Sigaret Kretek Tangan) yang murah dari yang seharusnya memakai pita cukai SKM (Sigaret Kretek Mesin) yang mahal.
- Penggunaan rekening pribadi, karyawan dan pihak lain untuk menampung usaha.
- Teridentifikasi membeli 8 aset kendaraan mobil mewah atas nama sendiri senilai Rp6.474.800.000,00 Selain itu teridentifikasi membeli 5 aset kendaraan mobil mewah atas nama orang lain senilai Rp13.150.000.000,00 Diduga kuat wajib pajak berusaha menyembunyikan asetnya agar dapat mengurangi potensi pajak terhutangya serta terindikasi adanya tindak pidana lain selain pajak.
- Adapun perputaran dananya sebesar Rp2.594.229.588.806,00.
- Agar pembayaran cukai rokok dan pajak bisa lebih kecil dari yang seharusnya, wajib pajak diduga menyuap pegawai Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai). Selain itu untuk

mengamankan usaha, terutama distribusi pengiriman rokok ilegal, wajib pajak diduga juga menyuap Polisi dan TNI serta pegawai Pemda.

INDIKASI PENCUCIAN UANG DARI IMPORTASI BARANG BEKAS (THRIFTING)

PPATK telah menyampaikan Hasil analisis dan Hasil Pemeriksaan ke Dirjen Bea dan Cukai dan Dirjen Pajak atas indikasi tindak pidana pencucian uang terkait importasi barang bekas. Terdapat aliran dana keluar dari 21 importir dengan total Rp983.397.633.131,00 yang ditujukan kepada pihak yang diduga sebagai *supplier* pakaian bekas yang berada di Luar Negeri.

Para importir diduga telah melanggar Pasal 47 Ayat (1) UU nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan terkait larangan mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00.

GREEN FINANCIAL CRIME (GFC)

Penanganan *Green Financial Crime* (GFC) menjadi salah satu program utama yang dilaksanakan selama periode tahun 2023. PPATK menunjukkan komitmennya dalam penanganan GFC melalui penyampaian 63 Hasil Analisis, Informasi, dan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada Kejaksaan, Kepolisian, KPK, DJP, PPNS, dan lembaga negara terkait.

Selain itu, selama periode tahun 2023 PPATK juga aktif terlibat dalam berbagai satuan tugas dengan instansi lain. Diantaranya adalah Satgas Tata Kelola Kelapa Sawit dalam rangka optimalisasi tata kelola sawit dan Satgas Lingkungan Hidup dalam rangka optimalisasi penanganan perkara di bidang lingkungan hidup.

Berikut merupakan beberapa ringkasan kasus terkait dengan GFC berdasarkan hasil analisis dan pemeriksaan yang dilakukan selama periode tahun 2023:

KASUS TAMBANG

- a. Terdapat indikasi tindak pidana korupsi terkait penguasaan dan penjualan secara melawan hukum atas bijih nikel hasil penambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung dan WIUP Operasi Produksi PT Antam Tbk, yang dilakukan oleh PT LAM. PT LAM selaku penggarap wilayah tambang PT Antam Tbk di Blok Mandiodo Konawe Utara, hanya menyerahkan sebagian kecil dari hasilnya kepada PT Antam Tbk, sedangkan selebihnya dijual oleh PT LAM kepada *smelter* lain dengan menggunakan dokumen tambang milik PT KKP (modus dokumen terbang). Hal ini menyebabkan adanya kerugian negara karena tidak diserahkannya seluruh hasil tambang kepada PT Antam Tbk. Atas penjualan ke *smelter* tersebut PT LAM diduga menerima dana dengan total nilai Rp199.800.000.000,00 dalam periode 2022 s.d. 2023 melalui rekening tiga orang

nominee yang merupakan pegawai/staf dari PT LAM/perusahaan afiliasinya.

- b. Pada beberapa rekening para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut di atas, yaitu rekening HER, PT PMS, PT TPI, GAS,

PT BSM dan PT LAM diketahui adanya aliran dana keluar yang ditujukan ke aparat penegak hukum dengan total nilai Rp16.600.000.000,00 di wilayah dari tambang perusahaan dalam Hasil Pemeriksaan ini.



KASUS PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR

- a. Berdasarkan analisis transaksi, terdapat pelaku yang diduga kuat memiliki peran sebagai *transporter*/kurir/pemilik kapal cepat yang digunakan untuk mengangkut secara ilegal berbagai macam komoditas. Komoditas yang diangkut dan/atau diperjualbelikan antara lain: berbagai jenis satwa dilindungi, satwa tidak dilindungi, kendaraan bermotor, tanaman, obat-obatan, termasuk adanya indikasi bahwa pelaku juga mengangkut narkoba.
- b. Pelaku kejahatan juga melakukan beberapa kejahatan secara trans-nasional (*transnational crime*) antara lain:

- Perniagaan dan/atau pengangkutan satwa dilindungi;
 - Penyelundupan di bidang ekspor/impor;
 - Pelanggaran pidana di bidang karantina tanaman/hewan;
 - Menerima dan/atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba.
- c. Total perputaran uang di seluruh rekening pelaku pada periode 2021 s.d. Agustus 2023 sebesar Rp264.272.395.089,60,00 dengan indikasi penerimaan dari TP Asal di bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp52.026.841.075,00 dan TP Pencucian Uang sebesar Rp43.939.808.838,00. Hasil dari tindak pidana tersebut disembunyikan dan/atau disamarkan melalui rekening anak pelaku dan anggota keluarga lainnya untuk kemudian ditransfer kembali ke rekening pelaku dan diubah bentuk menjadi kendaraan bermotor serta modal usaha kebun sawit, jual beli kendaraan bermotor, serta usaha kafe.

PERDAGANGAN ORANG DAN/ATAU CHILD SEX ABUSE

Pada tahun 2023, PPATK telah menyampaikan 8 hasil analisis dan informasi terkait tindak pidana perdagangan orang dan/atau *child sex abuse*, diantaranya 6 hasil analisis disampaikan kepada Kepolisian, 1 hasil analisis disampaikan kepada BP2MI, dan 1 informasi disampaikan kepada FIU Kamboja. Total perputaran dana atas seluruh hasil analisis dan informasi tersebut adalah sebesar Rp991.610.909.841,00.

Berikut merupakan beberapa modus yang ditemukan:

- Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh entitas/perorangan tidak berizin.
- Aliran dana masuk ke P3MI atau pemilik/pengurus/pegawainya dari negara

penerima PMI seperti kawasan timur tengah pada periode moratorium pengiriman PMI ke kawasan timur tengah.

- Penggunaan *remark* transaksi, antara lain nama negara tujuan, dokumen keimigrasian dan dokumen lainnya terkait dengan persiapan dan pemberangkatan PMI ilegal.
- Terdapat modus *co-mingling*, yaitu mencampur antara hasil usaha resmi dengan hasil usaha tindak pidana pada rekening beberapa pihak yang diketahui sebagai pemilik/pegawai P3MI.
- Aliran dana ke oknum ASN atau APH.
- Penggunaan remark transaksi berupa kata-kata yang tergolong asusila pada eksploitasi seksual anak dan pornografi anak.

- Penggunaan dompet elektronik untuk pembayaran konten pornografi anak.
- Penggunaan rekening pihak ketiga dalam menampung dana dari para sindikat penjualan organ ginjal untuk pembayaran ginjal kepada penjual ginjal serta operasional kegiatan ilegal tersebut.

NARKOTIKA

Pada tahun 2023, PPATK telah menyampaikan produk intelijen keuangan berupa 38 Laporan Proaktif dan 80 Laporan Reaktif menindaklanjuti permintaan dari instansi terkait. Produk intelijen keuangan tersebut disampaikan kepada Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, FIU, dan Lembaga Negara terkait.

Dalam pengungkapan kasus TPPU dari TPA Narkotika terkini yang diungkap oleh POLRI dan BNN RI selaku penyidik tindak pidana asal dengan dukungan penuh dari PPATK, terdapat beberapa modus-modus baru yang ditemukan antara lain:

- Penukaran dana hasil peredaran gelap narkotika (Rupiah) ke valuta asing (SGD, USD, THB, MYR, dll) untuk kemudian dibawa ke luar negeri.
- Pembelian aset mata uang kripto dalam jumlah besar dan langsung dikirimkan kepada wallet yang berlokasi di luar negeri, sebagai sarana untuk pengiriman dana hasil peredaran narkotika ke berbagai negara.
- Pemanfaatan kegiatan usaha/bisnis hotel dan restoran sebagai sarana mencampurkan

- dana hasil tindak pidana narkotika dengan dana hasil usaha/bisnis legal (*co-mingling*).
- Penggunaan rekening nominee atau pihak ketiga untuk menampung dan mentransfer dana hasil tindak pidana narkotika (*use of nominee*).
- Pemanfaatan *Safe Deposit Box* (SDB) untuk menempatkan dana hasil tindak pidana narkotika (rupiah/valuta asing).
- Pembelian polis asuransi untuk keluarga, orang terdekat, dan/atau orang-orang kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan narkotika.

Selain itu, PPATK juga telah membangun kerjasama dalam bentuk *joint investigation* dan *case building* dengan penyidik selama periode tahun 2023 melalui penanganan dua kasus berikut:

- PPATK turut berkontribusi dalam proses penanganan kasus jaringan FP yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim POLRI. PPATK telah menyampaikan 32 Laporan Intelijen

Keuangan kepada Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim POLRI dan melakukan penghentian sementara transaksi terhadap 606 rekening di 17 Bank, 2 Perusahaan Efek, serta 1 Pedagang Aset Kripto. Total saldo saat penghentian sementara PPATK terjadi adalah Rp44.947.129.334,-.

- Selain itu, PPATK turut berkontribusi dalam proses penanganan kasus HK yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional RI. PPATK telah menyampaikan 5 Laporan Intelijen Keuangan kepada Badan Narkotika Nasional RI dan melakukan penghentian sementara transaksi terhadap 66 rekening di 6 Bank serta 2 Perusahaan Asuransi. Total saldo saat penghentian sementara PPATK terjadi adalah Rp8.487.635.395,61,-.



PERJUDIAN ONLINE

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan tugas dan kewenangan PPAK terkait dengan transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana perjudian, khususnya yang dilakukan secara *online* (selanjutnya disingkat: judi *online*), total akumulasi perputaran dana yang terkait dengan judi *online* pada tahun 2023 mencapai Rp327.000.000.000,00 dalam 168 juta transaksi.

Dari total perputaran dana pada tahun 2023 tersebut, ditemukan sebanyak **3.295.310 orang** (masyarakat) yang bermain judi *online*, dan melakukan deposit pada situs judi *online* sebesar Rp34.512.310.353.834,00. Temuan transaksi judi *online* pada tahun 2023 ini mencakup 63% dari total akumulasi perputaran dana sebesar Rp517.000.000.000,00 sejak tahun 2017.

Masih ditemukan modus penggunaan rekening orang lain yang diperoleh dari praktik peminjaman rekening dan jual-beli rekening oleh masyarakat kepada pelaku judi *online* untuk dipakai sebagai rekening penampungan dana judi *online*. Dana hasil judi *online* sebagian

dilarikan ke luar negeri oleh para pelaku dengan menggunakan perusahaan-perusahaan cangkang. Nominal dana yang dilarikan ke luar negeri sebanyak **Rp5.156.000.000,00**.

Hal ini telah menyebabkan kerugian secara ekonomis bagi perekonomian negara. Total rekening yang telah dilakukan penghentian sementara sebanyak 3.935 rekening dengan total saldo Rp167.680.725.927,00.

3.295.310

ORANG (MASYARAKAT) YANG BERMAIN JUDI ONLINE

168 JUTA

TRANSAKSI.

Rp327 TRILIUN

Total Akumulasi Perputaran Dana Yang Terkait Dengan Judi Online Pada Tahun 2023

PENGHENTIAN SEMENTARA TERKAIT JUDI ONLINE 2023

3.935

REKING DENGAN TOTAL SALDO
Rp167.680.725.927,00



PENIPUAN DAN PENGGELAPAN

KASUS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN MELALUI KOPERASI

Pada tahun 2023, PPATK melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana pencucian uang harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana penipuan dan atau penggelapan (pemalsuan dokumen) yang dilakukan oleh KSP IC dan HS selaku pemilik dan Direktur Utama KSP IC serta pihak terkait. Disamping itu, untuk tujuan *asset tracing*, hasil pemeriksaan ini juga memetakan aset-aset yang diduga diperoleh dari dana hasil kejahatan yang dilakukan oleh KSP IC dan HS serta pihak terkait.

KSP IC diketahui terafiliasi sekurang-kurangnya dengan 39 (tiga puluh sembilan) badan hukum lain baik dalam bentuk PT maupun koperasi. Berdasarkan pemeriksaan pada rekening KSP IC di 7 (tujuh) bank selama periode 2013 sd. 2022 diketahui total dana masuk yang diduga bersumber dari anggota dan nonanggota KSP IC diperkirakan mencapai **Rp45.845.368.199.620,00 dan 91.000,00USD.**

Atas dana yang dihimpun dari anggota dan nonanggota tersebut, selanjutnya oleh KSP IC ditransfer ke rekening beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan KSP IC dan HS Patut diduga HS selaku pemilik KSP IC melakukan *layering* atas dana nasabah ke rekening banyak perusahaan terafiliasi.

Disamping itu, produk investasi berupa MTN yang dikeluarkan oleh perusahaan terafiliasi HS, tidak memiliki *underlying* bisnis atau usaha yang bersifat ekonomis, dikarenakan beberapa perusahaan terafiliasi tersebut tidak memiliki aktivitas usaha yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomis bagi perusahaan sehingga perusahaan tidak dapat memberikan *return* sesuai yang dijanjikan atau mengembalikan pokok dana yang diinvestasikan oleh nasabah KSP IC.

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut pada rekening KSP IC, HS, dan beberapa perusahaan terafiliasi HS periode 2013 s.d. 2023, diperkirakan terdapat dana nasabah KSP IC sekurang-kurangnya senilai Rp6.674.102.474.427,00

39

BADAN HUKUM LAIN (PT MAUPUN KOPERASI) **TERAFILIASI KSP IC**

Rp**45.845.368.199.620,00**
dan **USD91.000,00**

Berdasarkan pemeriksaan pada **Rekening KSP IC di 7 bank selama periode 2013 sd. 2022** diketahui total dana masuk yang diduga bersumber dari anggota dan nonanggota KSP IC





yang penggunaannya patut diduga tidak terkait dengan ruang lingkup usaha KSP IC, termasuk untuk pembelian properti.

Selain penggunaan dana di atas, berdasarkan *database* PPATK yaitu *International Funds Transfer Instruction* (IFTI) teridentifikasi

terdapat aliran dana keluar negeri dari rekening HS (Pendiri XYZ Group) dan pihak terafiliasi dengan akumulasi nominal mencapai Rp1.910.274.187.701,00 dalam 419 kali transaksi. Sebagian besar negara-negara penerima adalah Amerika Serikat, Inggris, Italia, Singapura, Luxembourg, Swiss dan Austria. Patut diduga dana tersebut digunakan untuk pembelian aset berupa *yacht*, *limousine*, *property* dan investasi seperti *trust fund* dan *peer to peer landing*.

PENGGELAPAN DANA YAYASAN

PPATK telah menyampaikan hasil analisis dan hasil pemeriksaan ke Kepolisian RI atas indikasi tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana penggelapan, tindak pidana dalam undang-undang yayasan dan undang-undang pengelolaan zakat, dan tindak pidana korupsi, dengan rincian sebagai berikut:

a. Indikasi tindak pidana penggelapan dalam Yayasan yang dilakukan dengan menggunakan rekening entitas dan yayasan pendidikan yang berada dibawah kendali pelaku total lebih dari Rp 1.000.000.000.000,00 yang didapat dari

masyarakat yang kemudian antara lain digunakan untuk pembukaan deposito atas nama yang bersangkutan, pembayaran tanah, pembayaran cicilan.

- b. Indikasi tindak pidana dalam korupsi yaitu adanya dana BOS senilai Rp28.000.000.000,- yang kemudian ditarik, disetor, dan ditransfer ke rekening yayasan dan rekening pelaku.
- c. Indikasi TPPU, yaitu pelaku melakukan upaya mentrasfer dan membayarkan uang yang berasal dari dana masyarakat untuk kepentingan pembayaran cicilan *back to back* dan penempatan deposito a.n. pelaku, dan pembayaran tanah. Mengalihkan dana BOS ke rekening pribadi milik pelaku yang selanjutnya ditarik tunai.
- d. Terdapat indikasi transaksi bahwa pelaku akan menggunakan partai X untuk menggerakkan politik Indonesia, namun partai X dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

PENCANTUMAN ORGANISASI NIRLABA ASING (TOBPI) DAN WNA (AK) KE DALAM DTTOT

Sampai dengan akhir Januari 2023, PPATK memantau adanya aliran dana dari organisasi nirlaba asing berbasis di Australia, yaitu TOBPI, ke sebuah organisasi nirlaba di dalam negeri. TOBPI (AK, individu sebagai pendiri dan pengurus TOBPI) terkait dengan putusan

kasus pendanaan terorisme melibatkan individu STRU dan MF, serta organisasi teroris MIT pada pertengahan tahun 2022.

Atas dasar hal tersebut, PPATK mengusulkan TOBPI dan AK untuk dimasukkan ke dalam DTTOT. Satgas DTTOT menindaklanjuti usulan tersebut melalui rapat koordinasi dan rekomendasi pencantuman. Melalui Putusan PN Jakarta Pusat No. 05/Pen.Pid/2023/PN.Jkt.Pst

tanggal 5 April 2023, TOBPI dan AK ditetapkan ke dalam DTTOT.

ANALISIS WN INDONESIA SEBAGAI FOREIGN TERRORIS FIGHTER (FTF) TERAFILIASI AQAP (AL-QAEDA IN ARABIAN PENINSULA)

Berdasarkan informasi intelijen yang diperoleh PPATK, terinformasi adanya

dugaan pendanaan bagi 4 WNI yang diduga meninggalkan Indonesia menuju Yaman untuk bergabung dengan kelompok teroris terafiliasi Al-Qaeda yaitu AQAP (*Al-Qaeda in Arabian Peninsula*).

Informasi tersebut ditindaklanjuti melalui analisis transaksi keuangan terhadap 4 pihak tersebut beserta para pihak terkait. Dukungan pendanaan kepada para pihak tersebut

TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

utama bersumber dari penghasilan pribadi dan donasi dari pihak lainnya dengan narasi “zakat”.

Hasil analisis telah disampaikan kepada Densus 88 AT Polri sebagai penyidik TP

Pendanaan Terorisme dan Satgas DTTOT untuk ditindaklanjuti dengan pencantuman identitas 4 WNI tersebut ke dalam DTTOT.



PENCANTUMAN NII KE DALAM DTTOT

Pada semester ke-2 tahun 2023, PPATK sebagai bagian dari Satgas DTTOT, menyepakati rekomendasi pencantuman Negara Islam Indonesia (NII) ke dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT). NII dinilai membawa ideologi yang bertentangan dengan ideologi dasar NKRI dan paham-paham separatisme, dengan melakukan berbagai aktivitas terorisme secara “*soft approach*”.

ANALISIS PENDANAAN TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) PAPUA

Berdasarkan informasi intelijen yang dimiliki oleh PPATK, diketahui adanya sebuah yayasan keagamaan yang diduga memberikan dukungan finansial terhadap organisasi dan aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Yayasan tersebut memiliki sumber dana utama berupa sumbangan/donasi dari yayasan keagamaan internasional yang berbasis di Eropa seperti Jerman, Swiss, dan Belanda.

ANALISIS TERKAIT DUKUNGAN

PENDANAAN ISIS MELALUI ASET KRIPTO

Sepanjang tahun 2023, PPATK bersama Densus 88 AT Polri terus berkolaborasi dalam mengungkap kasus dugaan pendanaan terorisme bagi ISIS yang bersumber dari donasi/sumbangan masyarakat di dalam negeri menggunakan aset kripto sebagai media pemindahan dana.

Sebuah yayasan kemanusiaan dalam negeri mengumpulkan donasi/sumbangan dari masyarakat dengan narasi bantuan kemanusiaan. Dana tersebut, sebagai besar, dipindahkan ke rekening atas nama dua individu untuk kemudian didepositkan ke akun YBS pada pedagang aset kripto.

Penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa dana yang didepositkan digunakan untuk membeli aset kripto dan ditransfer ke akun WNA pada pedagang aset kripto berbasis di luar negeri. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, WNA sebagai penerima aset kripto tersebut teridentifikasi dan telah divonis atas dukungan pendanaan bagi ISIS.

TINDAK PIDANA DI BIDANG KESEHATAN

Analisis transaksi keuangan ini dilakukan atas permintaan informasi transaksi keuangan yang diminta oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal di bidang kesehatan.

Selama periode Maret 2018 hingga September 2023, total dana yang diterima oleh pelaku terkait dengan transaksi jual beli kosmetik ilegal senilai total Rp110 miliar. Pola transaksi terkait dengan tindak pidana di bidang kesehatan tersebut di antaranya:

- Pelaku diduga melakukan penjualan kosmetika ilegal melalui jasa *e-commerce* dan sistem distributor ke pengusaha kosmetika lainnya.
- Pelaku menggunakan rekening pribadi untuk menampung dana hasil penjualan kosmetika ilegal.
- Pelaku menggunakan rekening *nominee* (pegawai dan keluarga) untuk menampung dana yang berasal dari operasional usaha

yang terkait dengan jual beli kosmetika ilegal dan pembelian aset.

- Pelaku melakukan pembelian aset yang dananya berasal dari tindak pidana (*integration*). Aset tersebut berbentuk kendaraan bermotor, tanah dan bangunan (termasuk biaya renovasi rumah dan furnitur), batu mulia dan perhiasan, aset digital, barang mewah lainnya.
- Pelaku menggunakan fasilitas *safe deposit box* dan memberikan kuasa kepada pegawai untuk mengakses SDB tersebut yang diduga untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana.
- Pelaku membeli *voucher cryptocurrency* ke pihak perorangan dengan nominal miliaran rupiah dalam rangka memutus jejak transaksi aliran dana yang berasal dari penjualan kosmetika ilegal.

Pelaku melakukan *layering* transaksi ke perusahaan *payment gateway* (Doku, DUITKU, dll.) dalam rangka memutus jejak transaksi.

Total dana yang diterima oleh pelaku terkait dengan transaksi jual beli kosmetik ilegal

PERIODE MARET 2018
HINGGA SEPTEMBER 2023

Rp110MILIAR



PENGHENTIAN SEMENTARA

TRANSAKSI TERKAIT TINDAK PIDANA

Adapun terkait kegiatan penghentian sementara transaksi yang telah dilakukan PPATK pada Januari s.d Desember 2023 terhadap 6.895 rekening dengan total dana yang dihentikan sejumlah Rp2,74 triliun, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Penghentian Sementara Transaksi Yang Telah Dilakukan PPATK pada **Januari S.d Desember 2023**

6.895 REKENING

Rp2,74 triliun



Tindak Pidana	Jumlah Rekening	Nilai Saldo yang Dihentikan	Mata Uang
Narkotika	830	58.525.745.585,27	IDR
Perjudian	4.553	442.884.715.097,19	IDR
Terorisme	7	487.415.075,71	IDR
Penyuapan	24	1.305.230.081,52	IDR
Perpajakan	43	62.789.283,80	IDR
Perdagangan Orang	38	10.971.711.386,66	IDR
		702,42	USD
Penipuan/ Peggelapan	162	989.975.034.555,59	IDR
		2.394.130,86	USD
		1.101,43	EUR
		853,69	USDT
		10,58	SGD
Korupsi	1.238	1.240.807.003.722,24	IDR
		510.831,47	USD
		2.586,79	USDT
		47.043,53	AUD
		2.942.400,00	JPY



PENGASUH

Siap Asuh Pihak Pelapor dan Stakeholder



STATISTIK LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN

Selama periode Januari s.d Desember 2023 terdapat peningkatan penerimaan laporan ke PPATK dibandingkan periode Januari s.d Desember 2022 sebesar 22,8% sebagai berikut:

TAHUN 2023



TAHUN 2022



Gambar 1 Foto bersama dalam acara Diseminasi FIR bersama Pihak Pelapor

PENILAIAN KOMITMEN PIHAK PELAPOR

Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on ML/TF)

MERUPAKAN penilaian terhadap integritas dan efektifitas Pihak Pelapor dalam pelaksanaan Program APU PPT, khususnya aspek kinerja pelaporan APU PPT. Pelaksanaan *FIR on ML/TF* tahun 2023 ini merupakan lanjutan dari pelaksanaan *FIR on ML/TF* tahun 2020, 2021, dan 2022 serta rangkaian dari pelaksanaan Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024. Pelaksanaan *FIR on ML/TF* tahun 2022 diikuti oleh 401 Pihak Pelapor atau 100,25%

dari target sebanyak 400 Pihak Pelapor. Pihak Pelapor yang menjadi responden meliputi Penyedia Jasa Keuangan Bank (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)), Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank (Pedagang Valuta Asing (PVA), Penyelenggara Transfer Dana (PTD), dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)) serta Penyedia Barang dan Jasa (Perusahaan Properti, Pedagang Kendaraan Bermotor dan Pedagang Perhiasan/ Logam Mulia).



Gambar 2 Penyerahan Plakat dalam acara Diseminasi FIR



Tahun 2023 Nilai *FIR on ML/TF* Agregat Nasional mencapai **6,05 (kategori baik)** menunjukkan hasil yang baik dalam pelaksanaan rezim APU PPT nasional

Adapun nilai *FIR on ML/TF* per kategori pihak pelapor yaitu:

Penyedia Jasa Keuangan
7,57 (Baik)
 Bank Umum **8,37 (Sangat Baik)**
 BPR **5,70 (Cukup Baik)**

Penyedia Jasa Keuangan Non Bank
4,51 (Cukup Baik)
 PVA **5,11 (Cukup Baik)**
 PTD **5,72 (Cukup Baik)**
 KSP **2,70 (Kurang Baik)**

Penyedia Barang dan Jasa
4,61 (Cukup Baik)
 Perusahaan Properti **3.66 (Kurang Baik)**
 Pedagang Kendaraan Bermotor **4.39 (Cukup Baik)**
 Pedagang Perhiasan/Logam Mulia **5.77 (Cukup Baik)**



SATU DATA

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)

DALAM implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), PPATK telah menyusun dan melaksanakan rencana aksi Satu Data PPATK Tahun 2022-2024. Serangkaian kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pertemuan koordinasi, pendampingan yang melibatkan seluruh unit kerja produsen data PPATK

seperti Reviu. Daftar Data dan Data Prioritas PPATK Tahun 2023-2024 (13 November 2023), *Workshop* Implementasi Prinsip SDI (16, 22, 28 November 2023), dan Forum Satu Data PPATK (5 Desember 2023).



Gambar 4 Forum Satu Data PPATK, 5 Desember 2023

Implementasi SDI di lingkungan PPATK tidak hanya pada cakupan internal, diperluas ke dalam lingkup kolaborasi data antar lembaga *stakeholders* PPATK dalam rezim APUPPT (Satu Data APUPPT PPSPM) melalui pengelolaan data statistik penanganan kejahatan ekonomi (SISPEKA). Melalui integrasi data *machine-to-machine* antara SISPEKA dengan aplikasi administrasi penanganan perkara yang dimiliki Aparat Penegakan

Hukum (APH). Harapan ke depannya, data proses penanganan perkara APH sebagai tindak lanjut dari hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK tersedia secara *up-to-date*. Pada tahun 2023, PPATK menginisiasi pertemuan koordinasi pembahasan elemen data, penyusunan *MoU*, PKS, dan pedoman teknis dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.



Gambar 3 Penandatanganan Buku Pedoman Teknis Pertukaran Data Aplikasi SISPEKA PPATK – EMP Polri, 5 September 2023

PENINGKATAN KUALITAS DATA PELAPORAN

Kualitas data laporan yang disampaikan Pihak Pelapor berpengaruh pada hasil analisis maupun pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK



Pertemuan Bilateral Pihak Pelapor

Hasil pemantauan disampaikan sebagai bahan evaluasi dalam menyampaikan pelaporan berikutnya

14 Pertemuan



Focus Group Discussion (FGD)

Menyampaikan hasil pemantauan terhadap kualitas data dan materi terkait dengan risiko industri dijadikan sebagai sarana oleh pelaku kejahatan

6 FGD



Rekomendasi Pembinaan Pihak Pelapor

hasil pemantauan kualitas data laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor tahun 2023, PPATK secara rutin menyampaikan rekomendasi pembinaan terhadap Pihak Pelapor kepada unit terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dalam bentuk audit, asistensi, bimbingan teknis, pelatihan maupun kegiatan pembinaan lainnya.

TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS DATA

DIHARAPKAN dapat menjadi *feedback* kepada Pihak Pelapor untuk memperbaiki sumber data, sistem internal Pihak Pelapor, dan mekanisme monitoring terhadap kualitas data transaksi yang akan dilaporkan kepada PPATK. PPATK terus melakukan pemantauan dalam rangka tindak lanjut upaya peningkatan kualitas laporan yang sudah dilakukan.

Upaya ini perlu mendapatkan dukungan tidak hanya dari internal PPATK tetapi juga dari Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas Pengatur (LPP), Asosiasi dan pihak terkait lainnya dalam bentuk kolaborasi yang baik untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) di Indonesia.



Gambar 5 Rapat Koordinasi Bilateral Evaluasi Kualitas Laporan

PENGELOLAAN REGISTRASI PIHAK PELAPOR

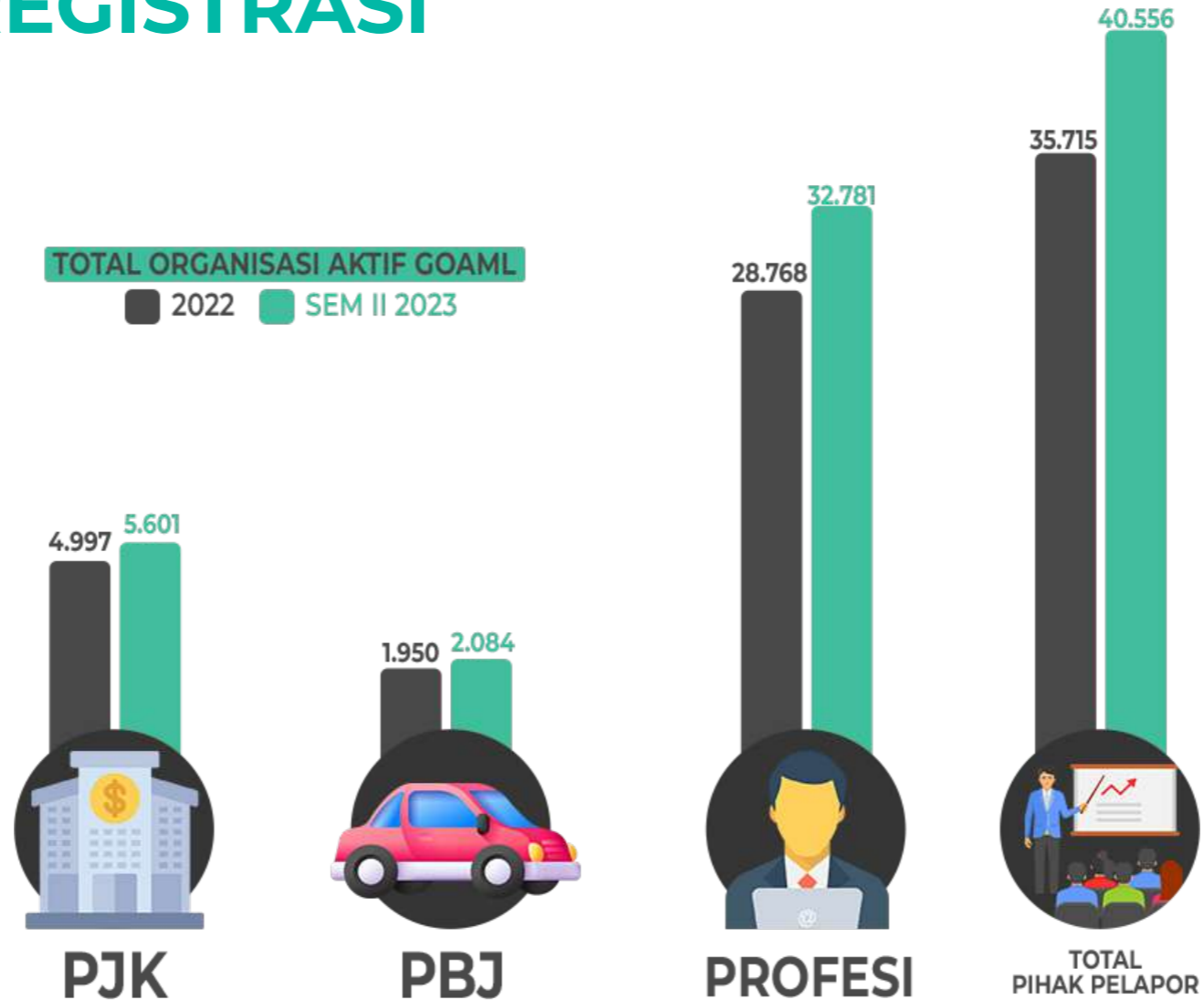
TAHAP pertama Pihak Pelapor dalam menyampaikan laporan yaitu registrasi akun, selanjutnya PPATK akan melakukan verifikasi atas setiap permohonan registrasi yang disampaikan Pihak Pelapor pada aplikasi GoAML.

5.026 Registrasi

Per Januari s.d Desember 2023
meningkat **13,55%**

Registrasi baru paling banyak pada GoAML pada tahun 2023 berdasarkan jumlahnya (satuan organisasi) adalah **Notaris (3.862 organisasi), Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam (516 organisasi), dan Advokat (220 organisasi).**

Adapun faktor yang dinilai sangat mempengaruhi tingkat registrasi Pihak Pelapor tersebut adalah kebijakan dari Lembaga Pengawas dan Pengatur yang dikaitkan dengan perizinan usaha serta program Bimbingan Teknis goAML.



Meningkatnya jumlah *registrasi* Pihak Pelapor pada GoAML merupakan cermin atas *awareness* Pihak Pelapor dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK memerlukan dukungan dari Pihak Pelapor yang diawali dengan pelaksanaan registrasi GoAML agar selanjutnya Pihak Pelapor dapat menyampaikan laporan ke PPATK sebagai bahan pelaksanaan analisis dan penelusuran aset hasil tindak pidana.



TABEL STATISTIK

Jenis Pihak Pelapor (PP)	Organisasi Aktif* per Sem II '22	PP registrasi baru pada tahun 2023	Total PP Non-aktif** Per 31 Des '23	Organisasi Aktif per 31 Des '23
a	b	c	d	e = (b+c-d)
PENYEDIA JASA KEUANGAN				
Kustodian	21	2	0	23
Wali Amanat	8	3	0	11
Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro	2	0	0	2
Pedagang Valuta Asing	987	25	12	1.000
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	1	0	0	1
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	45	4	0	49
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	753	516	0	1.269
Pegadaian	35	4	1	38
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi***	98	6	2	102
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	228	9	18	219
Perusahaan Modal Ventura	57	0	0	57
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3	0	0	3
Lembaga Keuangan Mikro	38	9	0	47
Lembaga Pembiayaan Ekspor	1	0	0	1
Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	77	12	0	89
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	3	5	0	8
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	2	3	0	5
Total Penyedia Jasa Keuangan	4.997	650	46	5.601
PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN				
Pejabat Lelang Kelas II	160	3	0	163
Perusahaan Properti / Agen Properti	1.154	93	1	1.246
Pedagang Kendaraan Bermotor	421	35	0	456
Pedagang Permata dan Perhiasan / Logam Mulia	29	0	0	29
Pedagang Barang Seni dan Antik	2	0	0	2
Balai Lelang	114	0	0	114

Jenis Pihak Pelapor (PP)	Organisasi Aktif* per Sem II '22	PP registrasi baru pada tahun 2023	Total PP Non-aktif** Per 31 Des '23	Organisasi Aktif per 31 Des '23
a	b	c	d	e = (b+c-d)
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	70	4	0	74
Total Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain	1.950	135	1	2.084
PROFESI				
Notaris	17.122	3.862	23	20.961
Akuntan	385	29	13	401
Akuntan Publik	478	32	22	488
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.720	98	76	10.742
Advokat	17	220	4	233
Perencana Keuangan	46	0	0	46
Total Profesi	28.768	4.241	138	32.871
TOTAL PIHAK PELAPOR	35.715	5.026	185	40.556

Keterangan:

* Organisasi Aktif adalah Pihak Pelapor yang terdaftar pada GoAML dan berstatus aktif pada GoAML.

** Pihak Pelapor Non-Aktif adalah Pihak Pelapor yang akun organisasi GoAML-nya dinonaktifkan karena mengalami pencabutan izin usaha oleh LPP, penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, perubahan nama organisasi, aktivitas/kegiatan bisnisnya tidak termasuk dalam lingkup jenis Pihak Pelapor PPAK, dan/atau mengalami duplikasi data pada GoAML.

*** Jumlah organisasi (*entity*) pada Pihak Pelapor jenis Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi terdiri atas Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pedagang Aset Kripto.

PPATK senantiasa berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), regulator pemberi izin usaha, dan *stakeholders* lainnya untuk melakukan rekonsiliasi data Pihak Pelapor sehingga peran LPP dan *stakeholders* untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam meningkatkan kepatuhan APUPPT bagi masing-masing Pihak Pelapor dapat turut menyukseskan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.





DIREKTORI PIHAK PELAPOR

PENYUSUNAN Direktori Pihak Pelapor salah satu tugas yang diemban, PPATK telah melaksanakan kegiatan pemadanan data dengan yang terdaftar dan berizin di Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) serta data lainnya. Pemadanan data perlu dilakukan untuk memperoleh data Pihak Pelapor yang *update, valid*, dan lengkap. Semester I tahun 2023, berfokus pada pemadanan Pihak Pelapor yang dikategorikan ke dalam Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain

(PBJ). Dalam hal ini, PPATK bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) dalam rangka tersedianya data Pihak Pelapor yang berstatus sebagai badan hukum. Setelah dilakukan koordinasi, rekonsiliasi, dan pemadanan data, PPATK berhasil mengidentifikasi sebanyak **15.102** Pihak Pelapor yang ditetapkan sebagai populasi PBJ dimaksud.

Berdasarkan bagan disamping, diketahui bahwa persentase jumlah PBJ terbesar adalah :



Perusahaan Properti/Agen Properti

67,16%

Pedagang Kendaraan Bermotor

31,35%

Pedagang Permata dan Perhiasan / Logam Mulia

0,79%

Pedagang Barang Seni dan Antik

0,70%

RAPAT KOORDINASI TAHUNAN 2023

KEGIATAN yang rutin dilakukan setiap tahunnya bertujuan untuk menyampaikan apresiasi kepada seluruh *stakeholders* khususnya pihak pelapor yang telah berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM, serta untuk menyampaikan rencana strategis dan program kerja yang akan

dilakukan guna mewujudkan Indonesia yang bersih dari TPPU, TPPT, dan PPSPM. Tahun 2023 kegiatan bertempat di Golden Ballroom, The Sultan Hotel & Residence Jakarta. dan dihadiri sekurangnya 500 orang, terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan dari pihak pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), dan

asosiasi pihak pelapor. Agenda mencakup pemberian informasi mengenai pencapaian PPATK bersama *stakeholders* selama Tahun 2022, Penguatan Peran Bersama (*Fight Against Green Financial Crime*), kolaborasi Pencegahan dan pemberantasan *Green Financial Crime* guna mewujudkan ekonomi hijau, serta strategi *Public Private Partnership (PPP)* dalam pencegahan dan pemberantasan politik uang guna mewujudkan Pemilu Pilkada tahun 2024 sebagai sarana integrasi bangsa.



Gambar 6 Rapat Koordinasi Tahunan



PEMBENTUKAN TIM KERJA ANALISIS KOLABORATIF TERKAIT PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Collaborative Analysis Team

TAHUN 2024 menjadi momentum penting dengan diselenggarakannya pesta demokrasi besar-besaran di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pesta demokrasi dimulai dengan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilakukan secara serentak. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tersebut tentunya berpotensi memiliki tantangan dalam hal penerapan prinsip pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang antara lain jujur, adil, integritas serta akuntabel, khususnya dalam rangka mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas sebagai sarana integrasi bangsa. Dalam upaya mewujudkannya diperlukan suatu komitmen langkah bersama dari seluruh pemangku kepentingan melalui pembentukan wadah kerja sama lintas sektoral berupa *Public Private Partnership* (PPP) yaitu kolaborasi dalam suatu wadah Tim Kerja Analisis Kolaboratif Terkait Pemilu Pilkada (*Collaborative Analysis Team/CAT*). Pada Proses CAT, tim saling bertukar informasi antara *public sector* dan *private sector* dengan

berkoordinasi secara berkesinambungan antara PPAK, Pihak Pelapor (dalam hal ini Penyedia Jasa Keuangan), Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), Aparat Penegak Hukum (APH) serta Kementerian/Lembaga (K/L). Selama tahun 2023 PPAK telah melaksanakan 5 (lima) kali pertemuan koordinasi dengan anggota Tim Kerja yang dilaksanakan di kota Denpasar, Jakarta, Cirebon dan Bogor mendiskusikan beberapa hal seperti komitmen bersama, kebutuhan data/informasi, mekanisme kerja dari Tim Kerja serta evaluasi dari pelaksanaan Tim Kerja secara menyeluruh tersebut. CAT berjalan agar proses demokrasi NKRI tidak tercederai dengan tindakan-tindakan yang tidak terpuji antara lain adanya praktik politik uang (*money politic*) dan dalam fungsinya PPAK memastikan tidak ditemuinya dana kampanye yang bersumber dari hasil tindak pidana dan/atau digunakan untuk kegiatan yang melanggar ketentuan pemilu pilkada.



Gambar 7 Dokumentasi Rakor CAT Bali



Gambar 9 Rapat Koordinasi Pemilu Bidakara



Gambar 8 Focus Group Discussion di Hotel Pullman



Gambar 10 Focus Group Discussion Cirebon

Efektivitas Aplikasi SIPENDAR (Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme) Selama periode Agustus 2021 s.d. Desember 2023

Jumlah Registrasi PJK pada Aplikasi SIPENDAR					
No	Tahun	2021	2022	2023	TOTAL
1.	Jumlah PJK yang melakukan registrasi aplikasi SIPENDAR	226	1.778	299	2.303
2.	Jumlah petugas PJK yang melakukan registrasi aplikasi SIPENDAR	664	3.461	697	4.822

Tahun/ Periode watchlist	2021	2022				2023				Total
	Initial Watch-list	Watch-list I	Watch-list II	Watch-list III	Watch-list IV	Watch-list V	Watch-list VI	Watchlist VII	Watch-list VIII	
Tanggal Publikasi	13-Okt-2021	13-Jan-22	13-Apr-22	13-Jul-22	13-Okt-2022	13-Jan-23	13-Apr-23	13-Jul-23	13-Okt-2023	
Jumlah Individu	6.459	450	125	113	75	43	54	36	80	7.435
Jumlah Korporasi	285	91	12	33	6	10	6	7	2	452

TINDAK pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Adanya kasus terorisme di Indonesia merupakan bukti bahwa tindak pidana terorisme merupakan suatu ancaman nyata yang dapat merongrong kedaulatan bangsa dan negara. Oleh karena itu, aktivitas terorisme dan instrumen pendukungnya harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia, khususnya unsur pendanaan

yang merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme. Dalam rangka memutus mata rantai pendanaan terorisme, PPATK telah mengembangkan aplikasi SIPENDAR yang merupakan komitmen bersama antara PPATK, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Aplikasi SIPENDAR telah memfasilitasi pertukaran informasi transaksi yang berindikasi tindak pidana pendanaan terorisme serta menjadi wadah, *database*, atau pusat data yang berisikan informasi intelijen terkait pendanaan terorisme. Pertukaran informasi tersebut melalui pemberian hak akses kepada pihak berkepentingan secara selektif terbatas, guna mempercepat penelusuran atau deteksi awal adanya kegiatan terorisme melalui *follow the money* sebelum serangan terjadi.

Selama tahun 2023, terjadi penambahan registrasi baru sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) PJK. Total PJK yang telah melakukan registrasi SIPENDAR selama periode Agustus 2021 s.d. Desember 2023 adalah 2.303 (dua ribu tiga ratus tiga

PJK. Jumlah tersebut telah mencakup 90,48% dari total PJK yang telah menyelesaikan registrasi goAML sebagai sistem pelaporan utama PPATK. Upaya - upaya terus dilakukan untuk meningkatkan registrasi aplikasi SIPENDAR oleh PJK, antara lain dengan rutin menyelenggarakan webinar yang disebut dengan Klinik SIPENDAR rutin yang diadakan pada hari Senin untuk membantu Pihak Pelapor yang mengalami kesulitan saat melakukan registrasi secara mandiri. Selain itu, juga diselenggarakan Klinik Registrasi SIPENDAR berkala dengan menargetkan jenis industri tertentu yang berdasarkan pemantauan PPATK masih memiliki presentase registrasi rendah guna menjangkau seluruh Pihak Pelapor.





PENGAWASAN KEPATUHAN

TUJUAN dari pelaksanaan kegiatan pengawasan kepatuhan yaitu untuk mencegah dan melindungi pihak pelapor yang akan digunakan sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Teroris (TPPT), serta Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (PSPM). Oleh karena itu, kegiatan ditujukan untuk memastikan pihak pelapor menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan kepada PPATK. Kegiatan pengawasan kepatuhan dilakukan kepada pihak pelapor yaitu dengan audit terhadap

Pihak Pelapor yang terdiri dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan/atau Jasa dan Profesi (PBJP). Audit dilaksanakan secara bersama Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) dan Mandiri. Pengawasan Kepatuhan PPATK dibagi menurut jenisnya yaitu Pengawasan Kepatuhan pada PJK dan Pengawasan Kepatuhan PBJP. Oleh karena itu, kegiatan ditujukan untuk memastikan pihak pelapor menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan kepada PPATK.

PENGAWASAN KEPATUHAN PENYEDIA JASA KEUANGAN (PJK)

Telah dilaksanakan **33 Audit Khusus**
terhadap PJK - 2023

AUDIT Khusus dengan cara audit bersama LPP terhadap **19 PJK** dan audit mandiri terhadap **16 PJK** mandiri. Fokus kegiatan Pengawasan Kepatuhan PJK tahun 2023 dilakukan secara tematik. Hal ini

dilakukan seiring dengan upaya pemenuhan *action plan* Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) terkait Penerapan Program APU PPT dan PPSPM, dan pada PJK.



TEMA PENGAWASAN KEPATUHAN PJK 2023

Mens Rea/ Recurring/ Recycling

Menilai adanya unsur kesengajaan dan/atau kelalaian oleh Pihak Pelapor dengan untuk tidak melaporkan transaksi Nasabah yang telah memenuhi unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan/atau terkait kasus/tipologi yang sama dan berulang, deteksi judi *online*; dan deteksi pendanaan terorisme

Hasil Kajian National Risk Assessment (NRA)

Tema Narkotika yang merupakan salah satu tindak pidana asal dengan risiko tindak pidana pencucian uang yang tinggi dan bersifat transnational

Green Financial Crime (GFC)

Salah satu bentuk penilaian sistem pemantauan dan identifikasi TKM di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Hal dilakukan untuk mendukung rencana Pemerintah dalam membangun kegiatan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan bersama yang menguntungkan bagi produsen dan konsumen dengan tidak hanya mengejar pada pertumbuhan ekonomi saja.

Terorisme

Upaya dalam menilai kecukupan sistem pemantauan dan identifikasi TKM yang dilakukan oleh pelaku terorisme baik perorangan maupun organisasi non-profit

Pemilu

Dengan tujuan mendeteksi aliran dana menjelang Pemilu

Judi Online

Dengan tujuan mendeteksi aliran dana terkait judi online, dan ketahui cara menggunakan bahannya

Penerapan PMPJ dan pelaksanaan kewajiban pelapor kepada PPATK

Dengan merujuk pada hasil *Risk Based Approach (RBA) tools* APU-PPT dari LPP dengan objek pemeriksaan yang akan ditentukan kemudian

PELAKSANAAN AUDIT BERSAMA LPP

Industri	Jumlah	Tematik	LPP
Bank Umum	6	<i>Mens Rea</i> • Narkotika • GFC	OJK
Kelompok Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)	3	PMPJ dan Kewajiban Pelaporan	Bank Indonesia (BI)
Penyelenggara Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR)	3	PMPJ dan Kewajiban Pelaporan	
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam (KSP)	5	PMPJ dan Kewajiban Pelaporan	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM)
Pedagang <i>Crypto Asset</i>	2	PMPJ dan Kewajiban Pelaporan	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

PELAKSANAAN AUDIT MANDIRI

Industri	Jumlah	Tematik
Bank Umum	2	GFC
Perusahaan Asuransi	1	Korupsi
Penyelenggaraan Dompot Elektronik	1	Judi <i>Online</i>
Kelompok Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)	4	PMPJ dan Kewajiban Pelaporan
Penyelenggara Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR)	3	PMPJ dan Kewajiban Pelaporan
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam (KSP)	3	PMPJ dan Kewajiban Pelaporan

KELEMAHAN PJK YANG DITEMUKAN PADA PROSES AUDIT

- 1 Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) yang masih kurang memadai;
- 2 Pengawasan aktif dewan direksi dan komisaris terkait dengan penerapan APU dan PPT yang belum maksimal;
- 3 Kebijakan dan prosedur yang belum memadai;
- 4 Sistem informasi yang masih perlu disempurnakan;
- 5 Pelaksanaan sistem pengendalian internal pada PJK Non-Bank yang belum berjalan secara optimal;
- 6 Penerapan KYE (*Know Your Employee*) pada PJK Non-Bank yang kurang memadai;
- 7 Pelaksanaan pelatihan APU PPT pada PJK Non-Bank yang masih minim.
- 8 Pelaksanaan sistem pengendalian internal pada PJK Non-Bank yang belum berjalan secara optimal;

Terkait dengan masih ditemukannya laporan yang belum dilaporkan oleh pihak pelapor baik LTKT dan LTKM (data terlampir) disebabkan oleh kurangnya pemahaman pegawai pihak pelapor terkait dengan pelaksanaan kewajiban pelaporan serta sistem

pemantauan transaksi yang tidak memadai.

Selain hal tersebut, PPAK juga telah menyelesaikan 33 laporan pemantauan atas pemenuhan komitmen hasil audit.

PJK	TKM	Indikasi TKM	TKT	Indikasi TKT	LTKT
10 Bank	41	23	25	-	-
1 Perusahaan Asuransi	13	4	-	-	-
8 Koperasi Simpan Pinjam	8	25	1	-	-
7 KUPVA BB	33	101	731	9	-
6 Penyelenggaraan Transfer Dana BB	2	32	-	-	67
1 E-wallet	88	703	-	-	-
2 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	11	31	-	-	-
Jumlah	196	919	757	9	67



10 USULAN REKOMENDASI KEPADA LPP



- Rekomendasi Pengenaan Sanksi Atas Temuan Hasil Joint Audit OJK dan PPAJK;
- Rekomendasi Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Laporan yang Disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan Melalui Aplikasi goAML

3 Dokumen



- Rekomendasi Pengenaan Sanksi Atas Temuan Hasil Joint Audit Bank Indonesia dan PPAJK;
- Rekomendasi Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Laporan yang Disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan Melalui Aplikasi goAML

5 Dokumen



- Rekomendasi Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Laporan yang Disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan Melalui Aplikasi goAML

1 Dokumen



- Rekomendasi Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Laporan yang Disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan Melalui Aplikasi goAML

1 Dokumen

RENCANA AUDIT PJK 2024

AUDIT pada tahun 2024 akan dilaksanakan secara Audit Bersama LPP maupun Mandiri dengan tetap berkoordinasi dengan LPP, fokus auditnya yaitu:

1. Kewajiban Pelaporan LTKT dan LTKM yang juga mencakup tema pengawasan (*Thematic Supervision*) terkait dengan indikasi tindak pidana di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup (*Green Financial Crime*), aliran dana terkait Pemilu dan Pilkada tahun 2024, judi online, pendanaan terorisme, dan lain sebagainya)

2. Tematik *Recurring & Recycling* terhadap pihak pelapor yang tidak melaporkan transaksi nasabah atas kasus/tipologi yang sama dan berulang; dan/atau
3. Rencana pengawasan kepatuhan tahun 2024 akan merujuk pada hasil *Risk Based Approach* (RBA) tools APU-PPT dari LPP dengan objek pemeriksaan yang akan ditentukan kemudian.

Bimbingan Teknis
6 Kegiatan -
332
Lembaga

Dalam mendukung kegiatan pengawasan kepatuhan selama tahun 2023, PPAJK telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis terhadap PJK.

No	Kegiatan	Jumlah Peserta Lembaga	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
1	Bimbingan Teknis terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	20	8 Februari 2023	DKI Jakarta
2	Bimbingan Teknis terhadap Bank Umum	16	22 dan 23 Mei 2023	DKI Jakarta
3	Bimbingan Teknis terhadap KUPVA BB/PJP LR	160	13, 15, dan 23 Juni 2023	Kepulauan Riau
4	Bimbingan Teknis terhadap KUPVA BB/PJP LR	24	31 Juli 2023	Kalimantan Barat
5	Bimbingan Teknis terhadap Bank Umum	95	7 September 2023	Jawa Barat
6	Bimbingan Teknis terhadap KUPVA BB/PJP LR	17	9 September 2023	Sumatera Barat

PENGAWASAN KEPATUHAN

PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN DAN PROFESI (PBJP)

Telah dilaksanakan 81 Audit terhadap PBJP - 2023

PELAKSANAAN kegiatan pengawasan kepatuhan PBJP telah dilakukan secara berbasis risiko dengan berdasarkan kepada hasil penilaian risiko yang bersumber dari *National Risk Assessment (NRA)*, *Sectoral Risk Assessment (SRA)*, dan perhitungan risiko individual pihak pelapor. Pada pelaksanaan kegiatan audit tahun 2023 dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu audit kepatuhan dan audit khusus. Audit Kepatuhan adalah

pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai dan/atau memastikan kepatuhan Pihak Pelapor dalam memenuhi ketentuan PMPJ dan/atau kewajiban pelaporan kepada PPATK. Sedangkan Audit Khusus dilakukan melalui pemeriksaan dengan ruang lingkup dan/atau tujuan tertentu dan/atau tindak lanjut pengawasan kepatuhan.



Kegiatan Tahun 2023

Penilaian Risiko Pihak Pelapor Tahun 2023

Hasil penilaian risiko individual tersebut dijadikan salah satu dasar dalam menentukan objek kegiatan pengawasan kepatuhan berupa audit kepatuhan, audit khusus, asistensi maupun bimbingan teknis

Pelaksanaan Kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus

Masih ditemukan kurangnya awareness Pihak Pelapor terkait pelaksanaan PMPJ dan kewajiban pelaporan kepada PPATK. Adapun terkait dengan masih terdapatnya laporan yang belum dilaporkan oleh Pihak Pelapor yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman Pihak Pelapor terkait dengan ketentuan dan mekanisme kewajiban pelaporan serta sistem pemantauan transaksi yang kurang memadai. Selain itu, sebagai tindak lanjut dari kegiatan audit PPATK juga telah menyelesaikan **61 laporan pemantauan atas pemenuhan komitmen hasil audit** selama tahun 2023

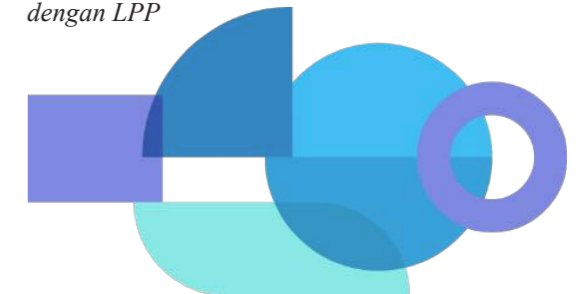
Audit Kepatuhan

No	Jenis Industri	Jumlah Pihak Pelapor
1	Perusahaan Properti/ Agen Properti	36
2	Pedagang Kendaraan Bermotor	27
3	Balai Lelang*	2
4	Advokat	3
5	Notaris*	1
6	Akuntan Publik*	2

Audit Khusus

No	Jenis Industri	Jumlah Pihak Pelapor
1	Perusahaan Properti/ Agen Properti	8
2	Pedagang Kendaraan Bermotor	2
Total Audit Kepatuhan dan Audit Khusus		81

*) Mekanisme audit kepatuhan berbentuk joint audit dengan LPP



Bimbingan Teknis (BIMTEK) terhadap Pihak Pelapor

Bimtek dilaksanakan sebagai upaya memberikan edukasi atas kendala-kendala yang dialami PBJP. Materi yang disampaikan pada kegiatan bimtek tersebut terkait penerapan program APUPPT. Dalam pelaksanaannya, Pihak Pelapor akan dipandu secara teknis terkait prosedur dan kebijakan penerapan PMPJ, tata cara registrasi hingga mekanisme pelaporan di aplikasi goAML.



Gambar 11 BIMTEK terhadap Pihak Pelapor

No	Jenis Industri	Bentuk Kegiatan	Lokasi	Jumlah Pihak Pelapor Hadir
1	Perusahaan Properti dan Agen Properti	Offline	Jakarta	52
2	Grup Besar Properti	Offline	Jakarta	30
3	KJA-KAP	Online		31
4	Advokat	Offline	Jakarta	48
5	Perusahaan Properti dan Agen Properti	Online	Jakarta	21
6	Advokat	Online		141
7	Pedagang Kendaraan Bermotor	Offline	Jakarta	44
8	Perusahaan Properti dan Agen Properti/ Pedagang Kendaraan Bermotor	Offline	Malang	35
9	Perusahaan Properti dan Agen Properti/ Pedagang Kendaraan Bermotor	Offline	Medan	42
10	Perusahaan Properti, Agen Properti/ Pedagang Kendaraan Bermotor, dan Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	Offline	Jakarta	37

Pengenaan Sanksi terhadap Pihak Pelapor

Dalam rangka sarana pembinaan kepada PBJP dalam melaksanakan program APU PPT, PPATK telah mengenakan sanksi administratif bagi PBJP atas pelanggaran kewajiban pelaporan periode tahun 2022-2023 dengan rincian:

Sanksi Keterlambatan Penyampaian Laporan

No	Jenis Industri	Jumlah
1	Perusahaan Properti/Agen Properti	424
2	Pedagang Kendaraan Bermotor	220
3	Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	4

Sanksi Tidak Memenuhi Komitmen Audit

No	Mekanisme	Jenis Industri	Jumlah
1	Teguran tertulis	Pedagang Kendaraan Bermotor	1
2	Pengumuman kepada publik	Perusahaan Properti/ Agen Properti	1

Rapat Koordinasi Tahunan dengan LPP

Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh LPP bagi PBJP yang terdiri dari Direktorat Pengawasan Kepatuhan PBJP PPATK, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, rapat koordinasi juga dihadiri Direktorat Profesi Penunjang OJK dan juga peserta dari internal PPATK. Topik yang dibahas dalam kegiatan rapat koordinasi ini antar lain berupa tindak lanjut pasca Indonesia sebagai anggota FATF terkait pelaksanaan pengawasan kepatuhan PBJP, evaluasi pengawasan kepatuhan yang dilakukan oleh LPP serta kendala dalam melakukan pengawasan kepatuhan pada tahun 2023 serta rencana kegiatan pengawasan kepatuhan tahun 2024



TEGAS

Membangun Strategi dan
Kerjasama

PERKUAT KERJA SAMA DALAM NEGERI

DALAM bekerja, PPATK tak sendiri. Dibutuhkan upaya kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk bersama mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pada tahun 2023, sejumlah kerja sama dibentuk. Total ada 13 kesepakatan yang dihasilkan dari berbagai ruang lingkungannya, seperti: pengembangan kajian keilmuan, pertukaran informasi, pendidikan atau pelatihan, pengembangan teknologi informasi dan juga sosialisasi.

Nota Kesepahaman antara PPATK dan Universitas Kristen Indonesia Nomor NK 183/1.02/PPATK/1/2023 Tanggal 3 Januari 2023 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

Nota Kesepahaman antara PPATK dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trisakti Nomor NK 184/1.02/PPATK/1/2023 Tanggal 5 Januari 2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

Nota Kesepahaman antara PPATK dan Universitas Indonesia Nomor NK-185/1.02/PPATK/1/2023 Tanggal 16 Januari 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

Nota Kesepahaman antara PPATK dan Universitas Azzahra Nomor NK-186/1.02/PPATK/1/2023 Tanggal 31 Januari 2023 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

Nota Kesepahaman antara PPATK dan Badan Pengawas Pemilu Nomor NK-187/1.02/PPATK/1/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Kerja Sama Dalam Rangka Penindakan Pelanggaran dan Pengawasan Dana Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Serentak Tahun 2024;

Nota Kesepahaman antara PPATK dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor NK 187/1.02/PPATK/1/2023 Tanggal 7 Februari 2023 tentang Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Asal, Serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan

Nota Kesepahaman antara PPATK dan Universitas Dr. Soetomo Nomor NK-190/1.02/PPATK/5/2023 Tanggal 15 Mei 2023 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.



Nota Kesepahaman antara PPATK dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor NK-191/1.02/PPATK/7/2023 Tanggal 26 Juli 2023 tentang Sinergisitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Nota Kesepahaman antara PPATK dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor NK-192/1.02/PPATK/8/2023 Tanggal 7 Agustus 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Tindak Pidana Pencucian Uang.

Petunjuk teknis antara PPATK dan Pusat Informasi Kriminal Nasional Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pusiknas Bareskrim Polri) Nomor NK-193/1.02/PPATK/9/2023 tanggal 5 September 2023 tentang Buku Pedoman Bimbingan Teknis Tentang Penggunaan Aplikasi Sispeka PPATK dan E-MP Bareskrim Polri.

Nota Kesepahaman antara PPATK dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor NK-194/1.02/PPATK/9/2023 Tanggal 15 September 2023 tentang Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Nota Kesepahaman antara PPATK dan Kementerian Perhubungan Nomor NK-197/1.02/PPATK/12/2023 Tanggal 1 Desember 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Nota Kesepahaman antara PPATK dan Kementerian Agama Nomor NK-198/1.02/PPATK/12/2023 Tanggal 6 Desember 2023 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme



Gambar 1 Penandatanganan MoU PPATK dan Kementerian Agama

Pelaksanaan kerja sama tersebut, diharapkan dapat memperkuat rezim APU-PPT. Adapun bentuk kerja sama yang telah dilakukan PPATK bersama dengan Lembaga tersebut antara lain:

Telah dilaksanakannya pertukaran informasi antara PPATK dengan KPU dan Bawaslu untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU serta pencegahan penindakan pelanggaran dan pengawasan dana kampanye pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. PPATK juga telah memberikan sosialisasi kepada 1542 perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan 104 perwakilan Bawaslu Provinsi pada Rakornas Bawaslu di Surabaya, 7 Februari 2023;

Telah dilaksanakannya berbagai kerja sama dengan perguruan tinggi diantaranya yaitu PPATK menerima kunjungan dari pihak Universitas Indonesia yang sedang melakukan kerja sama dengan Charles Darwin University (CDU) School of Law pada Rabu, 08 Februari 2023 di PPATK. Telah dilaksanakan *workshop* penulisan jurnal ilmiah berstandar SCOPUS oleh FEB Universitas Trisakti di Kantor PPATK pada 23 Agustus 2023.

Telah dilaksanakannya berbagai kerja sama dengan instansi penegak hukum yaitu dengan pertukaran informasi dengan BNN, Kejaksaan, Bareskrim Polri; BNPT tergabung dalam Satgas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta kerja sama dalam penanganan perkara, pendidikan atau pelatihan, sosialisasi, serta pengembangan sistem TI.

Telah dilaksanakannya kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lainnya diantaranya yaitu pertukaran informasi dengan Kementerian Perhubungan dan pelaksanaan *Workshop* Penguatan Integritas ASN dengan Kementerian Agama pada 6 Desember 2023.



**PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**PPATK
DAN**

BAWASLU

**TENTANG KERJA SAMA PERANGKATAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG, SERTA ANGKA PENINDAKAN
PELANGGARAN DAN AMPANYE PADA
PENYELENGGARAAN KAMPANYE PADA
BUKTIAN GUBERNUR,
BUPATI, W... SER... 2024**



Gambar 2 Penandatanganan MoU PPATK dan Bawaslu

PETAKAN RISIKO BERSAMA

ANCAMAN tindak pidana pencucian uang terus bermunculan seiring dengan perkembangan teknologi. Banyaknya layanan finansial berbasis teknologi, menuntut adanya pemetaan risiko yang mumpuni. Hal itu dilakukan agar dapat menjaga stabilitas ekonomi dan terjaminnya pengguna layanan melalui sistem aplikasi. PPATK sebagai lembaga *Financial Intelligence Unit* (FIU) bergerak cepat dan adaptif menangani ancaman tersebut. Pada tahun ini, PPATK bersama seluruh pemangku kepentingan menyusun bersama laporan penilaian risiko sektoral TPPU dan TPPT pada Teknologi Finansial. Selain itu, disusun pula penilaian risiko sektoral TPPU dan TPPT Yang Berasal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja.

Hal ini juga sebagai dasar pemenuhan rekomendasi FATF Nomor 15 tentang perlunya perhatian khusus terhadap ancaman tindak pidana pencucian uang yang timbul dari teknologi baru atau yang sedang berkembang. Adapun hasil temuan dari penilaian risiko sektoral TPPU dan TPPT Yang Berasal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja, diantaranya:

Adanya penyalahgunaan pada perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Tidak Berizin/Non Prosedural

Transformasi modus perekrutan melalui *social engineering* berupa *platform* pencarian kerja secara *online*

Konvergensi tindak pidana asal lainnya terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), antara lain: Pemalsuan Dokumen, Penipuan/Penggelapan, ITE (*scam/penipuan online*), Korupsi (Suap/Gratifikasi), Keimigrasian), serta Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Transaksi Ilegal berupa barter produk bernilai ekonomis tinggi, terutama di Kawasan perbatasan Malaysia, berupa komoditi: bawang merah & bawang putih, rokok dan baju bekas.

Menurut tahapan terjadinya TPPO, bahwa tahap eksploitasi, penampungan, pengangkutan, pengiriman merupakan tahapan yang memiliki risiko tinggi terjadinya TPPU.



Bentuk eksploitasi TPPO yang berisiko tinggi terjadinya TPPU, yaitu Eksploitasi Seksual, Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan eksploitasi dalam bentuk Pekerja Rumah Tangga, Anak Buah Kapal, dan Penipuan (*Online Scam*) memiliki risiko menengah.

Wilayah berisiko tinggi TPPU yang berasal TPPO yaitu Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Bali. Sedangkan wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, NTB, NTT, Riau, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat.

Profil Wiraswasta, Pegawai Swasta dan Pedagang merupakan profil yang berisiko tinggi.

Korporasi Non Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) berupa agen tenaga kerja, agen perjalanan dan pengangkutan merupakan bentuk korporasi yang berisiko tinggi.

Bank Umum merupakan sektor industri yang berisiko tinggi, sedangkan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pedagang Valuta Asing, Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet dan Pedagang Fisik Aset Kripto memiliki risiko sedang.



Gambar 3 Asistensi dengan Stakeholder



AGAR REZIM APU-PPT, SEMAKIN KUAT

PPATK bersama para pemangku kepentingan terkait menggelar Program Mentoring Berbasis Risiko dan *Coaching Clinic* (Promensisko) dalam Strategi Mitigasi Risiko TPPU & TPPT pada *Non-Profit Organization* (NPO) dan Korporasi. Hal ini dilakukan dalam rangka mengimplementasi kesungguhan Indonesia untuk memperkuat rezim APU-PPT.

Kolaborasi PPATK bersama Pihak Regulator,

Lembaga Penegak Hukum serta Pemerintah Daerah ini, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong internalisasi program mitigasi risiko atas pemanfaatan NPO dan Korporasi sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Selain itu, kegiatan Promensisko ini juga merupakan salah satu aksi rekomendasi yang harus dilakukan Indonesia berdasarkan hasil

MER FATF 2022/2023 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi serta penyalahgunaan NPO sebagai sarana pendanaan terorisme.

Pelaksanaan Promensisko ini diharapkan agar dapat meningkatkan kapasitas penegak hukum, regulator, pihak pelapor, dan pihak terkait lainnya dalam melakukan implementasi mitigasi risiko TPPU dan TPPT serta meningkatkan pemahaman tentang strategi dan penanganan perkara TPPU dan TPPT dengan pendekatan berbasis risiko.

Selain itu, Promensisko juga diharapkan sebagai media untuk membentuk sinergi nasional antar instansi/kementerian/lembaga.

Promensisko dilaksanakan pada Rabu hingga Kamis, 15-16 Maret 2023, di Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah pihak pelapor dan asosiasi, pihak swasta pada korporasi, pihak lembaga pengawas dan pengatur, pihak lembaga penegak hukum dan beberapa NPO atau Ormas baik secara luring maupun daring dengan jumlah partisipan mencapai dari 700 peserta.



Gambar 4 Kegiatan Program Monitoring Berbasis Risiko




SEMAKIN BERNAS BERSAMA SATGAS

KOMITE Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) membentuk Satuan Tugas Supervisi dan Evaluasi Penanganan Laporan Hasil Analisis, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Informasi Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) pada 13 April 2023. Hal itu dilakukan dalam rangka menyelesaikan Laporan Hasil Analisis/Laporan Hasil Pemeriksaan/Informasi PPAK.

S Satgas TPPU ini terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, kelompok kerja dan 12 (dua belas) tenaga ahli, dimana PPAK berkontribusi secara aktif dalam keanggotaan satgas tersebut. Satgas TPPU bertugas untuk melakukan supervisi dan evaluasi atas penanganan 300 LHA/LHP/Informasi PPAK, dimana selama masa tugasnya sejak Mei sampai dengan 31 Desember 2023, telah melakukan 33 kali kegiatan koordinasi atau pertemuan bersama Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Ahli, Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selama 7 bulan masa kerja Satgas TPPU tersebut, telah terlihat berbagai kemajuan baik dalam konteks pengkinian data tindak lanjut maupun kemajuan dalam penanganan atau penyelesaian kasus serta usulan perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut :


Gambar 5 Rapat Bersama Komite TPPU



Semula status tindak lanjut laporan hasil analisis/laporan hasil pemeriksaan/informasi PPAK yang disampaikan, berdasarkan data pemantauan PPAK baru 60 surat (20%) yang sudah selesai ditindaklanjuti, sedangkan 240 surat lainnya (80%) belum ditindaklanjuti (jumlah surat seluruhnya 300).

Setelah berbagai proses rekonsiliasi data, koordinasi, dan percepatan penanganan laporan hasil analisis/laporan hasil pemeriksaan/informasi, pada akhir periode Satgas TPPU, jumlah surat dengan status dalam proses/belum selesai hanya tersisa 19 Surat (6,3%) dan surat yang statusnya selesai penanganannya mencapai 281 Surat (93,7%).

Diantara 300 surat tersebut, terdapat 1 (satu) kasus importasi emas dengan nilai transaksi mencapai Rp 189 Triliun dimana tindak lanjutnya telah mengalami kema juaan cukup signifikan. Terkait kasus ini, semula hanya ditangani Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), tetapi Satgas kemudian merekomendasikan untuk ditangani Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam penanganan kasus tersebut, DJBC serta DJP terus berkoordinasi dengan PPAK untuk melakukan konsolidasi data transaksi keuangan. Hasil akhir per Desember 2023 adalah DJBC telah menetapkan penyidikan tindak kepabeanan dan DJP mendalami bukti permulaan tindak pidana perpajakan atas kasus tersebut.



Adapun pemantauan atas penyelesaian kasus tersebut direkomendasikan dilakukan oleh Komite TPPU. Satgas TPPU telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tata kelola penanganan LHA/LHP/Informasi PPAK oleh K/L penerima. Antara lain mekanisme penyampaian perkembangan penanganan LHA/LHP/Informasi tidak berjalan, penanganan LHA/LHP/Informasi yang bersifat kompleks dan melibatkan *prominent*

individual tidak tuntas terselesaikan, penghentian atas penanganan LHA/LHP/Informasi tidak transparan, serta isu-isu yang terkait dengan efektivitas penanganan Informasi oleh Itjen Kemenkeu. Atas permasalahan tersebut, Satgas telah merumuskan beberapa rekomendasi tata kelola terkait penanganan LHA/LHP/Informasi PPAK.



Gambar 6 Konferensi Pers Bersama Komite TPPU



Adapun pokok pembahasan dalam agenda rapat Komite TPPU tersebut mayoritas terkait keanggotaan penuh Indonesia di FATF, penetapan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi Stranas Tahun 2023, dan optimalisasi tindak lanjut LHA/LHP PPAK yang berindikasi tindak pidana pencucian uang.



Gambar 7 Rapat Komite TPPU

Selama periode 2023, terdapat berbagai capaian strategis yang telah dihasilkan oleh Komite TPPU melalui kerjasama dan koordinasi nasional, antara lain:

1. Penetapan dan pemenuhan capaian rencana aksi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme tahun 2023;
2. Percepatan pemenuhan *Action Plan* Keanggotaan Indonesia pada *Financial Action Task Force (FATF)*;
3. Pembentukan Satuan Tugas Supervisi dan Evaluasi Penanganan Laporan Hasil Analisis, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Informasi Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Pembentukan Tim Gabungan PPATK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penanganan TPPU yang berasal dari Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
5. Pembentukan Tim Bersama Keanggotaan penuh Indonesia pada FATF.



Gambar 8 Rapat Komite TPPU



Gambar 9 Konferensi Pers Rembentukan Tim Gabungan KLHK



Gambar 10 Inagurasi Pembentukan Tim Bersama Keanggotaan Penuh Indonesia di FATF



Gambar 11 Inagurasi Pembentukan Tim Bersama Keanggotaan Penuh Indonesia di FATF



TETAP PANTAU, TINDAK LANJUT

LAPORAN Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK kepada aparat penegak hukum, diinstruksikan untuk ditindaklanjuti oleh penyidik yang berwenang mengusut tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal. Hal tersebut berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis atau pemeriksaan dan laporan informasi, PPATK dapat meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang atas hasil analisis dan pemeriksaan PPATK dengan tujuan untuk kepentingan: penanganan tindak pidana pencucian uang yang efektif; penyusunan tipologi serta analisis strategis mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal; penyusunan laporan akuntabilitas pelaksanaan rezim anti pencucian uang dan; laporan pertemuan Komite TPPU.



Selama periode tahun 2023 PPATK telah melakukan rekonsiliasi data pemantauan kemanfaatan hasil analisis dan pemeriksaan PPATK sebagai berikut :

a. Rapat Koordinasi

PPATK telah melakukan 3 kali rapat rekonsiliasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan pada tanggal 12 Oktober 2023, 5 Desember 2023, dan 18 Desember 2023. Dari hasil rapat rekonsiliasi telah ditindaklanjuti dengan pengiriman surat pemantauan *feedback* HA/HP kepada seluruh Kepolisian dan Kejaksaan Pusat dan Daerah melalui surat.

b. Rapat Komite TPPU

Dalam rapat Komite TPPU telah disampaikan oleh Menko Polhukam untuk meningkatkan kemanfaatan HA/HP/INF PPATK oleh instansi penerima produk PPATK dimaksud.

c. Rencana Aksi Stranas TPPU TPPT

Dalam rangka penyusunan rencana aksi Stranas TPPU TPPT Tahun 2023, PPATK bersama-sama dengan instansi penanggung jawab melakukan pembahasan terkait dengan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh setiap instansi penanggung jawab aksi. Salah satu rencana aksi yang dibahas bersama-sama dengan instansi penanggung jawab adalah aksi terkait dengan peningkatan pemanfaatan hasil analisis dan pemeriksaan PPATK.





BERANTAS PENDANAAN SAMPAI KE AKAR

PPATK terus melakukan berbagai upaya disrupsi dalam tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Salah satunya, untuk pencegahan dan pemberantasan dalam tindak pidana pendanaan terorisme, di tahun ini PPATK bersama dengan Kementerian Luar Negeri, POLRI, BNPT, dan Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Bersama. Peraturan Bersama tersebut mengatur tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi.

Kemudian, Satuan Tugas Penanganan DTTOT yang dibentuk sejak tahun 2017, telah dilakukan perluasan anggota. Yaitu dengan menambah Kementerian, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pembentukan satgas penanganan DTTOT ini, dalam rangka efektivitas pelaksanaan Pasal 27 dan Pasal 28 UU TPPT, khususnya efektivitas pencantuman identitas individu dan korporasi/entitas ke dalam DTTOT yang bersumber dari pemerintah.

Selama periode 2023, Satgas DTTOT telah memperoleh capaian strategis, antara lain:

b. Pencantuman identitas individu dalam DTTOT sebanyak 11 individu, dimana pencantuman 8 individu ke dalam DTTOT bersumber dari pemerintah dan 3 individu bersumber dari UN List;

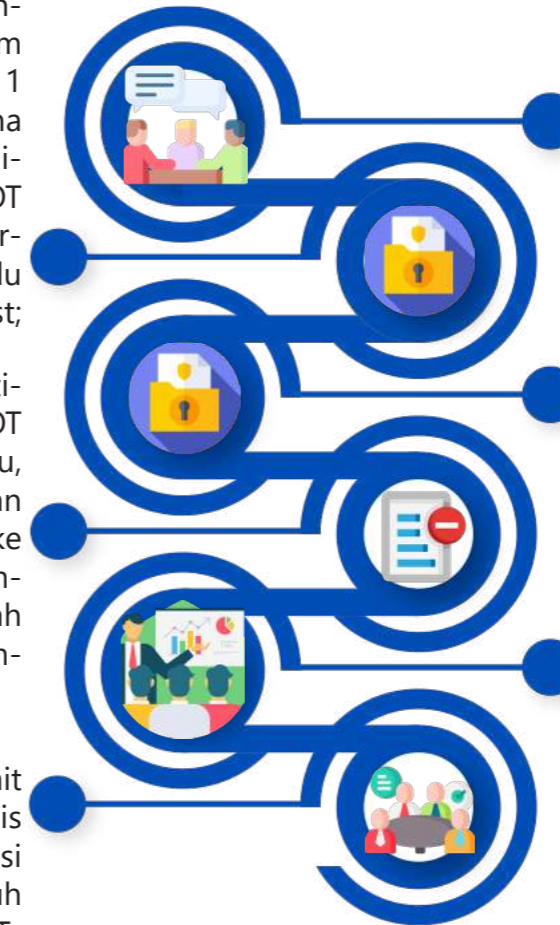
d. Penghapusan identitas individu dari DTTOT sebanyak 4 individu, dimana penghapusan identitas 2 individu ke dalam DTTOT bersumber dari pemerintah dan 2 individu bersumber dari UN List; dan

f. Sosialisasi terkait pembaharuan teknis pemanfaatan Aplikasi DTTOT kepada seluruh anggota Satgas DTTOT.

a. Telah dilaksanakan 8 kali pertemuan Rapat Satgas DTTOT yang menghasilkan berbagai rekomendasi untuk perpanjangan, penghapusan, maupun penambahan entitas dalam Daftar DTTOT;

c. Pencantuman identitas entitas dalam DTTOT sebanyak 4 entitas, dimana pencantuman 3 entitas ke dalam DTTOT bersumber dari pemerintah dan 1 entitas bersumber dari UN

e. Perpanjangan pencantuman identitas orang/korporasi dalam DTTOT pada bulan April 2023, Juli 2023, dan Oktober 2023.



Adapun upaya disrupsi terhadap Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), dilakukan melalui pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, serta pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan tersebut.

Sumber pencantuman identitas orang atau korporasi ke dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. PPATK, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, telah menetapkan Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan

Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Peraturan Bersama ini memberikan amanah kepada PPATK untuk menetapkan individu atau entitas yang berdasarkan PBB merupakan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proliferasi senjata pemusnah massal.

Agar lebih optimal koordinasi dan kerja sama antar instansi, dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan PPSPM (Satgas PPSPM). Pada tahun 2023 telah dilakukan perluasan keanggotaan Satgas PPSPM yaitu dengan menambahkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Keamanan Laut RI.

Setiap instansi terkait melakukan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar PPSM, pemblokiran serta merta atas dana milik orang atau korporasi, dan pencabutan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi.

Berbagai capaian strategis lainnya juga telah dihasilkan oleh Satgas PPSPM, antara lain:

a. Diseminasi amandemen Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

b. Sosialisasi dalam rangka penguatan kerangka hukum terkait pencegahan dan pemberantasan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, tanggal 19 Oktober 2023;

c. Telah dilaksanakan 3 kali pertemuan Rapat Satgas PPSPM yang memberikan pemahaman alur kerja dalam penanganan Daftar PPSPM, serta Pembahasan Tindak Lanjut Amandemen Peraturan Bersama dan Perumusan Satuan Tugas Weapons of Mass Destruction (Satgas WMD) paska Amandemen Peraturan Bersama tersebut;

d. Telah dilaksanakan koordinasi dalam penanganan pemblokiran aset secara serta merta atas miliki orang atau korporasi yang terindikasi pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.



KOORDINASI DAN ASISTENSI

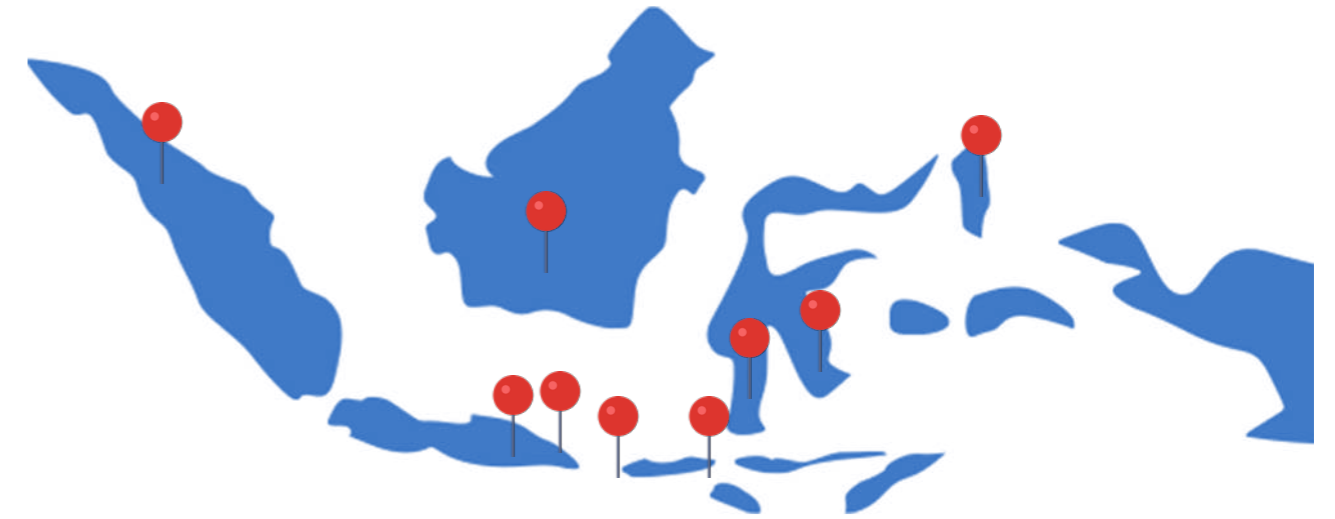
PPATK selaku *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT juga turut membantu penegak hukum melalui kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara (asistensi) TPPU yang sedang dilakukan.

Selama periode Januari s.d. Desember 2023, PPATK telah menyelenggarakan kegiatan Koordinasi sebanyak **137 pertemuan**, terdiri dari



Gambar 12 Asistensi Penanganan Perkara TPPU

Selanjutnya, PPATK juga telah melaksanakan pemberian dukungan penanganan perkara (asistensi) sebanyak 11 kegiatan yang dilaksanakan di berbagai wilayah, yaitu **Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Bali, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat.**



Kegiatan asistensi ini bertujuan untuk mendukung penanganan perkara yang dilakukan oleh penegak hukum terkait TPPU dan/atau Tindak Pidana Asal Korupsi, Narkotika, Penipuan, Penggelapan, ITE atau Business Email Compromise (BEC), Perdagangan Orang, Perjudian, agar dapat membuat terang tindak pidananya.

Adapun setelah asistensi dilaksanakan, terdapat perubahan status atas perkara yang dilakukan asistensi, antara lain:



KERJA SAMA INTERNASIONAL

Praktik pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal bukan hanya masalah nasional. Praktik tersebut sudah merambah di skala internasional. Oleh karenanya, PPATK terus membangun kerja sama baik di tingkat regional, bilateral maupun multilateral.

a. Kerja Sama Regional

(1) Partisipasi dan kontribusi aktif dalam forum regional dimana PPATK menjadi *focal point* seperti:

Kerja sama Regional dalam APG:

- Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yaitu APG Assessor Training secara fisik di Jepang pada 13-17 Maret 2023 dan Webinar APG tentang *Transparency of Beneficial Ownership* pada 30 Maret 2023
- APG Annual Meeting and Technical Assistance secara tatap muka di Vancouver, Kanada pada 9 s.d. 14 Juli 2023.
- Rapat APG VA/VASP Network focus on risk assessment secara virtual pada 24 Agustus 2023
- 24th APG Annual Typologies & Capacity Building Workshop di New Delhi, India, pada tanggal 28 November - 1 Desember 2023
- APG Governance Committee (GC) Meeting secara virtual dan fisik pada Mei, Juli, September, dan Desember 2023.
- APG Operational Committee (OC) Meeting secara virtual dan fisik pada Mei, Oktober, dan Desember 2023.
- APG Mutual Evaluation Committee (MEC) Meeting secara virtual dan fisik pada April, Mei, Juni, Juli, September, dan November 2023.

Kerja sama Regional dalam FICG:

- Financial Intelligence Consultative Group (FICG) Meeting secara tatap muka di Singapura yang dilaksanakan pada tanggal 14-17 Februari 2023.
- Rapat koordinasi secara virtual pada 29 Maret 2023 dengan Tim Information Sharing Platform (ISP) Working Group FICG (Indonesia, Malaysia, Australia, Brunei Darussalam, Singapura, Selandia Baru dan Filipina) membahas mengenai tindak lanjut hasil pertemuan FICG Meeting di Singapura.
- Rapat koordinasi di Singapura pada 14-16 Maret 2023 dengan Bank Negara Malaysia (FIU Malaysia) dan STRO (FIU Singapura) terkait hasil kegiatan FICG Meeting Singapura terkait *Multi Jurisdictional Anti-Fraud*.
- FICG Meeting secara virtual pada 2 Agustus 2023

(2) Kerja sama regional dalam Project yang diselenggarakan oleh APG, yaitu APG *Virtual Asset/Virtual Asset Service Provider* (VA/VASP) Project yang telah melaksanakan 3 kali pertemuan virtual, yaitu:

i) APG VA/VASP Network Meeting perdana pada 11 Mei 2023 yang membahas *Overview and purpose of VA/VASP Network*.

ii) APG VA/VASP Network Meeting pada 23 Agustus 2023 yang fokus pada penilaian risiko (*risk assessment*) terkait *Virtual Asset/Virtual Asset Service Provider* (VA/VASP).

iii) APG VA/VASP Network Meeting pada 15 Desember 2023 yang fokus pada *the financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PF) through virtual assets* (VA).

(3) Partisipasi dan kontribusi aktif dalam forum regional yang dikoordinasikan oleh K/L lain yang membahas hal-hal berkaitan Rezim APU-PPT:

i) Konferensi UNODC Regional terkait NPOs dan TPPT secara tatap muka di Thailand tanggal 21-24 Februari 2023.

ii) *Second Negotiating Round of Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity*

(IPEF) secara virtual pada 13-17 Maret 2023.

iii) Rapat dengan European Union dan Global Facility pembahasan program kerja sama APU-PPT secara fisik di kantor PPATK pada 23 Agustus 2023.

b. Kerja Sama Bilateral

(1) Dukungan penyusunan kertas posisi bagi Delri untuk Bilateral Meeting Keanggotaan FATF:

i) Kunjungan ke US Treasury, Washington DC, 31 Januari 2023

ii) FATF Plenary Februari, Paris, tgl 20-23 Februari 2023

iii) FATF Plenary Juni, Paris, tgl 19-23 Februari 2023

iv) FATF Plenary Oktober, Paris, tgl 25-27 Oktober 2023

(2) Dukungan penyusunan kertas posisi Delri dalam pertemuan bilateral dari K/L lain:

i) Dukungan rekomendasi kertas posisi Bilateral Meeting dalam kegiatan Kemlu, antara lain:



- Kegiatan JCBC RI – China, tgl 16 Februari 2023

- *Strategic Dialogue* RI – Jepang, tgl 16 Februari 2023

- *Joint Commission* RI – Korea, tgl 17 Feb 2023

- Kerjasama RI – negara Balkan, tgl 16 Maret 2023

- Kunjungan Kerja Iran, tgl 5 Mei 2023

ii) Dukungan rekomendasi kertas posisi *Bilateral Meeting* dalam kegiatan BNPT, antara lain:

- Indonesia-Australia *Deep Dive on FTF*, tgl 4 September 2023

- *Joint Working Group (JWG)* RI-Vietnam, tgl 19-22 Desember 2023.

iii) Dukungan rekomendasi kertas posisi dalam *Extradition Treaty* dan *MLA Request Template* kegiatan Kemenkumham, antara lain:

- *Asean Extradition Treaty* dalam ASLOM WG, tanggal 12 – 18 Maret 2023.

- *MLA Request Template* dalam

SOM – MLAT, tanggal 12 – 18 Maret 2023.

iv) Dukungan rekomendasi kertas posisi dalam kegiatan internasional Kemenkopolhukam, antara lain:

- *Asean Extradition Treaty* dalam ASLOM WG, tanggal 12 – 18 Maret 2023

- *MLA Request Template* dalam SOM – MLAT, tanggal 12 – 18 Maret 2023

(3) Dukungan optimalisasi kerjasama operasional antara PPAK dengan FIU / counterpart asing lainnya, antara lain:

- Fasilitasi Kunjungan ke *United States (US) Treasury*, tgl 31 Januari 2023

- Fasilitasi Rapat *Casework Meeting* dengan AFP Australia, tgl 8 Feb 2023

- Fasilitasi kunjungan PPAK ke Kamboja, tanggal 20-23 Februari 2023

- Fasilitasi kunjungan PPAK ke Filipina, tanggal 20-24 Februari 2023

- Fasilitasi Rapat *Casework Meeting* dengan FIU Malaysia, tgl 17 Mar 2023

- Fasilitasi Rapat *Casework Meeting* dengan FBI USA, tgl 27 Mar 2023

- Fasilitasi Rapat *Casework Meeting* dengan FIU Spanyol, tgl 30 Mar 2023

- Fasilitasi *Sharing Knowledge* dengan FIU Nigeria, tgl 9 Mei 2023

- Fasilitasi *Casework Meeting* dengan FIU Thailand, tgl 6 Juli 2023

- Fasilitasi Rapat Dwi Bulanan dengan AUSTRAC, tgl 7 Agustus 2023

- Fasilitasi Rapat Bilateral dengan MJIB Taiwan, tgl 8 Agustus 2023

- Fasilitasi Rapat Dwi Bulanan dengan AUSTRAC, tgl 4 Oktober 2023

- Fasilitasi Rapat dengan Spanyol (*Guardia Civil*), tgl 2 November 2023

- Fasilitasi Kunjungan CENTINEL, tgl 3 November 2023

Fasilitasi Rapat Bilateral dengan FBI dan US Embassy, tgl 22 November 2023

(4) *Technical assistance* dan dukungan keanggotaan FIU di forum internasional antara lain:

- Pembahasan hasil *on-site visit* dan Keang-

gotaan FIU Laos di Egmont Group tanggal 31 Januari 2023.

- *Onsite Visit* ke FIU Timor Leste tanggal 13-16 Maret 2023 dan pembahasan

dalam Egmont *Plenary* Juli 2023.

- Kunjungan FIU Timor Leste dalam rangka *technical assistance* tanggal 11-12 Desember 2023.

(5) Pada tahun 2023, SERASI telah mendorong penandatanganan *MoU*

internasional, yaitu *MoU* antara PPAK dengan FMU Pakistan dengan

rangkaian kegiatan diantaranya:

a) Rapat koordinasi antara PPAK, Kemlu, KBRI Islamabad, tgl 5 Mei 2023

b) Rapat teknis dengan FMU Pakistan, Kemlu, dan KBRI, tgl 17 Mei 2023

c) Seremoni Penandatanganan *MoU*, tgl 6 Juni 2023

d) Penandatanganan penuh *MoU* oleh FMU Pakistan secara sirkuler, tanggal 1 November 2023.



c. Kerja Sama Multilateral

(1) Koordinasi strategi Indonesia dalam pemenuhan rencana aksi Indonesia dalam proses Keanggotaan Indonesia di FATF:

i) FGD Finalisasi Tanggapan Indonesia atas *Progress Report* Implementasi *Action Plan* Indonesia untuk IO 3, 8 dan 11 pada 30 Agustus – 1 September 2023.

ii) FGD Pembahasan Perkembangan Pemenuhan *Action Plan* FATF di sektor pengawasan institusi finansial dibawah OJK (IO 3) pada 10 Agustus 2023.

iii) Rapat Penetapan Elemen Data dalam rangka Finalisasi Buku Pedoman Bimtek tentang Penggunaan Aplikasi SISPEKA PPATK dan E-MP Bareskrim Polri (IO 8) pada 15 Agustus 2023.

iv) Rapat European Union (EU) *Scoping Note* untuk mengatasi defisiensi Indonesia terkait Rec. 8 pada 10 November 2023.

(2) Koordinasi dengan K/L terkait mengenai posisi Indonesia dan kontribusi Indonesia dalam working group di organisasi internasional:

i) Rapat Pokja pembahasan Keanggotaan Indonesia di FATF dan penyampaian kontribusi Indonesia pada 9 Agustus 2023.

ii) Menghadiri UNODC 8th GoAML *International User Group Meeting* di Vienna, Austria (23 – 25 Oktober 2023).

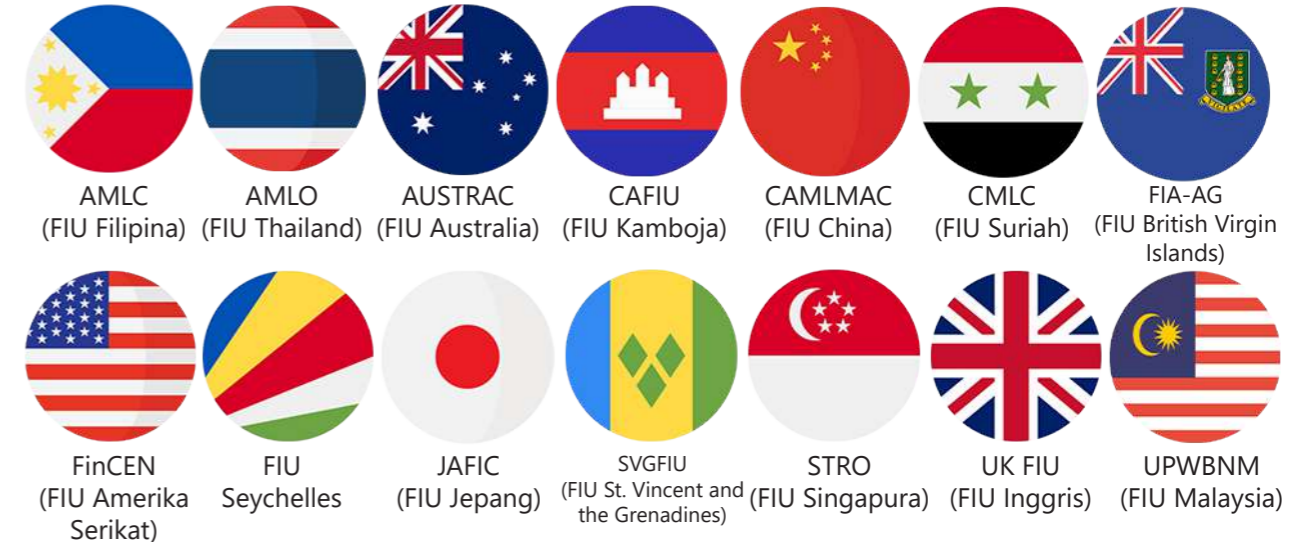
iii) Inagurasi dan pembahasan teknis Tim Bersama FATF pada 7 & 8 Desember 2023.

SALING TUKAR INFORMASI

PPATK memiliki peran penting dalam penelusuran aset hasil kejahatan melalui pendekatan *follow the money*. Peran penting dan strategis PPATK dalam program *assets recovery* terutama dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran aset (*assets tracing*), baik pada waktu proses analisis transaksi keuangan maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terdakwa di sidang peradilan.

Untuk menelusuri aset hasil kejahatan yang ditempatkan pelaku tindak pidana di luar negeri dapat dilakukan melalui tukar menukar informasi dengan FIU lain baik atas dasar *Memorandum of Understanding* (MoU) ataupun resiprositas, dengan menggunakan norma-norma yang diatur oleh Egmont Group atau sesuai dengan ketentuan yang ada dalam MoU.

Sepanjang tahun 2023, terdapat 48 *outgoing request* dari PPATK ke 23 FIU negara lain, antara lain kepada :



PPATK 4th LEGAL FORUM

“Urgensi *Regulatory Technology* dan *Digital Evidence* Dalam Mendukung Efektivitas penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)”

Seiring dengan perkembangan teknologi yang terjadi di dunia, terdapat peningkatan penggunaan teknologi finansial (*fintech* atau tekfin) salah satunya pada sektor jasa keuangan. Adanya transformasi digital dari layanan keuangan tersebut perlu diimbangi dengan penerapan *Regulatory Technology* atas penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) pada sektor jasa keuangan.

PPATK menilai bahwa transformasi digital yang saat ini berkembang di Indonesia, khususnya transformasi digital pada sektor jasa keuangan makin diminati oleh Masyarakat, setidaknya dikarenakan 3 (tiga) hal yaitu: transformasi digital memberikan kemudahan bertransaksi dikarenakan *less requirement*, kecepatan bertransaksi dikarenakan *less verification*, dan kemudahan transaksi lintas batas negara atau *border less*. Namun demikian, perlu diingat bahwa potensi manfaat yang ditawarkan oleh *fintech*/tekfin juga tidak lepas dari risiko. Berbagai risiko menjadi perhatian regulator serta penyelenggara *fintech*/tekfin dalam upaya untuk menciptakan kenyamanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri digital. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai

macam risiko diantaranya risiko hukum, risiko perlindungan data pribadi dan risiko keamanan siber.

Dalam upaya memerangi kejahatan elektronik serta untuk mengumpulkan bukti digital (*digital evidence*) yang relevan untuk semua kejahatan, lembaga penegak hukum akan menggabungkan pengumpulan bukti digital dan pelaksanaan analisis bukti digital (forensik komputer) ke dalam infrastruktur yang dimiliki. Melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi pada penerapan program APU-PPT tersebut, diharapkan dapat mendukung efektivitas penegakan hukum khususnya terkait dengan pembuktian pada setiap tahapan penegakan hukum atas bukti digital tersebut.



Gambar 13 Foto Bersama Kegiatan PPATK 4th Legal Forum

DUKUNGAN PPATK DALAM PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

Sepanjang tahun 2023 PPATK telah melaksanakan pemberian keterangan ahli sebanyak 165 Perkara yang berasal dari POLRI, Kejaksaan, BNN, KPK, Direktorat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan KLHK. Termasuk diantaranya pemberian keterangan ahli untuk tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan permintaan dari Detasemen Khusus 88 anti terror. Adapun mayoritas permintaan keterangan ahli yang kami terima pada tahun 2023 berasal dari POLRI dan Kejaksaan, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan sidang pengadilan.

Adapun dukungan PPATK dalam pemberian keterangan ahli dari PPATK telah secara efektif mendorong efektivitas penegakan hukum TPPU di Indonesia, antara lain pada:

- Kasus TPPU dengan tindak pidana asal narkoba oleh jaringan Fredy Pratama;
- Kasus TPPU dengan pidana asal korupsi yang dilakukan oleh sejumlah penyelenggara negara, antara lain kasus BTS 4G dan kasus terdakwa atas nama RAT; dan
- Kasus investasi bodong Net 89 dan beberapa kasus pencucian uang yang memanfaatkan sarana *cryptocurrency*/mata uang digital.



Gambar 14 Pemberian keterangan Ahli di Pengadilan



PELUNCURAN DAN DISKUSI BUKU PINTAR PENANGAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PPATK telah melaksanakan kegiatan Peluncuran dan Diskusi Buku Pintar Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada tanggal 12 Desember 2023 di Hotel Bidakara Jakarta. Adapun kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan sumber literasi dan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara TPPU, serta meningkatkan peranan PPATK sebagai *focal point* rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dalam mendukung keberhasilan penyidikan dan penuntutan TPPU.

Dalam Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ibu Dr. Tuti Wahyuningsih selaku Deputy Bidang Strategi dan Kerja Sama PPATK, Serta Jupriyadi selaku Hakim Agung Mahkamah Agung RI, dan Andi Herman selaku Sekretaris Jampidsus Kejaksaan Agung RI. Sedangkan yang hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Yazid Nurhuda selaku Direktur Penegakan Hukum Pidana LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Fithriadi Muslim selaku Direktur Hukum dan Regulasi PPATK, dan Lila Agustina selaku Koordinator Jampidsus Kejaksaan Agung RI.



Gambar 15 Foto Bersama Kegiatan Launching Buku Pintar

Dalam sambutannya Deputy Bidang Strategi dan Kerja Sama PPATK, Dr. Tuti Wahyuningsih menyampaikan bahwa "Pasal TPPU masih jarang untuk diterapkan, karena aparat penegak hukum masih cukup puas dengan tindak pidana asal saja, Padahal untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana, misalnya pada koruptor lebih efektif dengan penerapan delik TPPU. Dengan penerapan delik TPPU, aset yang disembunyikan atau kepemilikannya bisa dirampas untuk dikembalikan ke kas negara" ungkapnya. Kemudian Hakim Agung Kamar Pidana, Jupriyadi menyampaikan bahwa "salah satu alasan masih sedikitnya penerapan pasal TPPU dikarenakan sudut pandang penegak

hukum yang belum sama dan utuh dalam mengkonstruksikan TPPU" lanjutnya. Dengan adanya buku saku penanganan perkara TPPU yang diterbitkan oleh PPATK, maka Hakim Agung Kamar Pidana, Jupriyadi berharap ke depannya penanganan perkara TPPU bisa lebih baik lagi. Adapun kegiatan tersebut dihadiri oleh 100 orang perwakilan Aparat Penegak Hukum yang berasal dari: Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Otoritas Jasa Keuangan, Tentara Nasional Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Gambar 16 Sambutan Deputy Strategi dan Kerjasama

DISEMINASI PPATK

Pengamanan Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara Melalui Pelaksanaan Penundaan Transaksi, Penghentian Sementara Transaksi dan Pemblokiran Transaksi

Sistem keuangan global memiliki kerentanan terhadap praktik pencucian uang, hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya koordinasi dan standar keamanan yang seragam di seluruh dunia. Selain itu, pelaku pencucian uang juga memanfaatkan kelemahan disisi pengawasan dan pelaporan transaksi keuangan. Seiring dengan perkembangan zaman dan transformasi digital, aset kripto juga memberikan peluang baru bagi pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul dana, mengingat transaksi kripto bersifat anonim sehingga dapat mempersulit upaya penegakan hukum.

Kesadaran akan ancaman pencucian uang dan pendanaan terorisme telah mendorong peningkatan kerja sama internasional guna mengatasi masalah tersebut. Financial Action Task Force (FATF) telah bekerja sama dengan negara anggota untuk mengembangkan standar dan praktik terbaik dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pencegahan pencucian uang memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat internasional. Keamanan dan integritas sistem keuangan global merupakan kunci untuk mengurangi praktik pencucian uang di seluruh dunia.



Gambar 16 Foto Bersama Kegiatan Diseminasi Penghentian Sementara Transaksi

Indonesia telah menjadi anggota ke-40 dari FATF pada tahun 2023. Upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme senantiasa dilakukan, diantaranya melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

UU TPPU telah memberikan instrumen hukum untuk pengamanan hasil tindak pidana, antara lain melalui penundaan transaksi oleh penyedia jasa keuangan, penghentian sementara transaksi oleh PPATK, penundaan transaksi oleh instansi penegak hukum, serta penyitaan dan perampasan atas aset yang tidak diketahui tersangkanya atau terdakwanya meninggal dunia.

Upaya pengamanan aset di awal proses intelijen dan penegakan hukum merupakan langkah otoritas untuk efektivitas penyelamatan aset hasil tindak pidana (*asset recovery*) yang berasal dari tindak pidana ekonomi dan *transnational organized crime/kejahatan transnasional terorganisasi*. Upaya pengamanan hasil tindak pidana lintas batas negara dilakukan melalui pelaksanaan penundaan transaksi, penghentian sementara transaksi dan pemblokiran transaksi tersebut menunjukkan adanya kolaborasi dan sinergi yang baik antara sektor publik dengan sektor privat, yang pada akhirnya akan memperkuat rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di Indonesia.



Gambar 17 Talkshow Diseminasi PPATK Penghentian Sementara Transaksi



SETIA

Memberikan Dukungan
Manajemen



RINGKASAN KEUANGAN

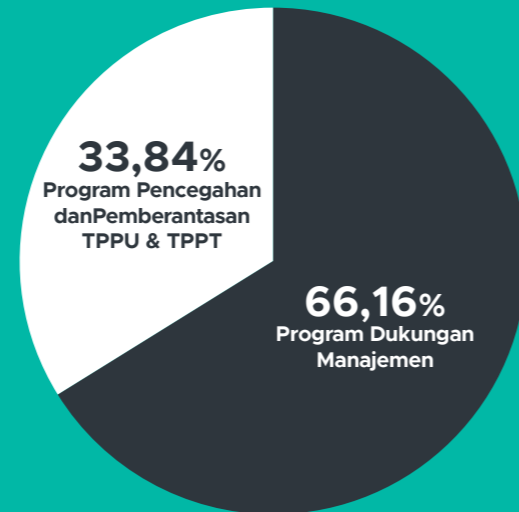
ANGGARAN

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada tahun 2023 berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) PPATK nomor SP DIPA-078.01-0/2023 tanggal 30 November 2022 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp292.016.662.000,00 yang digunakan untuk membiayai dua program yaitu:

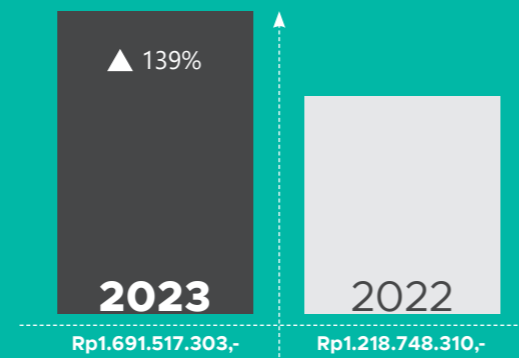
1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp193.207.316.000,00.
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme sebesar Rp98.809.346.000,00.

Pada Semester I Tahun 2023 PPATK telah melakukan realisasi pendapatan PPATK untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp776.843.503,00. Sedangkan, realisasi belanja PPATK untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp129.086.160.210,00 atau mencapai 44,21% dari alokasi anggaran sebesar Rp292.016.662.000,00.

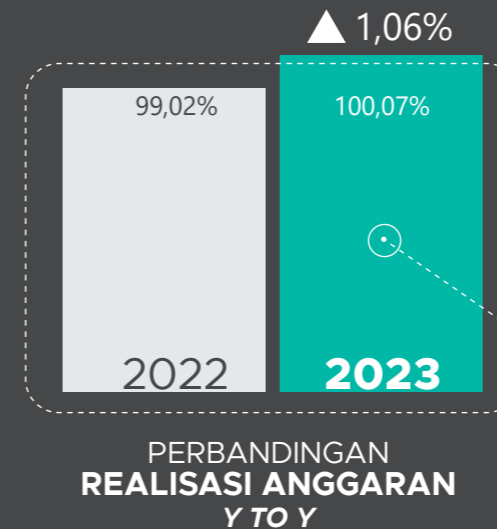
STRUKTUR ANGGARAN TAHUN 2023 Rp292.016.662.000,00



PERBANDINGAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK Y TO Y



Berikut perbandingan persentase penyerapan terhadap anggaran dibandingkan tahun 2022

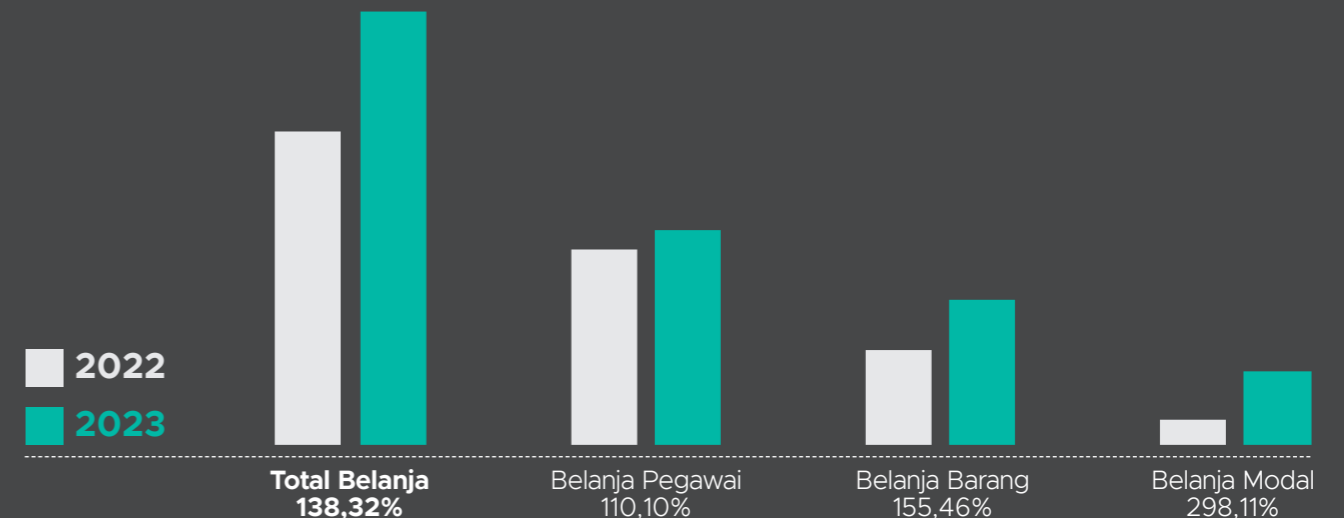


RINCIAN REALISASI BELANJA 2023



PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN Y TO Y

PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 TERHADAP 2022



LAPORAN Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 ini telah disusun dan dijelaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur

pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan PPATK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.691.517.303. Realisasi Belanja PPATK untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp295.324.440.555 atau mencapai 100,07% dari alokasi anggaran sebesar Rp295.106.419.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATA-TAN	31 Desember 2023		PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	1.691.517.303	0,00	1.218.748.310
JUMLAH PENDAPATAN		-	1.691.517.303	0,00	1.218.748.310
BELANJA					
	B.2.				
Belanja Pegawai	B.2.1	146.125.064.000	146.522.906.500	100,27	133.080.013.207
Belanja Barang	B.2.2	99.290.090.000	99.117.426.538	99,83	63.756.378.703
Belanja Modal	B.2.3	49.691.265.000	49.684.107.517	99,99	16.666.457.530
JUMLAH BELANJA		295.106.419.000	295.324.440.555	100,07	213.502.849.440

Tabel 4. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	
			Rp	%
ASET				
Aset Lancar	11.879.816.639	7.932.350.096	3.947.466.543	49,76
Aset Tetap	496.022.513.127	476.447.587.360	19.574.925.767	4,11
Aset Lainnya	3.981.967.756	6.895.914.396	(2.913.946.640)	(42,26)
JUMLAH ASET	511.884.297.522	491.275.851.852	20.608.445.670	4,19
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	1.639.222.662	421.653.201	1.217.569.461	288,76
JUMLAH KEWAJIBAN	1.639.222.662	421.653.201	1.217.569.461	288,76
EKUITAS				
Ekuitas	510.245.074.860	490.854.198.651	19.390.876.209	3,95
JUMLAH EKUITAS	510.245.074.860	490.854.198.651	19.390.876.209	3,95
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	511.884.297.522	491.275.851.852	20.608.445.670	4,19

NERACA

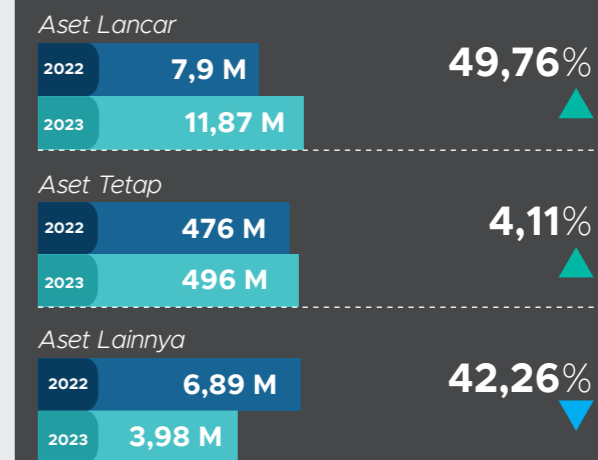
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022.

Nilai Aset PPATK per 31 Desember 2023 dicatat dan dijelaskan sebesar Rp511.884.297.522 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp11.879.816.639, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp496.022.513.127, dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan/amortisasi) sebesar Rp3.981.967.756.

Nilai Kewajiban PPATK seluruhnya tersaji sebesar Rp1.639.222.662 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas PPATK

tersaji sebesar Rp1.639.222.662. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 4.

NERACA KEUANGAN



Tabel 5. Ringkasan Laporan Operasional
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATA-TAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				Rp	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN		388.153.121	234.845.803	153.307.318	65,28
BEBAN		279.387.879.156	244.282.527.635	35.105.351.521	14,37
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(278.999.726.035)	(244.047.681.832)	(34.952.044.203)	14,32
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(523.191.383)	1.324.322.184	(1.847.513.567)	(139,51)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(279.522.917.418)	(242.723.359.648)	(36.799.557.770)	15,16
POS LUAR BIASA		-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(279.522.917.418)	(242.723.359.648)	(36.799.557.770)	15,16

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp388.153.121, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp279.387.879.156, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp278.999.726.035). Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp30.177.560.590, sehingga Defisit-LO terjadi sebesar (Rp248.822.165.445).

Ringkasan Laporan Operasional untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 5.

NERACA OPERASIONAL

Defisit dari Kegiatan Operasional:
Rp**278.999.726.035,00**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Rp**30.177.560.590,00**

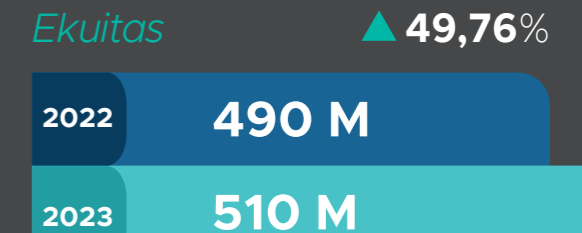
Defisit Laporan Operasional
Rp**248.822.165.445,00**

Tabel 6. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATA-TAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				Rp	%
EKUITAS AWAL	E.1	490.854.198.651	507.788.325.127	(16.934.126.476)	(3,33)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(279.522.917.418)	(242.723.359.648)	(36.799.557.770)	15,16
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(716.729.625)	(83.729.364)	(633.000.261)	756,01
Koreksi Atas Reklasifikasi		-	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset		-	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		(680.501.999)	(85.760.304)	(594.741.695)	693,49
Lain-lain		(36.227.626)	2.030.940	(38.258.566)	100,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	299.630.523.252	225.872.962.536	73.757.560.716	32,65
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		19.390.876.209	(16.934.126.476)	36.325.002.685	(214,51)
EKUITAS AKHIR	E.5	510.245.074.860	490.854.198.651	19.390.876.209	3,95

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp490.854.198.651 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp248.822.165.445). Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas (Rp31.417.481.598) dan Transaksi Antar-Entitas senilai total Rp299.630.523.252, sehingga Ekuitas entitas pada 31 Desember 2023 adalah senilai Rp510.245.074.860. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 6.



PERUBAHAN EKUITAS

menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

OPINI LAPORAN KEUANGAN PPATK

OPINI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian/ lembaga. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan bebas dari salah saji material.

Pada tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) PPATK tahun 2020-2024, capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini mencapai 100%. Capaian kinerja sudah sesuai dengan target kinerja. Untuk meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam

Opini BPK atas Laporan Keuangan PPATK harus melalui sistem pemantauan dan pengendalian keuangan yang baik dengan mengutamakan prinsip transparansi. Transparansi yang dimaksud adalah dalam menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang harus disertai dengan bukti-bukti transaksi yang relevan dan valid.

Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 32/S/IV-XVV06/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2022 menyatakan bahwa Laporan Keuangan PPATK menyajikan secara wajar, dalam hal semua yang material, posisi keuangan PPATK pada tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, serta Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan surat tersebut, Laporan Keuangan PPATK Tahun 2022 dinyatakan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Berdasarkan Tabel 3.2, diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023, yaitu opini WTP sama dengan target kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel 3. 2 Capaian Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan PPATK tahun 2020-2023

Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan PPATK.	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5 Indeks	5 Indeks	5 Indeks	5 Indeks	5 Indeks
Realisasi	5 Indeks	5 Indeks	5 Indeks	5 Indeks	-
Capaian	100%	100%	100%	100%	-
Capaian yang diakui	100%	100%	100%	100%	-

Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan PPATK tahun 2023 terhadap target tahun 2024

IKK	Target					Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi Dibanding Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan PPATK.	5 Indeks	5 Indeks	5 Indeks	5 Indeks	5 Indeks	5 Indeks	100%

Berdasarkan Tabel 3.3, PPATK telah berhasil 100% mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan Opini BPK atas Laporan Keuangan PPATK. Predikat ini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan PPATK. Keberhasilan ini merupakan capaian ke-17 kali berturut-turut

bagi PPATK dalam memperoleh opini WTP. Namun demikian, masih terdapat beberapa rekomendasi BPK yang masih dalam proses tindak lanjut sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian, sebagai berikut:



1. Menginstruksikan Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan untuk melakukan pembinaan kepada Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi atas kelalaiannya, dan selanjutnya agar mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan.
2. Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyetorkan ke Kas Negara atas:
 - kerugian pembayaran pada Pekerjaan Konsultan Perencana sebesar Rp38,98 juta; dan
 - kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Pengecatan Gedung Pusat Pusdiklat APU-PPT TA 2022 sebesar Rp34,93 juta.

Catatan: Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan telah memberikan pembinaan berupa teguran kepada Direktur Pengawasan Kepatuhan melalui rapat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2023 dan telah terdapat rekapitulasi PBJ yang telah dikenakan sanksi beserta 5 contoh dokumen penganan sanksi.

Catatan: Pada tanggal 22 November 2023, PPK Pusdiklat APU-PPT telah mengirimkan surat peringatan kedua penyelesaian kewajiban pembayaran terhadap kelebihan pembayaran pada pekerjaan pengecatan gedung Pusdiklat APU-PPT TA 2022 kepada Direktur CV. Tiqa Cemerlang.

Capaian IKK 2023

Opini BPK atas Laporan Keuangan PPATK

Target	5 Indeks
Realisasi	5 Indeks



Capaian
100%

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PPATK

NILAI sistem akuntabilitas kinerja PPATK adalah nilai dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja PPATK selama periode tertentu. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PPATK diukur melalui kesesuaian penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja di PPATK dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun keempat pelaksanaan Renstra PPATK tahun 2020-2024, capaian kinerja IKK ini mencapai 94,32%. Pada tahun 2023 Nilai sistem akuntabilitas kinerja PPATK sebesar

78,29 dengan predikat BB (sangat baik). Secara presentase, capaian kinerja ini sudah baik, meskipun belum berhasil mencapai target kinerja. Namun demikian, masih diperlukan strategi-strategi yang harus dilaksanakan oleh PPATK terkait pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja PPATK agar dapat meraih nilai sesuai dengan target kinerja sampai dengan akhir periode Renstra PPATK tahun 2020-2024.

Berdasarkan Tabel 3.4, diketahui bahwa realisasi kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PPATK tahun 2023 sebesar 78,29 atau mengalami peningkatan dari realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 0,23%.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja PPATK

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PPATK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	80,10	81	82	83	84
Realisasi	77,40	77,80	78,11	78,29	-
Capaian	96,63%	96,05%	95,26%	94,32%	-

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi IKK Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PPAK Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

IKK	Target					Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi Dibanding Target Tahun 2024
	2020	2021	2023	2023	2024		
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PPAK	80,10	81	82	83	84	78,29	93,20%

Berdasarkan Tabel 3.5, diketahui bahwa realisasi nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PPAK sebesar 78,29 atau tercapai sebesar 93,20% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Nilai 78,29 tersebut merupakan hasil penilaian atas evaluasi penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja PPAK tahun 2022 berdasarkan surat dari Kementerian PAN dan RB Nomor B/116/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023. Berikut ini disampaikan hasil evaluasi atas penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja PPAK tahun 2019-2021 dari Kementerian PAN dan RB:

Tabel 3. 6 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PPAK

Komponen yang Dinilai	Bobot	Tahun		
		2019	2020	2021
a. Perencanaan Kinerja	30	25,08	25,19	25,23
b. Pengukuran Kinerja	25	18,70	18,78	18,93
c. Pelaporan Kinerja	15	11,50	11,57	11,67
d. Evaluasi Internal	10	8,23	8,26	8,26
e. Capaian Kinerja	20	13,35	13,60	13,71
Nilai Hasil Evaluasi	100	76,86	77,40	77,80
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB
Interpretasi		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian evaluasi atas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berikut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja PPAK Tahun 2022-2023.

Tabel 3.7 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PPAK

Komponen yang Dinilai	Bobot	Tahun	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	25,20	25,35
b. Pengukuran Kinerja	30	22,50	22,69
c. Pelaporan Kinerja	15	11,76	11,48
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,65	18,77
Nilai Hasil Evaluasi	100	78,11	78,29
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB
Interpretasi		Sangat Baik	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.7, dapat disampaikan bahwa capaian nilai SAKIP PPAK selama tahun 2019-2023 mengalami tren kenaikan, meskipun kenaikan nilai tersebut tidak cukup signifikan. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja nilai SAKIP PPAK, antara lain:

1. Sistem akuntabilitas kinerja telah ditetapkan sebagai pelaksanaan manajemen kinerja sektor publik. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan penerapan SAKIP terutama pada pengukuran kinerja, namun penerapannya belum sepenuhnya

menggambarkan efektivitas penggunaan anggaran apabila dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan. Pada level unit kerja masih ditemukan beberapa perumusan sasaran strategis yang belum sepenuhnya berorientasi hasil/*outcome*, indikator kinerja belum sepenuhnya relevan dan cukup, dan keterpaduan perencanaan kinerja belum sepenuhnya berjalan;

2. Penjenjangan kinerja (*performance cascade*) telah dilakukan dari tingkat lembaga ke eselon I dan II. Namun, penjenjangan kinerja yang dilakukan belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan CSF (*critical success factor*) untuk menguraikan kinerja level strategis sampai ke level kinerja operasional, sehingga belum cukup menggambarkan keterkaitan antar jenjang kinerja dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi;
3. Mekanisme *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja dan rencana aksi secara berkala belum dimanfaatkan dalam pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) baik untuk keseluruhan organisasi maupun individu;

4. Pemetaan *crosscutting* lintas unit kerja dalam mendukung pencapaian kinerja lembaga belum sepenuhnya menyentuh aspek implementasi yang efektif dan efisien serta belum optimal dalam mendorong pelaksanaan perencanaan kinerja yang terintegrasi;
5. Evaluasi internal telah dilakukan inspektorat kepada seluruh unit kerja untuk mendukung perbaikan dalam penerapan SAKIP unit kerja. Namun, hasil evaluasi tersebut yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi evaluasi internal belum sepenuhnya dijadikan bahan perbaikan dalam perencanaan kinerja oleh unit kerja sehingga dampak perbaikan bagi unit kerja belum optimal.

PPATK telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yang antara lain:

1. PPATK telah menyesuaikan sasaran kinerja, indikator kinerja kegiatan, perbaikan rumusan penghitungan kinerja, serta penyesuaian terhadap perubahan organisasi dan tata kerja PPATK berdasarkan Peraturan PPATK No 5 Tahun 2022 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melalui Rencana Strategis PPATK Tahun 2023-2024.

2. PPATK telah menyusun rancangan perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja pada PPATK dengan menyesuaikan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB No 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sehingga diharapkan capaian kinerja organisasi dapat diturunkan kedalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masing-masing individu.
3. Mengintensifkan kegiatan pendampingan kepada pengelola kinerja seluruh unit kerja dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.
4. *Monitoring* dan evaluasi atas capaian *output* dan kinerja triwulanan dan penyusunan laporan kinerja pada masing-masing unit kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, Kementerian PAN dan RB merekomendasikan hal-hal, sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh indikator kinerja, khususnya indikator kinerja *supporting* pada perjanjian kinerja eselon dua agar menetapkan kondisi kinerja yang akan diukur pencapaiannya sehingga dokumen perjanjian kinerja menjadi lebih berkualitas sesuai dengan kaidah penyusunan perencanaan kinerja;
2. Mereviu kembali penjenjangan kinerja yang dimiliki agar dapat menggambarkan hubungan *logis/logical framework* antar level kinerja, khususnya dengan memastikan adanya *critical success factor* pada penjenjangan kinerja level kedeputian dengan direktorat sehingga akan tercipta perencanaan kinerja yang sinergi dan kolaboratif;
3. Mendorong adanya pemetaan *crosscutting* kinerja yang melibatkan peran serta instansi pemerintah lain dalam menunjang kinerja utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sehingga akan

diketahui sejauh mana pengaruh kinerja sektor lainnya;

4. Memastikan kembali penyusunan matriks peran hasil yang dimiliki agar dapat menjaga pola hubungan kinerja yang saling terkait antara kinerja individu dan kinerja unit kerja sehingga akan terlihat peran dan kontribusi setiap individu pada pencapaian kinerja organisasi/unit kerja;
5. Memastikan kembali rumusan formulasi perhitungan indikator kinerja yang dimiliki agar sesuai dengan penggambaran indikator kinerja yang dikawal sehingga data kinerja yang dikumpulkan menjadi berkualitas dan andal;
6. Mendorong adanya pelaksanaan pengukuran kinerja yang menggambarkan *monitoring* dan evaluasi terkait pencapaian kinerja strategis baik level pusat sampai level unit kerja dengan cara mengoptimalkan aplikasi e-RKA yang dimiliki;
7. Menyempurnakan kualitas informasi dalam laporan kinerja pada sebagian unit kerja dengan memastikan penyajian analisis pencapaian kinerja secara lengkap, khususnya analisis terkait upaya perbaikan ke depan yang akan dilakukan serta potensi

Capaian IKK 2023

Opini BPK atas Laporan Keuangan PPATK

Target	5 Indeks
Realisasi	5 Indeks



Capaian
100%

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PPATK

Target	83,00
Realisasi	78,29



Capaian
94,32%

efisiensi sumber daya yang dilakukan dalam merealisasikan kinerja;

8. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja untuk dijadikan dasar memperbaiki strategi serta aktivitas dalam perencanaan kinerja sehingga realisasi pencapaian kinerja dapat meningkat tiap tahunnya;
9. Mendorong inspektorat untuk meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

dengan cara memberikan temuan dan rekomendasi secara spesifik pada setiap unit kerja sehingga dapat diketahui sejauh mana kondisi implementasi SAKIP pada setiap unit kerja;

10. Mendorong adanya pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai dasar penetapan *reward and punishment* khususnya untuk menggambarkan salah satu ukuran keberhasilan penilaian kinerja unit kerja.



Nilai Kinerja Anggaran

96,15 Berpredikat
Sangat Baik

NILAI KINERJA ANGGARAN

NILAI Kinerja Anggaran merupakan hasil kerja yang dicapai PPATK dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pelaksanaan anggaran berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Berdasarkan PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, nilai kinerja anggaran reguler diukur berdasarkan tiga aspek yaitu **aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks**. Nilai kinerja anggaran tingkat Kementerian/Lembaga diperoleh berdasarkan rata-rata dari:

- Nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat tingkat Kementerian/Lembaga; dan
- Rata-rata nilai kinerja anggaran tingkat eselon I/program lingkup kewenangan Kementerian/Lembaga terkait.

Tahun 2023, merupakan tahun pertama penilaian atas Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan Peraturan PPATK No 1 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2023-2024. Nilai Kinerja

Anggaran PPATK Tahun 2023 memperoleh hasil 96,15. Hasil tersebut diperoleh dari data yang tercantum dalam *dashboard* masing-masing satuan kerja pada aplikasi SMART. Berikut rincian atas Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023.

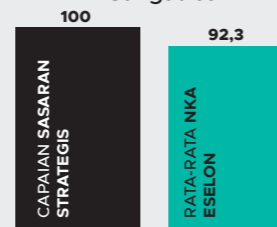
Tabel 3. 8 Rincian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023

Variabel	Hasil
Capaian sasaran strategis	100
Rata-rata NKA Eselon	92,3

Nilai Kinerja Anggaran PPATK

96,15

Sangat baik



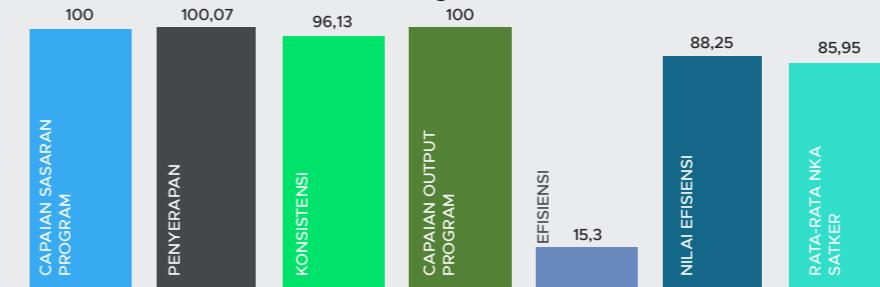
Capaian sasaran strategis diperoleh dari hasil realisasi Sasaran strategis PPATK yaitu Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Efektivitas (IE) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan

Gambar 3.9 Rincian hasil rata-rata NKA tingkat eselon I/Program

Nilai Kinerja

92,3

Sangat baik



terorisme Indonesia. Pada tahun 2023, target Indeks Efektifitas (IE) sebesar 7,47 dengan realisasi 7,74, sehingga capaian sasaran strategis PPATK tahun 2023 sebesar 103,61%.

Rata-rata NKA tingkat Eselon I/Program dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai kinerja anggaran atas aspek manfaat (bobot 66,7%) dan aspek implementasi (bobot 33,3%) tingkat Eselon I/Program dan rata-rata Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja/kegiatan lingkup kewenangan Eselon I/Program terkait. Berikut merupakan rincian atas hasil rata-rata NKA tingkat Eselon I/Program.

Secara hasil, Nilai Kinerja Anggaran PPATK tahun 2023 sudah memperoleh nilai yang sangat baik dan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Namun, Biro Perencanaan dan Keuangan akan tetap

melakukan upaya untuk terus meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran pada tahun berikutnya dengan cara:

- Meningkatkan capaian kinerja (*output* dan program) dan melakukan efisiensi anggaran.
- Memastikan penyerapan anggaran triwulanan sesuai dengan target minimal yang ditetapkan Kementerian Keuangan, menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) triwulanan dengan cermat, melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD, serta melakukan *update* RPD setiap triwulan.

Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara untuk penyelesaian kewajiban satker ke KPPN.



RENSTRA DAN RPJMN

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. PPATK sangat berperan aktif dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*predicate crimes*).

PPATK mendukung penuh upaya pencapaian tujuan Agenda Pembangunan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Agenda Pembangunan yang pertama, yaitu ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dalam arah kebijakan ke IV, yaitu Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Strategi yang pertama, yaitu melalui harmonisasi dan penguatan kebijakan sektor keuangan atas dasar kedaulatan, stabilitas, dan integritas sistem keuangan,

prinsip kehati-hatian, serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. Agenda Pembangunan yang ketujuh, yaitu stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik, yaitu:
 - a. Mempermudah akses pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri melalui upaya untuk menghilangkan diskriminasi terhadap pelaku usaha nasional;
 - b. Mempermudah akses keadilan dan sistem anti korupsi, khususnya pada strategi penegakan hukum nasional untuk mengupayakan *asset recovery* melalui konsep *follow the money* dan penerapan pasal-pasal TPPU;
 - c. Keamanan, yaitu upaya untuk memberikan rasa aman dalam kehidupan masyarakat melalui pemberantasan narkoba, terorisme, perdagangan manusia, dan tindak pidana lainnya;

- d. Meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil, yaitu upaya untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil melalui pengawasan asal usul dan penggunaan dana kampanye; dan
- e. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik yang berkualitas, yaitu membantu Kementerian/Lembaga dalam mewujudkan aparatur negara yang berintegritas, akuntabel, dan transparan yang diwujudkan dengan pemberian informasi mengenai laporan transaksi keuangan kandidat pejabat Eselon I dan Eselon II, serta calon pejabat publik lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, PPATK telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) PPATK Tahun 2020-2024. Rencana strategis tersebut ditetapkan dengan Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024 yang telah diubah dengan

Peraturan PPATK Nomor 06 Tahun 2020. Renstra PPATK tersebut memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, dan sasaran strategis tahun 2020-2024 dan merupakan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di PPATK.

Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada PPATK melalui Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. Pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA PPATK

543
Pegawai

RINCIAN PEGAWAI PENUNJANG :

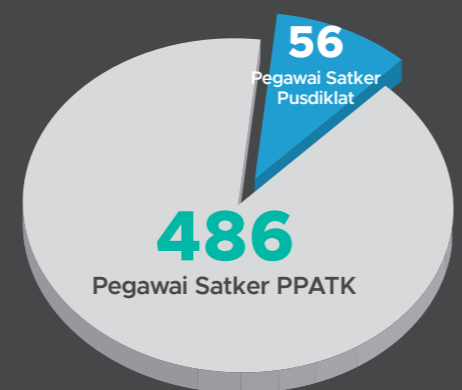
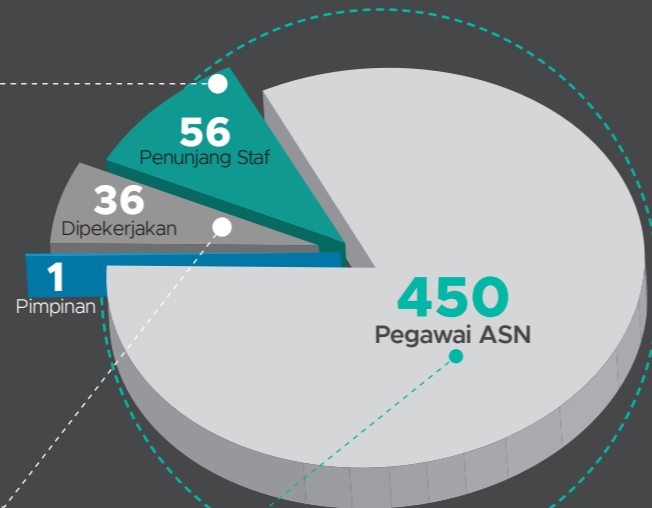
- 1 — Tenaga Humas
- 8 — Penata Usaha
- 19 — Pengelola Dokumentasi
- 5 — Protokol
- 2 — Resepsionis
- 19 — Teknisi
- 1 — Dokter Umum
- 1 — Tenaga Paramedis (Perawat gigi)

RINCIAN PEGAWAI DIPEKERJAKAN :

- 22 — PNS Kementerian/Lembaga
- 5 — Non ASN (Bank Indonesia)
- 9 — TNI/Polri

RINCIAN PEGAWAI ASN :

- 364 — PNS (Pegawai Tetap)
- 29 — CPNS
- 57 — PPPK



KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN SATKER

Catatan: Perbedaan Struktur Komposisi Pegawai pada data Laporan Semester dan laporan Tahunan 2023 karena kebijakan pengelolaan pegawai pramubakti, security dan driver sebanyak **105 orang** yang dialihkan kepada pengelolaan pihak ketiga pada Semester II tahun 2023

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, saat ini pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdiri dari Pegawai Tetap, Pegawai dipekerjakan, dan Pegawai Kontrak, kemudian saat ini PPATK juga terdiri dari dua satuan kerja, yaitu Satuan Kerja PPATK dan Satuan Kerja Pusdiklat APU PPT di Depok.



MANAJEMEN INTERNAL

A. REFORMASI BIROKRASI

Penetapan strategi pada *Roadmap* RB 2020–2024 setelah penajaman dilakukan secara kolaboratif melibatkan Kementerian/Lembaga pengampu kebijakan (*leading institution*) dengan memperhatikan prinsip logis, prioritas, kolaboratif, dan antisipatif. Dalam pelaksanaan RB ini, dibagi menjadi 2 jalur, yaitu RB General dan RB Tematik.

RB General dilaksanakan dengan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam Permenpan 3 Tahun 2023 dimana terdiri dari 16 kegiatan utama. PPATK telah melaksanakan 15 kegiatan utama yang terbagi menjadi 114 rencana aksi. Sementara 1 kegiatan utama tidak dilaksanakan karena program tersebut khusus untuk pemerintah daerah.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. RB Tematik merupakan program percepatan penyelesaian agenda prioritas Presiden. Pada tahun 2023 ini PPATK mengimplementasikan RB Tematik sebagai berikut:

1. Pengentasan Kemiskinan. Pada program ini, PPATK mendorong percepatan RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi UU sehingga dapat menjadi *tools* bagi pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan memperkecil *gap* ketimpangan sosial.
2. Pengawasan keanggotaan Indonesia sebagai anggota tetap FATF. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan reputasi Indonesia dan ASEAN sebagai *epicentrum* pertumbuhan global dan menumbuhkan iklim investasi yang kondusif yang pada akhirnya akan meningkatkan *rate investment* di Indonesia. Selain itu dilakukan juga sosialisasi risiko korporasi digunakan sebagai sarana TPPU melalui pendekatan identifikasi *beneficial owner* berbasis risiko kepada para *stakeholder* pemangku kepentingan utama rezim APU PPT di seluruh Indonesia. PPATK juga berperan dalam Pertukaran informasi melalui SWI (Satgas Waspada Investasi)

yang dilaksanakan sebagai pengawasan terhadap dunia investasi dan untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif, dilaksanakan pula pengukuran *Financial Integrity Index*.

3. PPATK mendukung pelaksanaan digitalisasi administrasi pemerintahan melalui digitalisasi proses bisnis di lingkungan PPATK sesuai dengan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) baik secara instansi maupun Nasional.
4. Menyukseskan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada pengadaan barang dan jasa PPATK.
5. Di bidang pengendalian inflasi, PPATK melaksanakan *fit and proper* pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi instansi yang mempunyai peran besar dalam pengendalian inflasi.

Statistik Nilai Reformasi Birokrasi PPATK 5 Tahun Terakhir

85,56
2023



B. MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan sasaran strategis PPATK, tahun 2023 menjadi periode yang sangat penting dalam peningkatan manajemen risiko di lembaga ini. Langkah-langkah yang telah diambil meliputi penyempurnaan berbagai kebijakan terkait manajemen risiko seperti penetapan Peraturan PPATK No.2 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan PPATK, Keputusan No.788 tahun 2023 tentang Kategori dan Kriteria Risiko, Keputusan No.64 Tahun 2023 tentang Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan PPATK, Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Risiko, dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) penetapan selera risiko serta PTO Identifikasi Risiko Positif atau Peluang.

Selain itu, terdapat penguatan komitmen bersama dari seluruh jajaran Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui Pakta Integritas dan Laporan Triwulanan Manajemen Risiko. Lebih utama lagi, integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis dan budaya organisasi telah dicapai melalui pelaksanaan proses manajemen risiko, dari identifikasi, analisis, evaluasi, hingga mitigasi risiko, serta peningkatan kompetensi

sumber daya manusia PPATK melalui sertifikasi manajemen risiko dan pengembangan aplikasi manajemen risiko. Semua upaya ini telah membawa PPATK mencapai kemajuan yang signifikan dalam mengelola risiko dengan lebih komprehensif dan efektif. Seiring berjalannya waktu, PPATK akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dengan didukung oleh budaya kesadaran risiko yang semakin kuat, PPATK akan menjadi lebih tangguh dan responsif terhadap perubahan lingkungan keuangan dan keamanan yang terus berkembang.



C. BCMS

Di tahun 2023 ini, telah dilakukan beberapa kegiatan terkait *Business Continuity Management System* (BCMS), antara lain penyusunan strategi penanganan bencana, pengecekan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menghadapi bencana, serta *testing* BCMS dengan mengangkat beberapa tema bencana.

Penyusunan strategi penanganan bencana dilakukan untuk menyusun prosedur penanganan bencana yang akan dilakukan ketika bencana terjadi antara lain alur penanganan bencana, sumber daya yang dibutuhkan baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana, serta pedoman pemulihan bencana khususnya pemulihan teknologi informasi. Bencana yang masuk kategori tinggi di PPATK antara lain kebakaran, gempa bumi, banjir, pandemi, cuaca ekstrem, dan kerusakan/huru hara. Setiap bencana tersebut memerlukan penanganan yang berbeda sehingga dibutuhkan prosedur penanganan untuk masing-masing bencana.

Selain itu, juga dilakukan identifikasi dan melakukan pengecekan kembali semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk

menghadapi bencana. Pengecekan sarpras ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan sarpras ketika bencana terjadi. Salah satu hal penting yang dilakukan di tahun 2023 adalah *testing* skenario bencana untuk mensimulasikan prosedur penanganan bencana yang telah disusun. Hasil *testing* ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk perbaikan implementasi BCMS.



PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

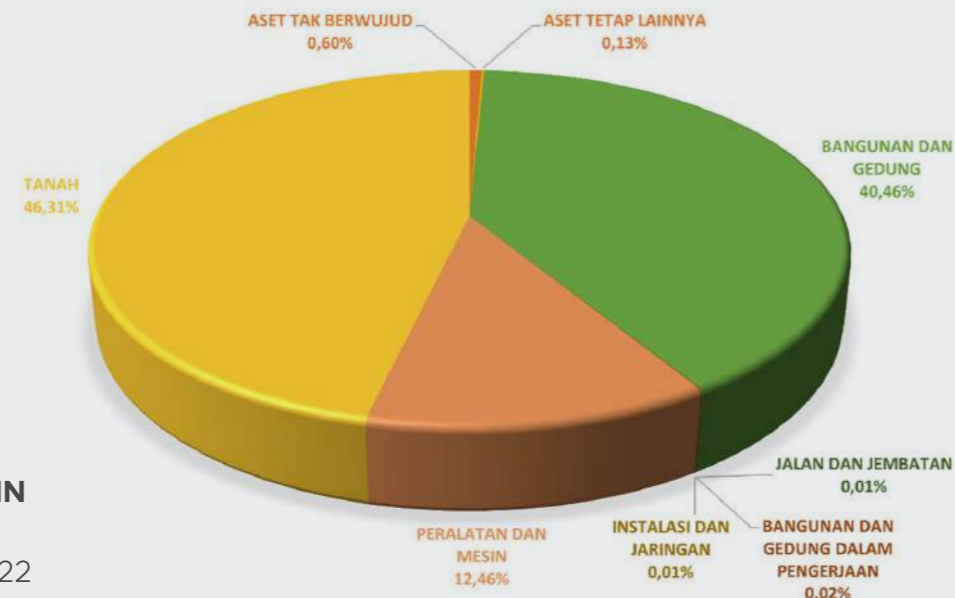
A. PENATAUSAHAAN ASET

Penatausahaan aset pada PPATK dilaksanakan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Nilai BMN PPATK pada Neraca Tahun 2023 (*Unaudited*) adalah sebesar Rp502.211.598.286,00.

Sementara nilai Barang Milik Negara (BMN) PPATK Tahun 2022 (*audited*) adalah sebesar Rp484.746.427.238,00. Sehingga terdapat penambahan nilai BMN PPATK tahun 2023 sebesar 3,6% dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan Sistem Manajemen Aset

Negara (SIMAN), posisi dan proporsi BMN PPATK berdasarkan kategori ditunjukkan oleh diagram di bawah.

Proporsi tersebut di atas didasarkan pada nilai buku BMN. Nilai buku BMN adalah nilai perolehan atas BMN dengan penyusutan. Berdasarkan data, nilai BMN PPATK didominasi oleh nilai tanah sebesar 46,31%. Hal ini dikarenakan tanah tidak mengalami penyusutan sehingga nilainya tetap.



3,6%

Penambahan Nilai BMN PPATK tahun 2023 dibandingkan tahun 2022

B. RENCANA KEBUTUHAN BMN TAHUN 2024

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) PPATK bertujuan agar tercapai efektivitas, efisiensi dan optimalisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PPATK melalui pengelolaan BMN.

Pada tahun 2023, PPATK menjadi salah satu dari 8 (delapan) kementerian dan lembaga yang termasuk dalam *pilot project* penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2 untuk penyusunan RKBMN Tahun 2025.

Pada tahun 2023, PPATK telah melakukan penyusunan perencanaan kebutuhan BMN untuk tahun 2025 yang meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan terhadap BMN yang dimiliki oleh PPATK. Usulan RKBMN tersebut akan dilakukannya penelaahan oleh DKJN Kementerian Keuangan dan PPATK sebelum ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Rincian usulan RKBMN Pengadaan PPATK Tahun 2025 sebagaimana pada tabel di samping.

Jumlah BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan yaitu sebanyak 21 unit

URAIAN	SKEMA PENGADAAN	JUMLAH
Pada UAKPB Kantor Pusat PPATK		
Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II	Sewa	11 unit
Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat)	Beli	3 unit
	Sewa	1 unit
Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua)	Beli	1 unit
Pada UAKPB Pusdiklat APU-PPT		
Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II	Beli	1 unit
Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat)	Beli	1 unit
Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua)	Beli	3 unit

kendaraan dinas dengan rincian sebanyak 12 unit melalui mekanisme sewa dan 9 unit dengan mekanisme pembelian. Sementara jumlah BMN yang direncanakan untuk dilakukan pemeliharaan seluruhnya adalah sebanyak 2.446 unit.

C. PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BMN

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, sepanjang tahun 2023, PPATK telah melaksanakan pemindahtanganan dan penghapusan BMN sebagai berikut :

Pemindahtanganan BMN melalui Lelang

No	Nama Kegiatan	Nomor Risalah Lelang	Nilai Laku (Rupiah)
Satker Pusat PPATK			
1	Lelang Paket Peralatan Kantor (Cubikal)	118/28/2023	71.000.000
2	Lelang Paket Kursi Besi Metal (200 unit)	420/32/2023	27.212.411
3	Lelang Paket Bongkaran Gedung Hasil Renovasi	170/28/2023	72.999.999
4	Lelang 10 Unit Kendaraan Dinas (Laku 9 unit)	291/28/2023	469.499.000
5	Lelang Ulang 1 unit Kendaraan (Sedan)	382/28/2023	61.234.560
6	Lelang 1 Paket Peralatan Kantor berikut Bongkaran Gedung Hasil Renovasi	475/28/2023	163.999.999
7	Lelang 1 Paket Peralatan (Inventaris) Kantor	615/28/2023	64.153.000
8	Lelang 1 Paket Bongkaran AHU FCU	682/28/2023	15.186.000
Satker Pusdiklat APU PPT			
9	Lelang Paket Peralatan dan Mesin	1811/32/2023	22.129.999
10	Lelang Paket Bongkaran Gedung dan Bangunan	123/32/2023	5.081.000
11	Lelang Paket Bongkaran Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	122/32/2023	16.000.999
Total			988.496.967

Penghapusan BMN

No	Nama Kegiatan	Nomor Berita Acara
1	Pemusnahan dan Penghapusan 99 unit Aset Tak Berwujud Satker Pusat PPATK	Berita Acara Pemusnahan BMN Nomor BA Pemusnahan/001/PL.05/XI/2023 tanggal 21 November 2023
2	Penghapusan 2 Unit Note Book Satker Pusdiklat APU-PPT	Keputusan Pengguna Barang PPATK Nomor 002 Tahun 2023



Total Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pengelolaan BMN Kantor Pusat PPATK adalah sebesar Rp945.284.969,00.

Sementara kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pengelolaan BMN Satker Pusdiklat APU PPT adalah sebesar Rp43.211.998,00.

Total kontribusi lelang terhadap PNBP PPATK adalah sebesar Rp988.496.967,00.

Nilai ini naik sebesar 16,79% dibandingkan penerimaan negara dari hasil lelang di PPATK pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp846.394.370,00.

D. PENGELOLAAN GEDUNG PPATK

ASURANSI GEDUNG DAN BANGUNAN

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, PPATK telah mendaftarkan aset berupa Gedung dan

Bangunan untuk memiliki asuransi. Pada Tahun 2023, aset PPATK yang didaftarkan asuransi sebagaimana pada tabel di bawah.

Atas BMN tersebut, premi asuransi yang dibayarkan PPATK kepada pihak konsorsium asuransi adalah sebesar Rp437.373.311,00.

No	Kode Satker	Nama Barang	NUP	Luas (m2)	Lokasi
1	Kantor Pusat PPATK	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	16.630	JL. IR. H. Juanda No. 35, Jakarta Pusat
2	Pusdiklat APU-PPT	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	7.184	Jalan Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Depok
3	Pusdiklat APU-PPT	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	89	Jl. Tapos Raya No. 82 Blok A/11, Cimpaeun, Tapos, Depok
4	Pusdiklat APU-PPT	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	54	Jl. Tapos Raya No. 82 Blok A/10, Cimpaeun, Tapos, Depok
5	Pusdiklat APU-PPT	Bangunan Gedung Kantor Permanen	10	2.200	JL. Raya Puncak RT 01/RW 01, Pacet, Kab. Cianjur
6	Pusdiklat APU-PPT	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	65	Jl. Tapos Raya No. 82 Blok A/8, Cimpaeun, Tapos, Depok
7	Pusdiklat APU-PPT	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2	83	Jl. Tapos Raya No. 82 Blok A/12, Cimpaeun, Tapos, Depok
8	Pusdiklat APU-PPT	Bangunan Klinik/ Puskesmas	1	58	Jl. Tapos Raya No. 82 Blok A/9, Cimpaeun, Tapos, Depok
9	Pusdiklat APU-PPT	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	122	Jl. Tapos Raya No. 82 Blok A/5, Cimpaeun, Tapos, Depok
10	Pusdiklat APU-PPT	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2	50	Jl. Tapos Raya No. 82 Blok A/6, Cimpaeun, Tapos, Depok
11	Pusdiklat APU-PPT	Asrama Permanen	1	5.946	Jalan Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Depok
12	Pusdiklat APU-PPT	Gedung Olahraga Tertutup Permanen	1	682	Jalan Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Depok

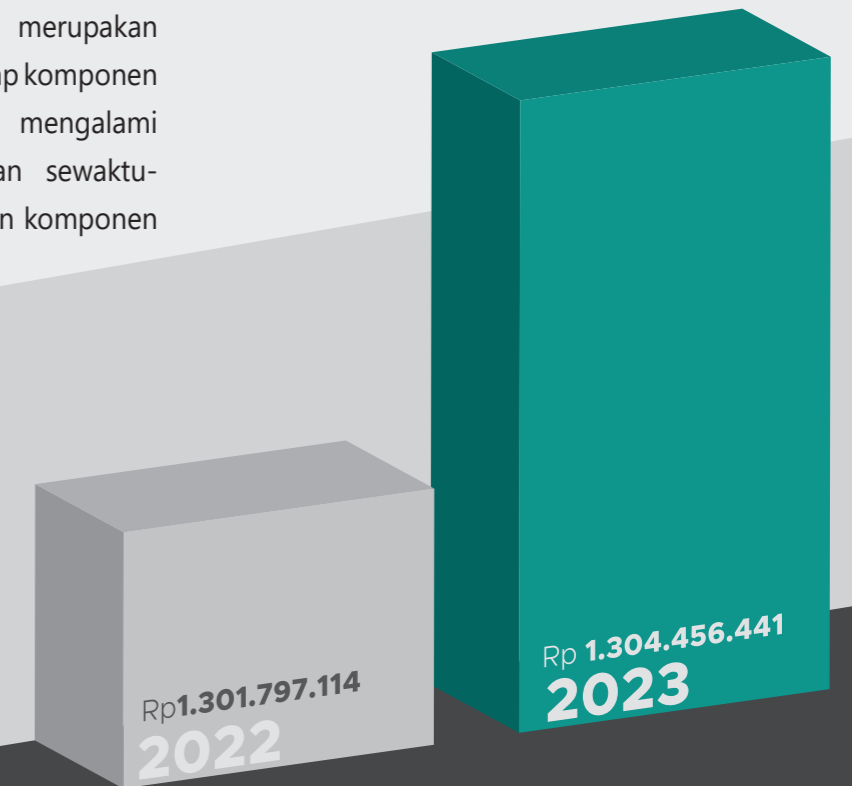
PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

Selain asuransi gedung dan bangunan, PPATK juga melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan baik pemeliharaan yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidentil. Pemeliharaan rutin yaitu pemeliharaan yang dilakukan rutin setiap tahun seperti pengecatan ulang tembok, pengadaan jasa kebersihan gedung, belanja cat eksterior gedung dan pemeliharaan rutin komponen gedung dan bangunan lainnya. Sementara pemeliharaan insidentil merupakan pemeliharaan yang dilakukan terhadap komponen gedung atau bangunan yang mengalami kerusakan maupun yang dilakukan sewaktu-waktu seperti perbaikan/penggantian komponen gedung/bangunan.

Pada tahun 2023 telah direalisasikan anggaran Pemeliharaan Gedung Bangunan PPATK sebesar Rp1.304.456.441,00 atau mencapai 99,81%.

Realisasi belanja pemeliharaan gedung kantor tahun 2023 naik sebesar Rp2.659.327,00 dari tahun 2022.

Perbandingan
Realisasi
Anggaran
Pemeliharaan
Gedung Bangunan
Tahun 2023 & 2022



PENGELOLAAN KEARSIPAN

DALAM rangka menjaga konsistensi kepatuhan terhadap peraturan kearsipan yang berlaku, Unit Kearsipan PPAK telah melaksanakan pengawasan kearsipan internal PPAK. Hasil pengawasan kearsipan internal pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PPAK pada tanggal 16 Mei 2023 telah melakukan penyerahan arsip statis, yaitu arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan dan telah diverifikasi oleh ANRI sebanyak 2 boks yang seluruhnya terdiri dari 170 berkas. Penyerahan arsip tersebut merupakan wujud peran PPAK dalam penyelamatan arsip sebagai khazanah lembaga kearsipan dan memori kolektif untuk dimanfaatkan bagi kepentingan publik.

Akreditasi Kearsipan merupakan program kerja Pusat Akreditasi Kearsipan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai upaya pemerintah dalam menjamin mutu penyelenggaraan kearsipan. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan akreditasi kearsipan oleh ANRI terhadap 17 lembaga yang terdiri dari lima Unit Kearsipan Kementerian/Lembaga Pusat, dua Lembaga

Kearsipan Perguruan Tinggi, tiga Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (LP3K), dan tujuh Lembaga

95,50

Sangat Memuaskan

Nilai Rata-rata Audit Kearsipan Internal



Penyelenggara Jasa Kearsipan (LPJK). Hasil Sertifikat Akreditasi Kearsipan diumumkan dan serahkan oleh ANRI pada tanggal 15 Desember 2023 di Hotel Gran Melia Jakarta, Unit Kearsipan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meraih akreditasi dengan predikat "AA" berarti Istimewa. Hal ini menunjukkan bukti komitmen PPAK dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan fisik dan informasi arsip sesuai

dengan prinsip, standar, kaidah kearsipan dan peraturan perundangan yang berlaku.



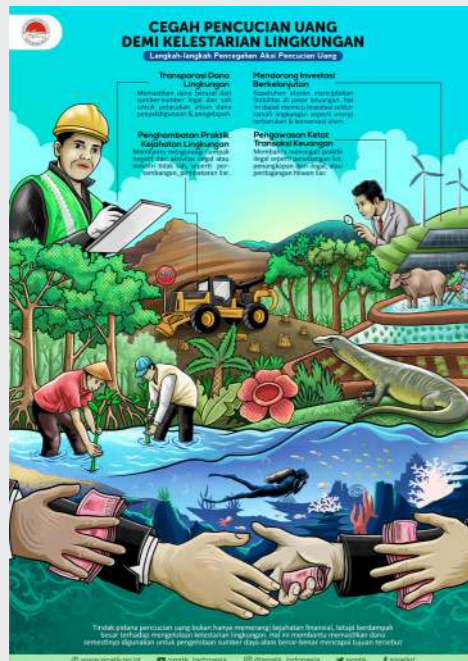
FESTIVAL KREATIF ANTI PENCUCIAN UANG

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan Acara Puncak Penganugerahan Festival Kreatif Anti Pencucian Uang 2023 pada tanggal 3 November 2023. Kegiatan Festival Kreatif tahun ini mengusung tema Jaga Bumi Jaga NK21, sesuai dengan tema besar Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang

Tahun 2023. Kategori lomba yang diperhelatkan yaitu Kategori Film Pendek dan Kategori Poster. Festival Kreatif ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan PPATK sebagai bentuk edukasi masyarakat terhadap penerapan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia.



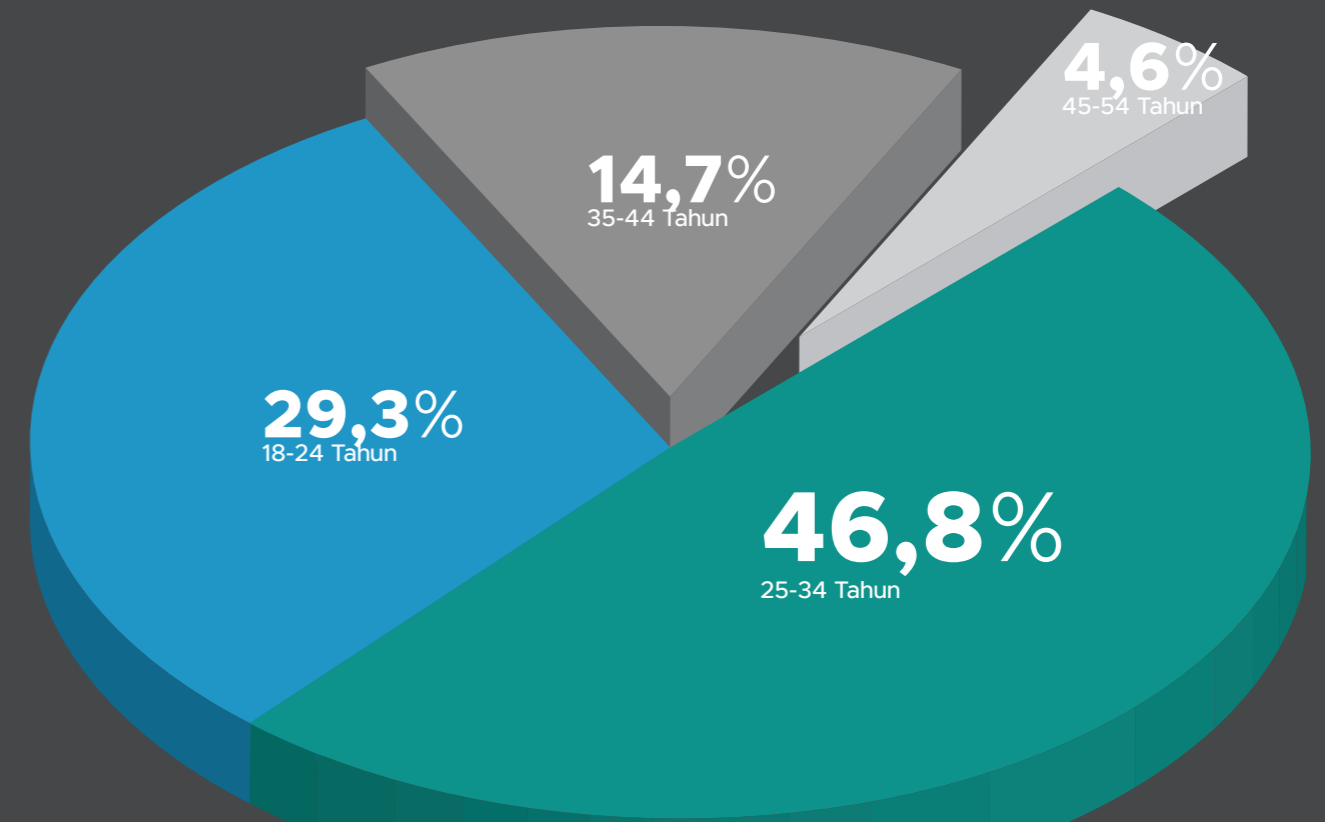
Animo masyarakat untuk mengikuti Festival Kreatif Anti Pencucian Uang Tahun 2023 sangat tinggi. Festival Kategori Poster diikuti oleh 138 peserta dan kategori film diikuti oleh 38 peserta dari seluruh Indonesia. Penganugerahan ini telah melalui beberapa tahapan seleksi antara lain, seleksi administrasi, seleksi panitia internal, penilaian dewan juri, dan terakhir penilaian dari Pimpinan PPATK. Pihak yang bertindak sebagai dewan juri dalam perhelatan ini adalah Dudi Sugandi untuk kategori Poster dan Ismail Basbeth untuk kategori film pendek.



JANGKAUAN EDUKASI PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Pada Tahun 2023, jumlah keterikatan (*engagement*) masyarakat terhadap edukasi publik PPATK melalui media sosial mencapai 3.105.488.000 jangkauan. Media sosial yang

dimaksud antara lain Facebook, Instagram, Twitter/X, Youtube dan TikTok. Jangkauan ini tersebar di seluruh Indonesia dengan sebaran rentang usia sebagai berikut:

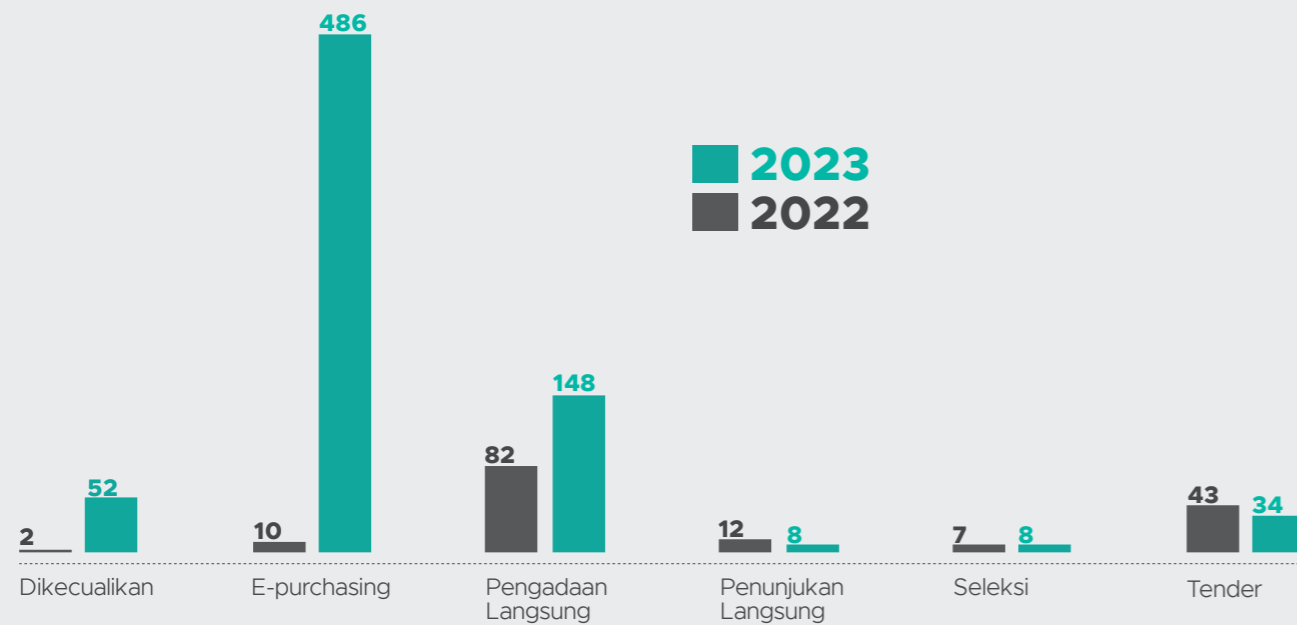


PENGADAAN BARANG/JASA PPATK

LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Unit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa (UKPBJ) PPATK melaksanakan tugas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan bertindak sebagai Agen Pengadaan UKPBJ PPATK. Pada periode Januari s.d. Desember 2023, UKPBJ PPATK telah menerima permohonan pengadaan dari PPK Satker PPATK dan Pusdiklat APU-PPT dengan rincian sebagai berikut:



Sepanjang tahun 2023, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PPATK telah menerima permohonan pengadaan sebanyak 486 permintaan. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 372% dari tahun sebelumnya. Paket pengadaan *e-purchasing* meningkat dikarenakan status PPATK pada LPSE yang sebelumnya hanya sebagai *agency*, pada tahun 2023 meningkat menjadi *service provider* sehingga PPATK memiliki kewenangan untuk registrasi dan verifikasi penyedia. Selain itu, sudah terbentuk katalog sektoral PPATK sehingga banyak pengadaan barang/jasa di lingkungan PPATK dipenuhi melalui *e-purchasing*. Sementara rincian pelaksanaan metode pemilihan penunjukan langsung, seleksi dan tender adalah sebagai berikut.

Metode Pemilihan	Selesai	Gagal	Batal
Penunjukan Langsung	7	0	1
Seleksi	7	1	0
Tender	27	1	6

Berdasarkan metode pemilihan penunjukan langsung terdapat 7 paket selesai dan 1 paket pengadaan batal. Berdasarkan metode seleksi, terdapat 7 paket pengadaan selesai

dan 1 paket pengadaan gagal. Sementara pada metode tender, terdapat 27 paket pengadaan selesai dilaksanakan, 1 paket pengadaan gagal, dan 6 paket pengadaan batal. Paket pengadaan yang gagal dan batal dilaksanakan disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan waktu pelaksanaan dan tidak ada penyedia yang memenuhi persyaratan yang diminta.

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

PPATK telah mengumumkan 295 Rencana Umum Pengadaan (RUP) selama tahun 2023. Jumlah tersebut naik dari tahun 2022 sejumlah 222 RUP. Dari 295 RUP yang telah diumumkan, 279 RUP telah dilaksanakan dan 16 RUP batal dilaksanakan karena pengalihan pagu anggaran.

RUP	Tahun	
	2022	2023
Diumumkan	222	295
Dilaksanakan	214	279
Batal	8	16



INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) mengacu kepada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan maupun dari segi sistem pengadaan. Pada Tahun 2023 ITKP UKPBJ PPATK adalah 73,49 dengan predikat "Baik", meningkat dari tahun 2022 sebesar 51,05 dengan predikat "Cukup".

Peningkatan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun ini didorong oleh adanya peningkatan skor komponen penilaian terutama pada komponen *e-purchasing* yang sebelumnya 0.0 menjadi 1.0 dan tingkat kematangan UKPBJ yang sebelumnya 8.9 menjadi 31.11.

TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ PPATK

Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ didefinisikan sebagai instrumen pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ berdasarkan model tersebut terdiri dari 4 domain dan 9 variabel meliputi:

1. Domain Proses, yang mencakup variabel: Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, dan Manajemen Risiko;
2. Domain Kelembagaan, yang mencakup variabel: Pengorganisasian, dan Tugas/Fungsi;
3. Domain Sumber Daya Manusia, yang mencakup variabel: Perencanaan, dan Pengembangan;
4. Domain Sistem Informasi, dengan variabel: Sistem Informasi.

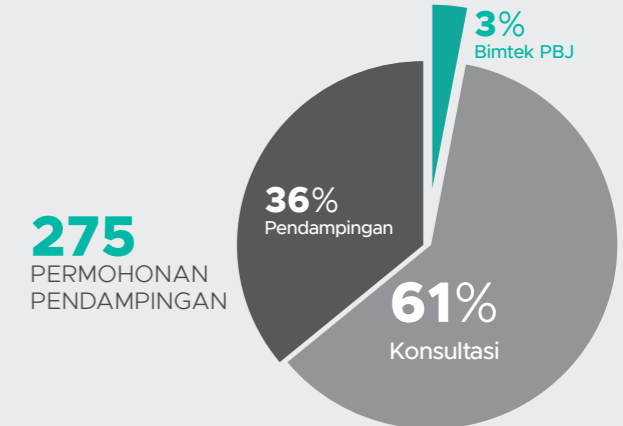
Target setiap UKPBJ adalah mencapai tingkat kematangan level 3 yaitu PROAKTIF untuk dapat disebut sebagai UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan pengadaan (*Procurement Center of Excellence*). Pada Tahun 2023 Tingkat Kematangan UKPBJ PPATK telah memenuhi 7 dari 9 variabel sehingga saat ini Tingkat Kematangan UKPBJ PPATK berada pada Level Proaktif. Tingkat kematangan pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2022 yang berada pada Level Inisiasi atau memenuhi 1 dari 9 variabel.

PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pada tahun 2023 telah dilakukan revisi MoU antara PPATK dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan revisi tersebut SPSE PPATK mengalami peningkatan dari *Admin Agency* menjadi *Service Provider*. Dengan peran baru sebagai *Service Provider* kini UKPBJ PPATK telah memiliki *role helpdesk* dan verifikator pada SPSE. Bertambahnya 2 *role* tersebut mendukung UKPBJ PPATK untuk menjadi UKPBJ yang merupakan pusat keunggulan pengadaan.

PENDAMPINGAN, KONSULTASI DAN/ATAU BIMBINGAN TEKNSI BARANG/JASA

Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, UKPBJ PPATK melaksanakan tugas Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Barang/Jasa.



Sepanjang tahun 2023, UKPBJ telah melayani 275 permohonan pendampingan dari User dengan rincian 169 Konsultasi, 99 Pendampingan, dan 7 Bimbingan Teknis Barang/Jasa.

UNIT LAYANAN PIMPINAN

SALAH satu fokus PPATK di tahun 2023 adalah bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan penuh *Financial Action Task Force* (FATF). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Kepala PPATK menghadiri beberapa kunjungan strategis untuk mendapatkan dukungan bagi Indonesia menjadi negara anggota FATF.

Pada awal tahun 2023, Kepala PPATK menghadiri agenda *Countersy Calls to US Treasury and Financial Crimes Enforcement Network* (FinCEN) di Washington DC. Pada pertemuan dengan US Treasury, perwakilan Indonesia membahas terkait isu teknis yang berkembang di Indonesia dan kekuatan *Immediate Outcome* (IO) yang ditargetkan berdasarkan *Mutual Evaluation Report* (MER) Indonesia.

Sementara pada pertemuan dengan FinCEN, dilakukan pembahasan terkait kerja sama dalam pertukaran informasi terkait APU PPT khususnya pada tindak kejahatan berisiko tinggi dan ancaman *emerging* seperti kejahatan siber.

Pada tanggal 20-24 Februari 2023 Kepala PPATK menghadiri *FATF Plenary* di Paris, Perancis. Pada agenda ini telah disepakati bahwa Indonesia mendapat jalur *fast track* melalui penyusunan *Action Plan* yang berfokus pada *Immediate Outcome* (IO) 3 tentang pengawasan kepatuhan, IO 8 tentang perampasan aset, dan IO 11 tentang pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam waktu yang singkat dan terukur dengan dimonitor oleh 8 negara yang tergabung dalam *Contact Group* yaitu Australia, Amerika Serikat, Perancis, India, Jepang, Turki, Arab Saudi dan Selandia Baru.

Kemudian pada *FATF Plenary* berikutnya yang dilaksanakan pada 19 s.d. 23 Juni 2023, dilakukan pembahasan Laporan Pemenuhan *Action Plan* yang telah disampaikan pada 19 Mei 2023. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan rangkaian *FATF Working Group Meeting* antara lain *Policy Development Group* (PDG), *Risk, Trends and Methods Group* (RTMG), *International Cooperation Review Group* (ICRG), pertemuan bilateral dengan anggota

kunci FATF serta *FATF Plenary* khusus terkait keanggotaan Indonesia. Hasil dari kegiatan ini, Indonesia telah menyelesaikan 77% *Action Plan* sehingga masih perlu melanjutkan pemenuhan dan pelaporan *Action Plan* untuk dibahas pada *FATF Plenary* berikutnya. Hingga pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam *FATF Plenary Meeting*, Indonesia diterima secara

aklamasi sebagai negara anggota FATF yang ke-40 karena telah menyelesaikan 100% *Action Plan* yang telah disepakati. Dengan masuknya Indonesia menjadi anggota penuh FATF, Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan strategis global terkait APU PPT sesuai dengan perspektif dan kepentingan Indonesia.





Selain kegiatan strategis yang dilakukan di luar negeri, Kepala PPAK juga menghadiri beberapa agenda dalam negeri. Menjelang masa pemilihan umum (pemilu) 2024, Kepala PPAK melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait Pencucian Uang dan Pengawasan Dana Kampanye Pemilu

2024 pada tanggal 7 Februari 2023. Kepala PPAK juga melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteri Agama, dan Menteri Pemuda dan Olahraga pada tanggal 15 September 2023 di Gedung KPU terkait penyelenggaraan pemilu 2024.



INDEKS CSM DAN INDEKS KAMI

Penilaian indeks *Cyber Security Maturity (CSM)* dan indeks Keamanan Informasi (KAMI)

PPATK senantiasa dinilai secara kontinu oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selaku lembaga yang membidangi Keamanan TI di Indonesia. Penilaian yang dilakukan oleh BSSN terhadap PPATK diantaranya adalah penilaian indeks *Cyber Security Maturity (CSM)* dan



indeks Keamanan Informasi (KAMI).

PPATK meraih nilai 4,41 (skala 5) pada pengukuran indeks CSM tahun 2023. CSM merupakan instrumen yang dikembangkan oleh BSSN untuk menilai tingkat kematangan keamanan siber bagi organisasi, mengidentifikasi gap antara kondisi pengelolaan keamanan siber saat ini dengan kondisi ideal, dimana *output* berupa nilai maturitas keamanan siber organisasi beserta laporan yang memuat penjelasannya.

Area penilaian meliputi aspek tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi dan respons.

Nilai yang diperoleh PPATK tersebut naik dari tahun sebelumnya (2022) sebesar 4,1. Hal ini menunjukkan tingkat maturitas keamanan siber di PPATK berada pada level 4 dimana keamanan siber di PPATK sudah terorganisir, sudah direviu secara berkala dan berkelanjutan.

Di samping itu, PPATK meraih nilai 636 dari skor maksimal 700 pada pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI) 2023.

Penilaian Indeks KAMI merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan)

penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001. Nilai yang dicapai untuk Indeks KAMI PPATK pada tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 617 Indeks atau mencapai 103,08%. Hal ini menunjukkan tingkat maturitas Keamanan Informasi berada pada kategori baik.



INDEKS SPBE DAN INDEKS TKTI

Penilaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Tata Kelola TI di PPATK

SISTEM Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di PPATK, Tim Assessor Internal SPBE PPATK melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap tahun untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada PPATK dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang "Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023", nilai Indeks SPBE PPATK untuk tahun 2023 berhasil mencapai nilai 4,24 pada Indeks SPBE, yang dikategorikan dengan predikat "memuaskan". Untuk itu diharapkan penilaian

SPBE dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

4,24
Indeks SPBE
Predikat "**Memuaskan**"

Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Di samping itu, PPATK meraih nilai maturitas sebesar 4,02 atas Tata Kelola TI di PPATK dengan capaian kinerja sebesar 120,72% terhadap target kinerja tahun 2023 yaitu 3,33 yang secara umum digambarkan sebagai "Proses selalu dilaksanakan, terdokumentasi, dikomunikasikan, dikelola dengan baik serta dapat diukur pencapaiannya".

Penilaian tersebut dilakukan terhadap 4 domain yang terdiri dari 34 proses. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, masih terdapat 1 proses yang nilainya masih di bawah level 3, yaitu DS10 terkait *Manage Problems*. Untuk mengatasi hal tersebut, Pusat Teknologi Informasi akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi dari Inspektorat dengan menyusun prosedur pengelolaan permasalahan TI (*manage problems*), melakukan pencatatan pengelolaan permasalahan TI (*lost event database*) secara konsisten, dan memanfaatkan *tools* pengelolaan permasalahan TI yang sudah tersedia.

4,02
Nilai Maturitas
TATA KELOLA TI PPATK
120,72%
capaian kinerja

Proses selalu dilaksanakan, terdokumentasi, dikomunikasikan, dikelola dengan baik serta dapat diukur pencapaiannya

TRACKAML HACKATHON: MENDORONG INOVASI CERDAS APU-PPT

DALAM rangka memperingati Gerakan Rezim APU-PPT Indonesia ke-21 dan lahirnya PPATK pada 17 April 2022, PPATK berkomitmen dalam pemberantasan tindak pencucian uang dan terorisme. Kegiatan TrackAML Hackathon yang diselenggarakan PPATK pada Mei 2023 mengusung tema yang berkaitan dengan *Artificial Intelligence (AI)* dalam mendorong Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Tujuan dari acara TrackAML Hackathon 2023 ini adalah untuk menjangring ide atau inovasi di bidang teknologi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber data alternatif di luar laporan transaksi keuangan yang dikirimkan Pihak Pelapor ke PPATK untuk mendeteksi potensi terjadinya kejahatan di bidang



keuangan dalam mendukung rezim APU-PPT bekerja sama dengan mahasiswa, pihak pelapor, dan instansi pemerintah.

TrackAML Hackathon diikuti oleh 49 tim, termasuk mahasiswa, pihak pelapor, dan instansi pemerintah diantaranya Kementerian Keuangan, Arsip Nasional Republik Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Gunadarma, dan IPB University. Setelah seleksi administrasi, 16 tim masuk tahap uji coba daring dan terpilih 10 tim yang masuk ke babak final untuk pembinaan dan presentasi *output*.



Harapannya, *output* dari kegiatan ini akan terus dikembangkan oleh PPATK khususnya Pusat Teknologi Informasi. Hal ini akan mendukung pelaksanaan *action plan* keanggotaan



Indonesia di FATF dan meningkatkan investasi untuk ASEAN sebagai pusat pertumbuhan global.

PELATIHAN APU-PPT

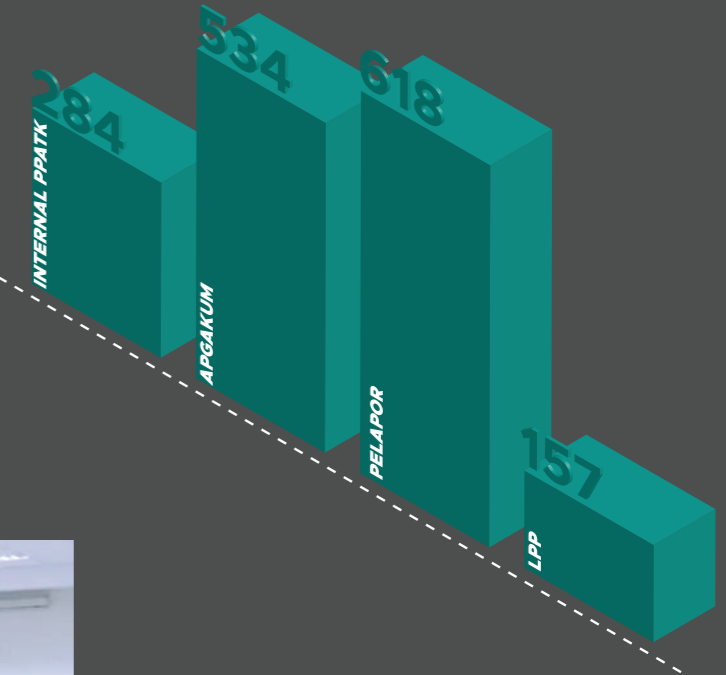
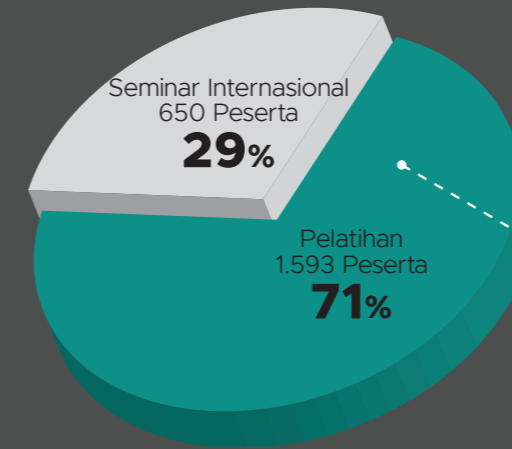
PERKUAT *STAKEHOLDER* PPATK, PERKUAT REZIM APU-PPT

SESUAI upaya PPATK sambut tahun politik pada tahun 2023-2024, dalam rangka penguatan pemahaman TPPU dan TPPT melalui pelatihan. PPATK melalui Pusat Pendidikan Pelatihan APU-PPT telah menyelenggarakan 48 *batch* pelatihan, 2 *Training of Trainers* dan 1 seminar internasional pada tahun 2023 yang ditujukan bagi *stakeholder* PPATK yang terdiri dari Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pihak Pelapor dan Internal PPATK.

PPATK dipercaya untuk menjalankan program Prioritas Nasional melalui penyelenggaraan 15 pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum dengan total 450 peserta. Adapun realisasi penyelenggaraan pelatihan dan program prioritas nasional pada tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan pada tabel di samping.

Selain itu, pada tanggal 17 April 2023 PPATK telah menyelenggarakan seminar internasional APU-PPT dalam upaya meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dalam rezim APU PPT dan menjalankan implementasi hasil rekomendasi MER FATF.

No	Stakeholder	Jumlah Penyelenggaraan	Peserta
1	Internal PPATK	11	284
2	Apgakum	15	534
3	Pelapor	18	618
4	LPP	4	157
Total		48	1.593



Seminar internasional dengan tema "*Oversight And Asset Recovery on Green Financial Crimes And Transnational Laundering On High-Risk Predicate Crimes in Indonesia*" dihadiri 650 peserta dari FIU negara lain, aparat penegak hukum, lembaga pengawas pengatur, dan pihak pelapor.

Kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pelatihan juga telah dilakukan dengan beberapa *stakeholder* yang diperkuat dengan adanya Perjanjian Kerja Sama. Kerja Sama pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:



No	Tujuan	Pemangku Kepentingan
1	Penyelenggaraan pelatihan bersama	BNN dan Pusbang SDM BNN
2	Penyelenggaraan pelatihan "PNBP"	PT. Bank Sahabat Sampoerna
3	Kunjungan Kemitraan "Komisi Pengawas Persaingan Usaha"	KPPU
4	Pengenalan pimpinan dan sharing knowledge	BSSN
5	Penyelenggaraan Pelatihan PNBP	PT. Pegadaian
6	Penyelenggaraan Pelatihan PNBP	PT. Bank Syariah Indonesia
7	Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Hakim	Mahkamah Agung
8	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Tahun 2024	BNN, Kejaksaan Agung, KLHK, Kemenkop, BPOM, BP2MI, ATR/BPN, DJBC, Korwas Bareskrim, Diklat Reskrim
9	Sharing Knowledge bersama KPK	KPK
10	Sharing Knowledge bersama APPUI	APPUI
11	Sharing Knowledge bersama Komisi Yudisial	Komisi Yudisial

Salah satu kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PPATK di tahun 2023 adalah melalui penyelenggaraan pelatihan dengan Pihak Pelapor PPATK yaitu PT. Bank Sahabat Sampoerna, PT. Pegadaian dan PT. Bank Syariah Indonesia. Penyelenggaraan pelatihan dengan mekanisme pembiayaan melalui PNBP tersebut telah berkontribusi pada penerimaan negara sebesar **Rp360.800.000,00**. Pelatihan

tersebut diselenggarakan selama 2 hari dengan total 39 peserta. Pelatihan tersebut diselenggarakan pada bulan Juni, Oktober dan November dengan jumlah 173 peserta dari 5 *batch* pelatihan terlaksana.

Perencanaan dan pengembangan program pelatihan telah menyusun 26 kurikulum dan 32 silabus yang digunakan

sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan.

Kemudian dalam rangka mencapai tujuan pelatihan secara efektif, juga telah dikembangkan beberapa modul serta media pembelajaran yang sebelumnya telah dilakukan analisis kebutuhan media berbasis

teknologi. Media-media tersebut akan digunakan dalam proses pembelajaran.

Adapun jumlah modul dan media pembelajaran yang telah selesai dikembangkan sebanyak **6 Modul** dan **10 Media Pembelajaran**. Selain itu, PATIH juga telah menyusun beberapa bank soal dan bank studi kasus pada beberapa program pelatihan



GERAKAN NASIONAL 21 TAHUN REZIM APU-PPT INDONESIA AML SMART COMPETITION 2023

PPATK melalui Gerakan Nasional 21 tahun Rezim APU-PPT Indonesia telah melakukan beragam rangkaian kegiatan menggaet keterlibatan masyarakat dalam semarak ulang tahun PPATK yang ke 21 tahun.

Guna menanamkan semangat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sehingga mampu memancing daya kritis generasi muda, telah dilaksanakan sebuah kegiatan yang mampu menarik perhatian dan keikutsertaan generasi muda dimana kegiatan tersebut diadakan sebagai wadah bagi generasi muda untuk menambah wawasan serta meningkatkan pengetahuan mereka terkait APU-PPT.

Oleh karena itu PPATK berinisiatif menyelenggarakan kegiatan dengan sasaran peserta yaitu para pelajar SMA/SMK diseluruh Indonesia dalam sebuah rangkaian kegiatan "AML Smart Competition 2023".

Kegiatan ini diikuti oleh 52 SMA dan sederajat yang terdiri dari 43 tim Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 9 tim Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan proses *Preliminary Test* pada 16 Mei 2023 menghasilkan 9 sekolah yang lolos ke babak semifinal.

Pelaksanaan semifinal dan final dilaksanakan pada 13 Juni 2023 dengan menghasilkan pemenang sebagai berikut:

- Juara 1 : SMAN Negeri 6 Bogor (920 poin)
- Juara 2 : SMKN 13 Jakarta (600 poin)
- Juara 3 : SMAN 107 Jakarta (330 poin)

Pelaksanaan kegiatan ini juga tidak lepas dari dukungan 5 mitra *stakeholder* PPATK yang terdiri dari Bank Sinar Mas, Bank IBK, Bank of China, Bank BTN dan Bank Mandiri.



GERAKAN NASIONAL 21 TAHUN REZIM APU-PPT INDONESIA AML-CTF OFFICE BATTLE 2023

PPATK dengan Gerakan Nasional 21 tahun Rezim APU-PPT Indonesia telah menyelenggarakan kegiatan lomba AML CTF OFFICE BATTLE. Kegiatan ini merupakan ajang kompetisi sebagai wadah bagi pihak pelapor untuk menambah pengetahuan, meningkatkan minat pihak pelapor dalam pemahaman dan penguatan sistem terkait rezim APU-PPT yang ditujukan bagi kalangan pihak pelapor di Indonesia.

Peserta yang terlibat terdiri dari pihak pelapor yang meliputi PJK di bawah pengawasan Bank Indonesia, PJK di bawah pengawasan OJK, dan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ).

Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 10 April 2023 s.d. 14 Juni 2023 yang diawali dengan registrasi peserta (10 April s.d. 8 Mei 2023), lalu pelaksanaan *Preliminary Test* pada

17 Mei 2023, Pengumuman semifinal pada 23 Mei 2023, dan diakhiri dengan puncak acara semifinal, final, dan pengumuman juara pada tanggal 14 Juni 2023 di Pusat pendidikan dan pelatihan APU-PPT PPATK, Depok.

Kegiatan ini diikuti oleh 79 tim dari beragam pihak pelapor dengan dominasi 46 tim dari PJK Bank, dengan proses *Preliminary Test* pada 17 Mei 2023 yang menghasilkan 9 tim yang lolos ke babak semifinal.

Pelaksanaan semifinal dan final telah menghasilkan pemenang sebagai berikut:
Juara 1 : Tim PT Bank Mandiri (1650 poin)
Juara 2 : Tim PT BCA (960 poin)
Juara 3 : Tim PT Bank Sinarmas (585 poin)

Pelaksanaan kegiatan ini juga tidak lepas dari dukungan 5 mitra *stakeholder* PPATK yang terdiri dari Bank Sinar Mas, Bank IBK, Bank of China, Bank BTN dan Bank Mandiri.



GERAKAN NASIONAL 21 TAHUN REZIM APU-PPT INDONESIA

KOMPETISI DEBAT APU-PPT

PPATK mengadakan Kompetisi Debat Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2023 dalam rangka Gerakan Nasional 21 tahun Rezim APU-PPT Indonesia pada tanggal 20 Maret s.d. 8 Juni 2023.

Kompetisi ini dilaksanakan menyasar kalangan perguruan tinggi tingkat S1 di seluruh Indonesia, yang diawali dengan penerimaan karya ilmiah dari para peserta, tercatat terdapat 23 karya ilmiah yang dikirimkan dari 21 perguruan tinggi se-Indonesia. Hasil penilaian atas seluruh karya yang masuk dihasilkan 6 karya tulis terbaik yang selanjutnya masuk pada kompetisi debat pada tanggal 7-8 Juni 2023.

Hasil kompetisi debat tersebut dihasilkan daftar pemenang sebagai berikut:

- Juara 1 : Universitas Sumatera Utara
- Juara 2 : Universitas Gadjah Mada
- Juara 3 : Universitas Andalas

Pelaksanaan kegiatan kompetisi debat ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk :

1. Menyosialisasikan semangat anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam rangka pecegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.

2. Meningkatkan kesadaran bahaya dan ancaman TPPU dan TPPT bagi Indonesia dan dunia Internasional.
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dalam memahami tantangan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.
4. Memicu kreatifitas generasi milenial dalam Menumbuhkan budaya anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.



PPATK MENGAJAR

MEMBANGUN PERAN DAN KESADARAN GENERASI MUDA
MENDUKUNG REZIM APU-PPT

UPAYA pencegahan tindak pidana pencucian uang harus menjangkau seluruh lini di masyarakat. Pelajar dan mahasiswa adalah potensi emas masa depan Indonesia yang harus dijaga dari beragam infiltrasi bentuk kejahatan, termasuk kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Merujuk peta risiko pada NRA TPPU, pelajar dan mahasiswa adalah kalangan yang beresiko tinggi terkena *impact* kejahatan ekonomi ini. Oleh karena itu, PPATK telah melaksanakan kegiatan edukasi publik kepada generasi muda dalam program PPATK Mengajar dengan sasaran pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat serta program Diskusi Kontemporer untuk kalangan mahasiswa perguruan tinggi.

Sepanjang tahun 2023 ini, PPATK telah melaksanakan program PPATK Mengajar di 8 Sekolah perwakilan daerah Medan, Depok, Tangerang, dan Jakarta dengan jumlah keterlibatan peserta sebanyak **1.000 peserta**. Program Diskusi Kontemporer telah

No	Lokasi Kegiatan	Peserta
1	SMAN 6 Medan	120
2	SMAN 1 Pancur Batu	130
3	SMAN 1 Depok	140
4	SMAN 3 Depok	130
5	SMAN 1 Tangerang	97
6	SMAN 2 Tangerang	133
7	SMAN 90 Jakarta	120
8	SMAN 13 Jakarta	130
9	DISKUSI KONTEMPORER PKN STAN	204
10	DISKUSI KONTEMPORER UNIV PATTIMURA AMBON	200

dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2023 yang bekerjasama dengan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Universitas Pattimura dengan jumlah keterlibatan peserta sebanyak **404 peserta**.

Kedua program edukasi tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang paham dan *aware* terhadap bahaya yang timbul dari kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme di masyarakat.



MEMBANGUN KOLBORASI *PENTAHELIX* MELALUI JEJARING KERJASAMA DAN EDUKASI PUBLIK

UPAYA Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memerlukan kerjasama dari berbagai pihak seperti Akademisi, Bisnis, Pemerintah, Komunitas, dan Media atau yang populer dikenal dengan kolaborasi *Pentahelix*. Oleh karena itu, PPATK sebagai *leading sector* dalam isu APU-PPT berusaha menjangkau berbagai pihak dan juga melakukan kegiatan edukasi publik.

PPATK melaksanakan diskusi publik penelusuran dan penanganan aset hasil tindak pidana bekerjasama dengan Komisi III DPR RI, PPA Kejaksaan dan seluruh *stakeholder* terkait dalam rangka peningkatan dan penyamaan pemahaman masyarakat dari anggota legislatif, akademisi, Apgakum, Lembaga Pengawas dan Pengatur, serta perwakilan Pihak Pelapor terkait pengelolaan aset hasil Tindak Pidana. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta, Surabaya, Semarang dan Banten.

PPATK juga mengunjungi dua universitas yaitu Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN) dan Universitas Pattimura untuk meningkatkan *awareness* kalangan mahasiswa dan dosen

perguruan tinggi terhadap pencegahan TPPU. Sebaliknya, PPATK juga menerima kunjungan mahasiswa dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Bandar Lampung.

Kolaborasi bersama pihak media juga dilakukan oleh PPATK Bersama SCTV dalam program acara "Jadi Tahu". Program ini dalam bentuk diskusi bersama praktisi atau ahli dengan tema TPPU dan TPPT. Kegiatan dilakukan secara daring melalui beberapa *platform online* seperti Instagram, tiktok, video.com, dan facebook. PPATK dan SCM telah menayangkan 6 episode "Jadi Tahu" selama 2023 yang telah meraih 361.000 views di media sosial.

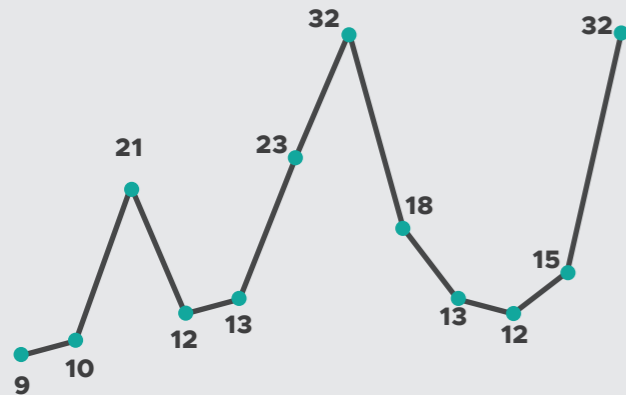
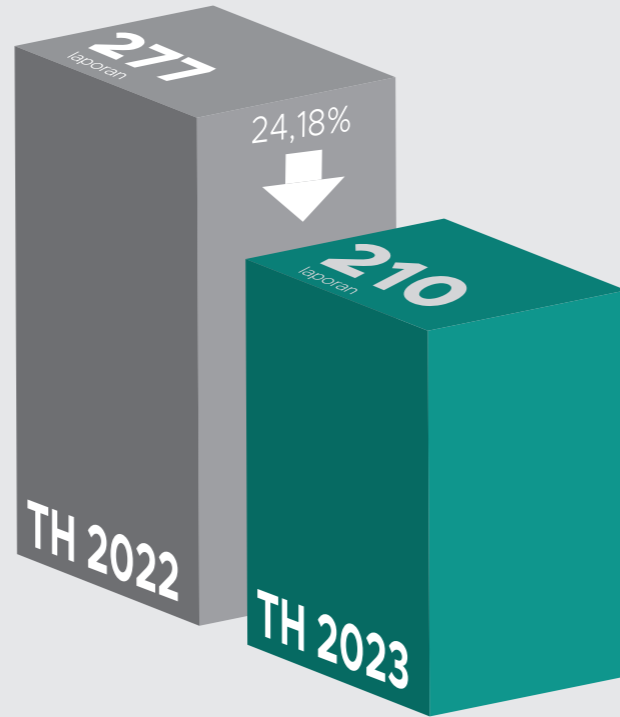
KEGIATAN		
Nama	Jumlah	Audience
PPATK MENGAJAR	8	1000
DISKUSI KONTEMPORER	1	404
AUDIENSI	10	37
KUNJUNGAN SISWA	5	332
JADI TAHU	3	361.000
KERJASAMA MEDIA	2	29
DISKUSI PUBLIK	4	400



PENGADUAN MASYARAKAT

MEMBANGUN MASYARAKAT PEDULI APU-PPT

SALAH satu bentuk *intelligence collection* yang dijalankan oleh PPATK adalah melalui penerimaan laporan pengaduan masyarakat (Dumas). Laporan Dumas berisi pengaduan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, serta tindak pidana lainnya. Terdapat 4 kanal penyampaian Laporan Dumas yaitu Tatap Muka, Surat, E-mail, dan via Aplikasi DUMAS.



Grafik Laporan Pengaduan Masyarakat per bulan
TAHUN 2023

Pada tahun 2023 PPATK menerima sebanyak 210 laporan Dumas yang terdiri atas 95 laporan berasal dari perorangan dan 115 laporan yang berasal dari kelompok/lembaga. Terdapat penurunan jumlah laporan sejumlah 24,18% dibanding jumlah laporan tahun 2022 yang mencapai 277 laporan.

Penerimaan laporan pengaduan masyarakat tertinggi terjadi pada bulan Juli dan Desember 2023 dengan jumlah sebanyak 32 laporan. Adapun frekuensi laporan terendah terjadi pada bulan Januari 2023 dengan jumlah 9 laporan.

Mayoritas laporan pengaduan yang disampaikan ke PPATK berasal dari tindak pidana penipuan/penggelapan dengan jumlah 31,42% dari total laporan yang diterima oleh PPATK.



Statistik Laporan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Afiliasi Masyarakat

30,95%	65	TP Penipuan/Penggelapan
30,95%	65	Non TPPU
16,19%	34	TP Korupsi
4,29%	9	Belum Teridentifikasi
2,38%	5	TP Perpajakan
2,38%	5	TP Lingkungan Hidup
1,90%	4	TP Pertanahan
1,90%	4	TP Perjudian
1,90%	4	TP Perbankan
5,24%	11	TP Lainnya

LAYANAN BANTUAN

PINTU GERBANG PPATK YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN

KEBUTUHAN masyarakat dan stakeholder akan informasi yang terkait dengan PPATK pada tahun 2023 dapat dikatakan cukup tinggi. Layanan Bantuan hadir sebagai "Contact Center" untuk menjembatani antara kebutuhan tersebut. Terdapat 3 kanal komunikasi yang dapat diakses oleh publik yaitu **Call Center**, **Whatsapp Business**, dan juga **Email**.

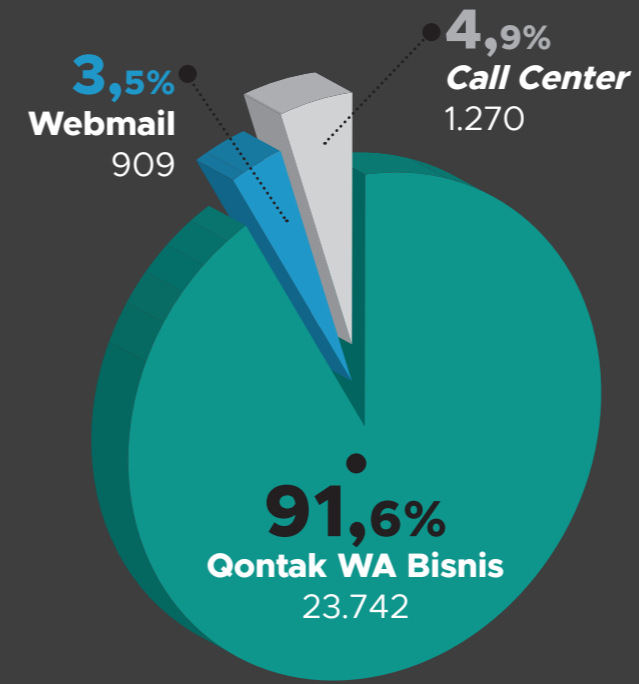
Sepanjang tahun 2023, Tim Layanan Bantuan PPATK menerima 1.270 panggilan masuk. Jumlah panggilan masuk tertinggi berasal dari kategori Profesi sejumlah 627 panggilan. Hal ini diduga terkait dengan peningkatan aktivitas registrasi GoAML yang dilakukan oleh Notaris.

Total percakapan Whatsapp Business yang ditangani oleh tim layanan bantuan selama periode Januari 2023 hingga Desember 2023 adalah 23.742 percakapan. jumlah percakapan paling tinggi terjadi pada Bulan Oktober 2023 dengan jumlah percakapan sebanyak 7.388

percakapan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pertanyaan masuk yang terkait proses seleksi penerimaan CPNS PPATK.

Layanan bantuan melalui webmail juga telah menerima 909 email yang berasal dari pihak-pihak Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Penyedia Barang dan Jasa (PBJ), Profesi, maupun yang terkait dengan pengaduan masyarakat/hubungan masyarakat selama tahun 2023 ini.

Frekuensi email tertinggi berasal dari kategori Profesi sejumlah 384 email. Hal ini juga diduga terkait dengan peningkatan aktivitas registrasi GoAML yang dilakukan oleh Notaris.



Qontak (Whatsapp Bisnis)

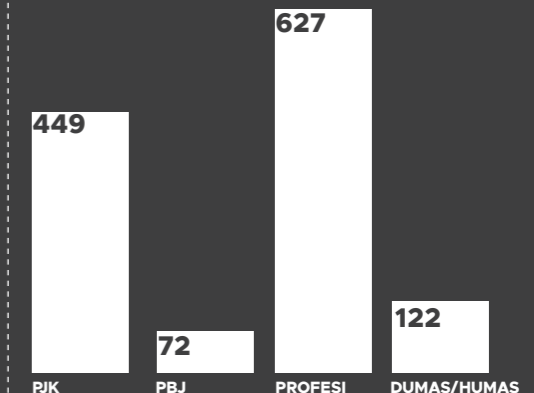
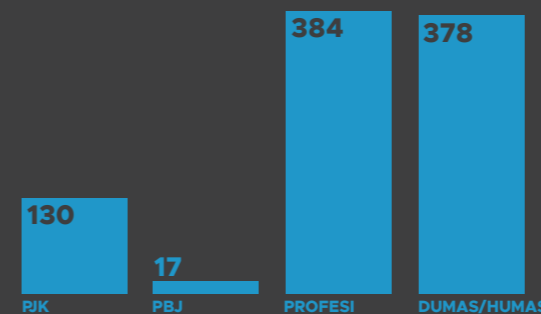
23.742 Percakapan

Rata-rata Waktu Penyelesaian Isu
17 jam **10** menit **5** detik

Hodu Call Center

1.270 panggilan telepon

Webmail 909 E-mail



MEMBANGUN LITERASI APU-PPT

MELALUI PERPUSTAKAAN DAN AMLCFT JOURNAL

LITERASI Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) adalah salah satu bagian dari bentuk edukasi masyarakat dalam rangka pencegahan pencucian uang di masyarakat.

Perpustakaan PPAK mengukung literasi APU-PPT ini melalui layanannya baik dalam bentuk layanan perpustakaan konvensional terotomasi maupun layanan perpustakaan digital. Kini akses literasi APU-PPT dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui **PPATK DIGIPUS (Perpustakaan Digital PPAK)** yang dapat diakses melalui *smartphone* baik yang ber-*platform* Android dan IOS.

Katalog online Perpustakaan PPAK juga telah tersedia dalam bentuk **online public access catalogue - OPAC** yang dapat di akses melalui perpustakaan.ppatk.go.id.

STATISTIK PERPUSTAKAAN PPAK SEMESTER 1 TAHUN 2023

KOLEKSI MONOGRAFI PERPUSTAKAAN

4.364 judul
8.070 eksemplar

KOLEKSI DIGITAL PERPUSTAKAAN

8.513 judul

STATISTIK KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN

586 kunjungan

SIRKULASI PEMINJAMAN KOLEKSI

221 peminjaman

PEMINJAMAN /DOWNLOAD KOLEKSI DIGITAL

417 judul

Di samping itu, literasi APU-PPT juga dilakukan melalui pengembangan literasi karya tulis ilmiah melalui wadah **AML CFT Journal** sebagai bentuk cara memasyarakatkan diskursus APU-PPT pada ranah pemikiran empiris dan akademis yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam mengembangkan literasi kajian APU-PPT. AML CFT Journal telah terbit untuk edisi keduanya pada bulan Juni 2023 ini.

Kontribusi pengembangan karya ilmiah melalui AML CFT Journal ini dilakukan melalui *Open Journal System* yang dapat diakses oleh masyarakat pada journal.ppatk.go.id.

STATISTIK PENGELOLAAN AMLCFT JOURNAL SEMESTER 1 TAHUN 2023

43 naskah masuk
12 naskah terbit
26 naskah dalam review
5 naskah ditolak

Akses Artikel Tertinggi (View/Download)

1.307

ARTIKEL: Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPAK sebagai Alat Bukti pada Penanganan Perkara Pencucian Uang | Hasan



23.381
PENGUNJUNG OPEN JOURNAL SYSTEM AMLCFT JOURNAL

5 Besar Asal Negara Pengakses AMLCFT Journal:

INDONESIA	7.056
USA	600
SINGAPURA	486
INDIA	117
MALAYSIA	85



PENGAWASAN INTERNAL

SELAMA tahun 2023, Inspektorat PPATK sudah menyelenggarakan pengawasan internal mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan tata kelola, manajemen risiko, dan juga pengendalian internal di lingkungan PPATK. Pada tahun 2023 Inspektorat PPATK berhasil melampaui target *output* pengawasan internal yang telah ditetapkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023. Capaian target *output* Inspektorat PPATK dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1. Capaian Realisasi Pengawasan Internal Tahun 2023

Jenis <i>Output</i> Pengawasan Internal	Target TA 2023	Realisasi TA 2023
Perencanaan Pengawasan Internal	6 Dokumen	6 Dokumen
Pelaksanaan Pengawasan Internal	65 Laporan	84 Laporan
Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Internal	8 Laporan	8 Laporan
Jumlah	79 Output	98 Ouput

Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan PPATK mencakup pelaksanaan Audit Kinerja, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya. Adapun highlight dari

kegiatan pengawasan internal di PPATK adalah sebagai berikut:

STATISTIK AUDIT INTERNAL

Inspektorat PPATK telah melaksanakan kegiatan audit berbasis risiko, yaitu teknik audit dimana seluruh kegiatan dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, hingga pelaporan hasil audit dilaksanakan berbasis pada tingkat risiko yang telah ditetapkan bersama di level unit kerja dan di level organisasi. Di samping itu, Inspektorat PPATK juga melaksanakan audit yang dilaksanakan berdasarkan amanat/ permintaan regulator.

Selama tahun 2023, Inspektorat PPATK telah melaksanakan kegiatan audit sebanyak 12 kali, yang terdiri atas 7 audit kinerja dan 5 audit IT dengan rincian sebagai berikut:

1. Audit Kinerja Terinci pada Direktorat Pelaporan Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022;
2. Audit Kinerja Pendahuluan Proses Bisnis Monev Kualitas dan Tindak Lanjut Produk Intelijen Keuangan;

3. Audit Kinerja Terinci Proses Bisnis Monev Kualitas dan Tindak Lanjut Produk Intelijen Keuangan;
4. Audit Kinerja pada Direktorat Strategi dan Kerjasama Internasional;
5. Probity Audit atas Pengadaan Pembangunan Studio Multimedia dan Perpustakaan di Pusdiklat APU-PPT TA 2023;
6. Audit Kinerja Pendahuluan pada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana;
7. Audit Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan PPATK;
8. Audit Aplikasi SISPEKA;
9. Audit Aplikasi SPBE;
10. Audit Infrastuktur SPBE;
11. Audit Keamanan Aplikasi; dan
12. Audit Keamanan Pusat Data berdasarkan ISO 27001:2022.

SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS PPATK

Dalam rangka upaya pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 8 huruf c dan huruf e, dan Pasal 10 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) kepada seluruh lembaga publik meliputi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia termasuk PPATK.

Pada tahun 2023, PPATK telah melaksanakan SPI di lingkungan PPATK. SPI PPATK tahun 2023 dilaksanakan melalui survei kepada kelompok responden meliputi responden internal, eksternal dan eksper. Dalam kegiatan ini, Inspektorat PPATK melakukan pemantauan dan evaluasi dengan melakukan pengecekan dashboard SPI terhadap responden yang telah melakukan pengisian survei. Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan SPI tahun 2023 terdapat 598 responden dari total populasi 1.826 responden yang sudah mengisi Survei Penilaian Integritas (SPI) yang terdiri dari responden internal, eksternal dan eksper dengan rincian sebagai berikut:



Rekapitulasi Perolehan Responden PPATK Tahun 2023

Kriteria	Populasi	Responden terpilih oleh KPK	Target	Perolehan	% Respon Rate
Internal	345	345	183	217	62,90%
Eksternal	1.462	1.440	325	366	25,42%
Ekspert	19	23	14	15	65,22%
Total	1.826	1.808	522	598	33,07%

Dari evaluasi pelaksanaan pengisian SPI PPATK tahun 2023, respon rate pengisian survei penilaian integritas PPATK mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, respon rate tahun 2023 sebesar 33,07% sedangkan tahun 2022 sebesar 24,07%.

Hingga laporan ini disusun, Hasil Indeks Integritas tahun 2023 belum diumumkan oleh KPK. Pada Tahun 2022, Indeks Integritas PPATK ialah sebesar 86,43.

PENJAMINAN KUALITAS ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pada tahun 2023, Inspektorat PPATK melaksanakan kegiatan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan PPATK dengan Surat Tugas Nomor PW.02.01/44/

VI/2023 tanggal 16 Juni 2023. Penjaminan Kualitas ini dilakukan sebelum penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP di PPATK dievaluasi oleh BPKP. Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan PPATK Tahun 2023, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan PPATK Tahun 2023

Komponen Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP PPATK TA 2023	Bobot Unsur	Skor	Nilai
Penetapan Tujuan	40%	5,000	2,000
Struktur dan Proses	30%	4,333	1,300
Pencapaian Tujuan	30%	4,000	1,200
Skor Maturitas SPIP PPATK menurut PK	100%		4,500

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan PPATK yang dilakukan oleh BPKP Nomor PE.09.03/SP-68/D1/01/2023 tanggal 28 Desember 2023, skor maturitas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan PPATK ditetapkan sebesar 3,900.

Pada tahun 2023, Inspektorat berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yaitu nilai *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) PPATK. Inspektorat berhasil memperoleh nilai 3,47 dari target nilai 3, yang menggambarkan bahwa Inspektorat telah memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan dan menindaklanjuti *Area of Improvement* (AOI) dalam rangka peningkatan Level IA-CM menuju nilai 4.

STATISTIK EVALUASI AKIP PPATK

Pada tahun 2023, Inspektorat PPATK telah melaksanakan kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada PPATK

Tahun 2022 dengan didasari oleh Surat Tugas Kepala PPATK Nomor PW.02.01/19/III/2023 dan Perpanjangan Surat Tugas Kepala PPATK Nomor PW.02.01/30/IV/2023. Kegiatan evaluasi ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan. Selain itu, atas hasil evaluasi ini juga diharapkan dapat mendorong PPATK untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada PPATK Tahun 2022, nilai AKIP pada PPATK tahun 2023 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP tahun 2022 memperoleh nilai 78,61 Kategori Baik dengan Predikat "BB". Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Rincian Hasil Penilaian Komponen Evaluasi AKIP PPATK

Komponen Evaluasi AKIP	Bobot	Bobot Sub Komponen Nilai			Total Nilai
		Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
Perencanaan Kinerja	30%	5,40	6,30	12,00	23,70
Pengukuran Kinerja	30%	5,40	7,00	10,50	22,88
Pelaporan Kinerja	15%	2,70	3,60	5,30	11,53
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	4,50	6,00	10,00	20,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%	18,00	22,90	37,80	78,61



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pada tahun 2023, Inspektorat telah melakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pembangunan ZI di Unit Kerja. Sebagai informasi, terdapat 4 Unit Kerja yang diusulkan untuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 1 Unit Kerja yang diusulkan untuk Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan tabel 1. Untuk mengawasi dan mengawal hal tersebut, Inspektorat telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemantauan Pembangunan Zona Integritas;
2. Pendampingan Penyelenggaraan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP);
3. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas.

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan Zona Integritas, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel Daftar Unit Kerja dan Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Zona Integritas

No.	Unit Kerja	Usulan WBK/ WBBM	Nilai TPI
1.	Pusdiklat APU-PPT	WBBM	98,79
2.	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	WBK	89,41

No.	Unit Kerja	Usulan WBK/ WBBM	Nilai TPI
3.	Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I	WBK	91,62
4.	Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II	WBK	90,20
5.	Direktorat Analisis dan Pemeriksaan III	WBK	89,58

Dari 5 Unit Kerja yang diusulkan WBK/ WBBM pada tahun 2023 seperti tabel diatas, terdapat satu unit kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK yaitu Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri.

EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PPATK TA 2023

Untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di PPATK, Inspektorat telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Evaluasi Perencanaan (*Ex-Ante*) Reformasi Birokrasi;
2. Evaluasi Pelaksanaan (*On-Going*) Reformasi Birokrasi Triwulan III 2023;
3. Evaluasi Pelaksanaan (*On-Going*) Reformasi Birokrasi Triwulan IV 2023.

Dalam menilai ketercapaian rencana aksi, status rencana aksi dapat dikelompokkan ke dalam 4 kondisi yaitu:

Tabel jenis status rencana aksi RB

No	Jenis Catatan	Keterangan
1	Tercapai	Narasi & Data Dukung sudah sesuai (lengkap) dan targetnya tercapai
2	Dalam Proses	Narasi & Data dukung sudah sesuai (lengkap), namun targetnya tidak tercapai
3	Belum lengkap	Narasi & Data Dukung sudah diisi namun belum lengkap.
4	Belum diisi	Narasi & data dukung belum diisi
5	Perlu Dilakukan Penyesuaian	Narasi & Data dukung tidak sesuai/relevan dengan rencana aksi/target

Selanjutnya, hasil rekapitulasi atas data capaian rencana aksi RB sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel status rencana aksi RB

Keterangan	Renaksi RB General	Renaksi RB Tematik
Sudah Selesai	69	28
Dalam Proses	7	1
Belum lengkap	19	4
Belum diisi	14	0
Perlu Dilakukan Penyesuaian	5	1
Jumlah	114	34

Terdapat beberapa rekomendasi yang telah dikeluarkan Inspektorat untuk menjaga pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sejumlah rekomendasi tersebut juga telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja terkait.

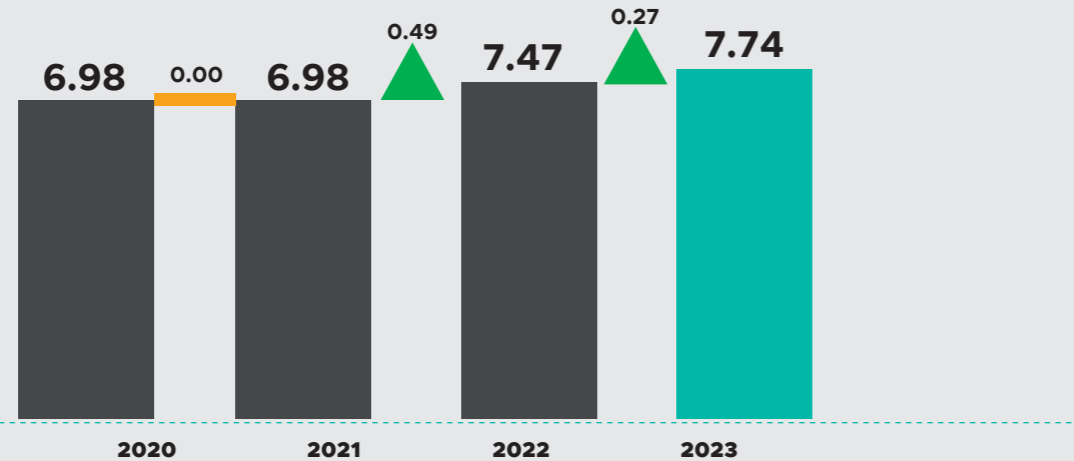


INDEKS EFEKTIVITAS KINERJA PPATK

INDEKS Efektivitas (IE) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) merupakan indeks komposit yang mengukur tingkat efektivitas peran PPATK dalam Pencegahan dan TPPU dan TPPT. Sebagai sebuah variabel konstruk yang cakupannya luas dan komprehensif, kerangka teori dari Indeks Pencegahan dan Pemberantasan TPPU/TPPT didekati melalui dua sub indeks, yaitu Sub Indeks Pencegahan TPPU/TPPT dan Sub Indeks Pemberantasan TPPU/TPPT. Setiap sub indeks dijabarkan menjadi 6 dimensi penyusun

sesuai dengan bisnis proses pada masing-masing sub indeks tersebut.

Perhitungan indeks kinerja PPATK dilakukan melalui proses yang cukup panjang sehingga menghasilkan sebuah indeks yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan kinerja PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT di Indonesia selama tahun 2022 mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari kenaikan IE sebesar 0.27 dari tahun 2021 sebesar 7.47 menjadi 7.74 di tahun 2023. Pada tahun 2023, untuk pertama kalinya capaian kinerja PPATK tergolong sangat efektif.



PENGHARGAAN & PENCAPAIAN 2023



TRACK-AML INDONESIA RAIH POSISI KE-3 DALAM AML HACKATHON 2023

INOVASI CERDAS LAWAN KEJAHATAN KEUANGAN

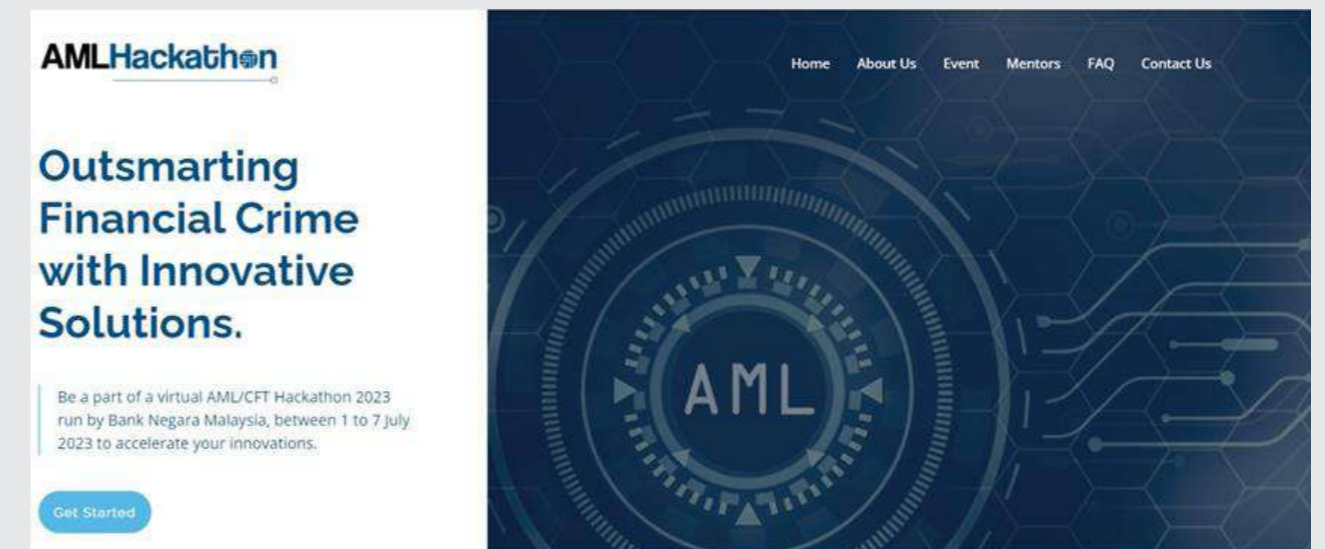
TRACK-AML Indonesia berhasil meraih prestasi luar biasa dengan meraih peringkat ke-3 dalam AML Hackathon 2023, sebuah kompetisi yang diselenggarakan oleh *Financial Intelligence Consultative Group* dan Bank Negara Malaysia dengan tema "Outsmarting Financial Crime with Innovative Solutions".

Latar belakang tema ini yaitu penambangan pasir ilegal dengan solusi inovatif menggunakan *machine learning* dan analisis citra satelit untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak penambangan pasir ilegal terhadap lingkungan pulau. Kompetisi ini diikuti oleh lebih dari 45 tim dari berbagai negara yang berlomba menghadirkan solusi inovatif untuk mengatasi kejahatan keuangan.

Tim Track-AML Indonesia, yang terdiri dari anggota berbakat yaitu Aman Subanjar, Yudhitia Mustika Sari, Setyo Nugroho, Khalilur Rahman, dan Nurman Setyawan, berhasil menunjukkan kemampuan unggul mereka dalam bidang ini. Mereka adalah perwakilan dari pegawai Pusat Teknologi Informasi (LOGIS) PPATK.

Kegiatan ini dimulai pada tanggal 20 April 2023 dan berakhir pada tanggal 7 Agustus 2023. AML Hackathon tahun ini melibatkan proses seleksi dan eliminasi yang komprehensif. Proses ini melibatkan *mentorship* dari para ahli di bidang *Data Science, Anti Money Laundering, Law Enforcement*, dan *Financial Expert (Industry Expert)*. Tahapan eliminasi melibatkan penilaian proposal, pembuatan video penjelasan, dan *prototyping* konsep (*Proof on Concept*) sebelum mencapai babak 5 besar. Final kemudian dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2023.

Prestasi Track-AML Indonesia menjadi cerminan dari dedikasi dan kemampuan luar biasa dari tim tersebut. Di samping hal tersebut, Indonesia juga menjadi salah satu juri dalam kompetisi ini yang diwakilkan oleh Arief Kurniawan. Dengan hal tersebut, Indonesia diharapkan mendapat pemahaman dan ide baru dari peserta lain dalam menghadapi tantangan kejahatan keuangan dengan solusi yang inovatif dan efektif.



BECA AWARD

BEST EGMONT CASE AWARD KOMPETISI ANTAR FIU SELURUH DUNIA

PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* Indonesia berhasil menjadi Juara dalam perhelatan kompetisi *Best Egmont Case Award* (BECA) 2023, yang diselenggarakan dalam Kompetisi BECA merupakan kompetisi yang diikuti oleh 166 FIU di seluruh dunia untuk memaparkan pencapaian kasus terbaik pada masing-masing FIU. PPATK sendiri telah mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi sejak Februari 2023 untuk memilih dan menyiapkan proposal kasus untuk dikirimkan kepada Tim Penilai.

Aspek yang dinilai dalam kompetisi ini adalah keefektifan kasus, fokus kerja FIU, demonstrasi kasus yang jelas, serta keterlibatan koordinasi dan kolaborasi baik secara domestik maupun internasional.

Pada tanggal 23 Juni 2023 Sekretariat Egmont menyampaikan

bahwa FIU Indonesia (PPATK) dan FIU Prancis (TRACFIN) terpilih sebagai 2 finalis BECA. Kedua finalis kemudian diminta untuk memaparkan kasus pada *29th The Egmont Group Plenary*, pada Kamis, 6 Juli 2023, di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

PPATK memaparkan kasus tindak pidana pendanaan terorisme yang melibatkan penyalahgunaan donasi dari luar negeri untuk mendukung entitas teroris tertentu. Adapun TRACFIN memaparkan kasus tindak pidana pendanaan terorisme yang melibatkan penggunaan aset kripto.

Pada saat pengumuman pemenang, PPATK dinyatakan sebagai juara Kompetisi BECA 2023 melalui *voting* yang diberikan oleh seluruh FIU anggota Egmont yang hadir pada acara tersebut.

Kemenangan pada Kompetisi BECA 2023 ini menunjukkan bahwa

Indonesia tidak hanya mengungguli 165 negara, namun juga terbukti memiliki kompetensi dan profesionalisme untuk dapat

menangani sebuah kasus kompleks yang dapat menjadi contoh bagi FIU di seluruh dunia.



PPATK RAIH RAN PE AWARDS 2023

DARI BNPT PADA PILAR III (KEMITRAAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL)

BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menganugerahkan RAN PE Awards Tahun 2023 kepada PPATK pada kategori Berkomitmen pada Pilar III tentang Kemitraan dan Kerja Sama Internasional. RAN PE Award diberikan oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Boy Rafli Amar yang diterima oleh Deputy Bidang Strategi dan Kerja Sama PPATK, Dr. Tuti Wahyuningsih pada 10 Maret 2023 di Jakarta. RAN PE merupakan rencana aksi nasional pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021.

Penghargaan ini diraih oleh PPATK dikarenakan pelaksanaan aksi-aksi dalam RAN PE secara konsisten dan konstruktif oleh PPATK pada Pilar III yang dipandang oleh BNPT sebagai *champion*

stories, diantaranya peran strategis PPATK penyediaan informasi terkait analisis transaksi keuangan dan *platform* sistem pertukaran informasi pendanaan terorisme terpadu antar Kementerian/Lembaga. Kerja sama pertukaran informasi tersebut membawa manfaat pada penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Selain itu, PPATK berperan aktif dalam berbagai forum internasional baik bilateral, regional maupun multilateral terkait dengan terorisme dan pendanaan terorisme diantaranya dalam *Counter ISIS Finance Group (CIFG) meeting*, *Financial Intelligence Consultative Group (FICG) of Counter Terrorist Financing*, dan Pertemuan Konsultasi Bilateral Penanggulangan Terorisme antara Indonesia dan Australia.



PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

PERINGKAT PERTAMA KATEGORI INSTANSI PUSAT

PPATK mencapai peringkat pertama pada kategori Instansi Pusat pada Pemantauan dan Evaluasi Mandiri Perkembangan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di PPATK Tahun 2022 dengan **skor kematangan sebesar 93,61% (optimum)**.

Pemantauan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2022 dalam bentuk penilaian mandiri dan pemenuhan bukti dukung

atas 8 aspek penyelenggaraan Sumber Daya Insani (Regulasi; Kelembagaan; SDM; Penganggaran; Koordinasi; Pengelolaan dan Pemanfaatan Data; Teknologi dan Informasi; dan Penyelenggaraan). Pemantauan ini diikuti oleh 50 Kementerian/Lembaga (tingkat pusat) dan 28 Pemerintah Daerah Provinsi (tingkat daerah).

No.	Instansi	Skor	Kategori
1.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	93.6%	Optimum
2.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	89.2%	Optimum
3.	Kementerian Pertanian	83.5%	Optimum
4.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	80.6%	Optimum
5.	Badan Pusat Statistik	79.4%	Terpadu dan Terukur
6.	Kementerian Keuangan	78.5%	Terpadu dan Terukur
7.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	68.8%	Terpadu dan Terukur
8.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	68.2%	Terpadu dan Terukur
9.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	65.8%	Terpadu dan Terukur
10.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	62.9%	Terpadu dan Terukur

Catatan: Rata-rata skor nasional pada Instansi Pusat sebesar 49,52%.

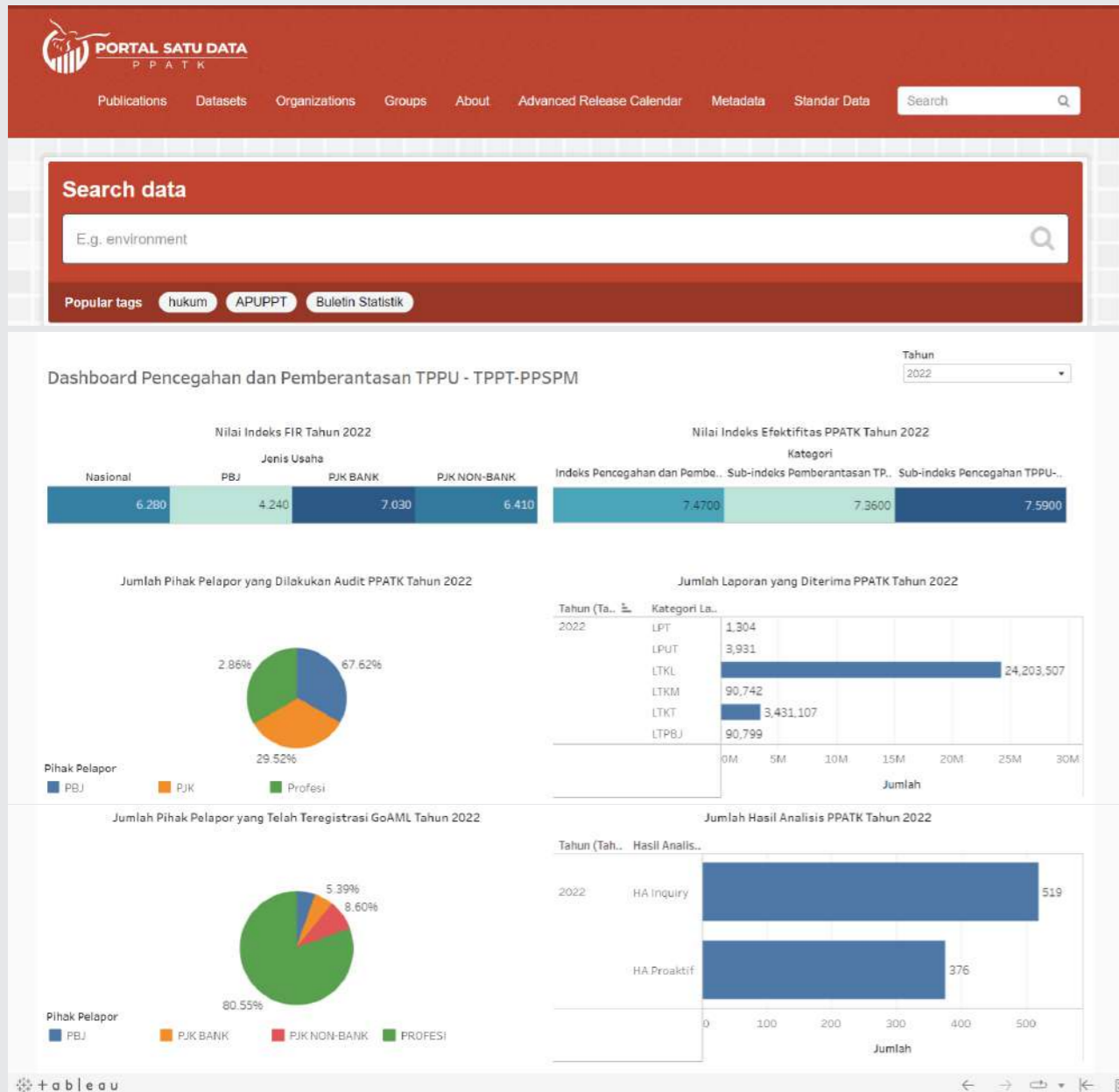
Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan SDI tingkat pusat dan daerah yang diikuti oleh 50 Kementerian Lembaga dan 28 Pemerintah Daerah Provinsi



Dashboard Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan SDI Kementerian/ Lembaga

(Sumber: Portal SDI BAPPENAS <https://data.go.id>)





Tampilan Portal Satu Data PPATK
(Sumber : <https://satudata.ppatk.go.id>)

Portal Satu Data PPATK adalah media bagi pakai data PPATK yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh PPATK untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Portal Satu Data PPATK merupakan bentuk implementasi dari Peraturan PPATK Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Satu Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai perwujudan kebijakan Satu Data Indonesia.

Portal Satu Data PPATK dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek interoperabilitas data dengan Portal Satu Data Indonesia yang

dilakukan melalui mekanisme *API Web Service*. Selain itu pengintegrasian data juga mengacu kepada peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik dan peraturan PPATK mengenai klasifikasi informasi di lingkungan PPATK.

BKN AWARD 2023

KATEGORI UTAMA IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN TERBAIK

BADAN Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan acara penghargaan BKN Award Tahun 2023 pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2023 yang diselenggarakan di Kota Bandung pada tanggal 30 Mei 2023.

Acara ini merupakan penyelenggaraan yang kesembilan sejak BKN Award pertama

kali diluncurkan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk memacu kinerja K/L/D dalam melaksanakan implementasi manajemen ASN.

Penghargaan ini diharapkan dapat memacu PPATK untuk lebih meningkatkan kinerja terutama di bidang pengelolaan sumber daya manusia dan tata laksana organisasi.

PPATK Meraih 3 Penghargaan pada BKN Award 2023:

1. Kategori Utama NSPK Manajemen ASN Terbaik
2. Peringkat ke-4 Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian untuk Instansi Pemerintah Non-Kementerian tipe kecil
3. Peringkat ke-4 pada Kategori Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT untuk Instansi Pemerintah Non-Kementerian Tipe Kecil



PREDIKAT AA

“SANGAT MEMUASKAN” KEARSIPAN PPATK

PADA Tanggal 22 Mei 2023, bertepatan dengan puncak peringatan Hari Kearsipan ke-52 tahun 2023 di Banyuwangi, Jawa Timur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar

Annas memberikan penghargaan anugerah kearsipan.

Berdasarkan Pengumuman Nomor : AK.01.02/25/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun

2022 serta Keputusan Kepala ANRI Nomor 421 Tahun 2022, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mendapatkan nilai **93,96 (AA “Sangat Memuaskan”)** dengan kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, dan Lembaga Non Struktural.

Sebagai informasi, jumlah institusi yang dilakukan pengawasan kearsipan tingkat pusat tahun 2022 terdiri dari 79 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi dan 422 Kabupaten/Kota yang secara keseluruhan berjumlah 548 Instansi.



PPATK RAIH PENGHARGAAN DARI BNN

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima Penghargaan Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotik yang di serahkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional(BNN) RI Komisariss Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose, kepada Kepala PPATK, Dr. Ivan Yustiavandana.

Penghargaan ini diserahkan pada malam puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2023 yang di selenggarakan oleh BNN RI bersama dengan seluruh elemen bangsa serta perwakilan negara-negara sahabat di Garuda Wisnu Kencana, Badung Bali, pada Senin, 26 Juni 2023. Pada tahun 2023, HANI mengusung tema internasional : *"People first: stop stigma and discrimination, strengthen prevention"*, sedangkan tema nasional HANI adalah : *"Akselerasi War On Drugs Menuju Indonesia Bersinar"*.

Kepala PPATK mengapresiasi atas capaian PPATK karena upaya pencegahan pencucian uang melalui tindak pidana asal narkotika adalah tugas yang selalu ditunaikan setiap saat.

"Apalagi narkoba adalah tindak pidana asal pencucian uang nomor satu paling rentan dilakukan oleh pelakunya, sebagaimana hasil Penilaian Risiko Nasional Pencucian Uang tahun 2021," ungkapnya.

Peringatan HANI dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dunia terhadap korban penyalahgunaan narkoba sekaligus wujud perlawanan terhadap salah satu kejahatan



luar biasa (*extraordinary crime*) yang menjadi tantangan negara-negara di seluruh dunia. Peringatan HANI menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan masalah utama yang ditimbulkan oleh narkoba, yaitu *loss generation*. (MT)



SINERGI PPAK - DITJEN PAJAK

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PAJAK

DEPUTI Strategi dan Kerja Sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Tuti Wahyuningsih memberi pengarahan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penegakan Hukum Pajak Tahun 2023 bertempat di Aula Cakti Buddi Bhakti, Gerung Mar'ie Muhammad Direktorat Jenderal Pajak. Acara yang diselenggarakan secara *hybrid* ini dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo dan dihadiri oleh sejumlah mitra strategis penegak hukum serta perwakilan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dari seluruh Indonesia.

"Kerja Sama antara PPAK dengan Direktorat Jenderal Pajak sudah terjalin sejak lama" ungkap Tuti. Lebih lanjut Tuti menyampaikan bentuk kerja sama tersebut antara lain melalui pertukaran informasi, perumusan produk hukum dan penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Perpajakan.





Deputi wanita pertama PPATK ini menjelaskan bahwa upaya untuk pemaksimalan pemulihan aset merupakan salah satu upaya yang tak kalah penting, yakni dengan menggabungkan penyidikan tindak pidana perpajakan dengan TPPU, karena ada beberapa bentuk harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah tersamarkan dari hasil usaha dan hasil investasi sah yang sulit untuk dijangkau.

“Dengan adanya TPPU, maka objek harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah tersamarkan tersebut adalah perwujudan dari perbuatan TPPU dan termasuk sebagai objek yang dapat disita atau dirampas dalam TPPU,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, wanita yang pernah menjadi Konsul Jenderal RI *Vancouver*



ini menerima secara simbolis penghargaan bagi PPATK sebagai Mitra Kerja Terbaik terkait Sinergi dalam Meningkatkan Kinerja Penegakan Hukum Pidana Pajak Tahun 2022.

PENGHARGAAN UNTUK PUSDIKLAT APU-PPT

Dalam Rakornas ini, PPATK juga mendapatkan penghargaan sebagai Mitra Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia Terbaik Tahun 2022 yang diterima oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme PPATK (Pusdiklat APU-PPT), Akhyar Effendi. (DF/MT)





PARTISIPASI DAN PRESTASI PPATK DALAM MENDUKUNG KEKETUAAN ASEAN 2023

DALAM rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Keketuaan ASEAN 2023, PPATK melalui Kelompok Hubungan Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Strategi Komunikasi dan Konten Tematik Keketuaan ASEAN 2023. Dalam hal ini, PPATK berpartisipasi dalam diseminasi dan penyusunan konten terkait peran PPATK

dengan negara-negara ASEAN. Tujuannya agar amplifikasi pesan terkait Keketuaan ASEAN Indonesia tahun ini dapat disebarluaskan secara masif serta dapat dipahami dengan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sehingga berdampak pada dukungan masyarakat terkait kegiatan KTT ASEAN di Indonesia.



Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan Kompetisi Pembuatan Konten Kreatif oleh seluruh peserta Bimbingan Teknis yang terdiri dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. PPATK turut berpartisipasi dalam kompetisi ini dengan membuat video vlog terkait pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat sebagai tuan rumah pelaksanaan KTT ASEAN, yakni Gua Batu Cermin. Hasilnya, PPATK mampu meraih Juara II dari ribuan peserta yang berpartisipasi. Berikut daftar pemenang dari kompetisi pembuatan konten kreatif Keketuaan ASEAN 2023 :

- Juara I oleh Kementerian Badan Usahan Milik Negara
- **Juara II oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**
- Juara III oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Juara IV oleh Kementerian Agama



GATRA AWARD KATEGORI PENEGAKAN HUKUM



PPATK mendapatkan penghargaan Gatra Awards Tahun 2023 Kategori Hukum terhadap Apresiasi Kerja Atas Unsur Inovasi, Transformasi, Reformasi, Penciptaan Daya Saing dan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi media atas komitmen penuh PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) di Indonesia.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali meraih predikat “Informatif” dengan nilai 96,25 atas Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat dan Badan Publik Terbaik dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi. Predikat ini merupakan

predikat tertinggi dalam capaian monitoring dan evaluasi layanan informasi publik di seluruh lembaga pemerintah di Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden pada tanggal 19 Desember 2023.



Dalam acara ini, PPATK juga berhasil memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Terbaik, yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), dan diterima oleh Sekretaris Utama PPATK, Bapak Alberd Teddy Benhard Sianipar.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik telah dimulai sejak bulan Juli 2023, diawali dengan pengisian

kuesioner, verifikasi kursorer pada portal e-monev.komisiinformasi.go.id dan dilanjutkan dengan tahap uji publik bagi badan publik yang memperoleh nilai di atas ambang batas, visitasi, dan terakhir penganugerahan. Atas capaian yang diraih tahun 2023, PPATK berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik demi terciptanya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.





Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memperoleh penghargaan Gakkum Awards Tahun 2023

GAKKUM AWARDS TAHUN 2023

PPATK PROAKTIF BERGERAK DAN BERKOMITMEN Mendukung PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperoleh penghargaan “Gakkum Awards Tahun 2023” dari Menteri LHK Siti Nurbaya pada Rapat Koordinasi Penegakan Hukum (Rakor Gakkum) Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (7/12). Penghargaan ini diterima langsung oleh Sekretaris Utama PPATK Alberd T.B. Sianipar.

Pada rakor yang dibuka secara resmi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) ini, disampaikan penghargaan kepada para pihak yang secara proaktif bergerak dan berkomitmen penuh mendukung upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan selama ini, untuk kategori institusi maupun kategori individu “Para Pejuang Lingkungan”.



BAZNAS AWARD 2023

PPATK SEBAGAI
LEMBAGA PENDUKUNG
EKOSISTEM ZAKAT

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memperoleh penghargaan pada Baznas Award 2023 kategori Lembaga Pendukung Ekosistem Zakat Sejahteraan Ummat pada Selasa 21 Maret 2023 yang diselenggarakan di Hotel Sahid Jakarta.

Penghargaan ini diperoleh PPATK sebagai apresiasi terhadap kinerja organisasi pengelola zakat yang turut mendukung dan mendorong kebangkitan zakat di Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berharap PPATK sebagai lembaga pendukung ekosistem zakat dapat terus mendukung kegiatan Baznas selaku pengumpul zakat sehingga perolehan zakat di Indonesia dapat terus meningkat.





ISO 37001

“STANDARDISASI UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI

PPATK menerima sertifikat ISO 37001 yang diberikan oleh BSN. ISO 37001 merupakan sebuah standar yang dirilis sejak 2016, yang mengatur tentang sistem manajemen anti penyuapan atau yang dikenal dengan istilah SMAP. Pada rangkaian Bulan Mutu Nasional 2023 ini, BSN mengambil tema “Standardisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”.

Sertifikat ini diterima langsung oleh Sekretaris Utama PPATK, Alberd Teddy Benhard Sianipar dalam acara Pembukaan Bulan Mutu Nasional dan Seminar Nasional Standardisasi oleh BSN, di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian yang dilaksanakan di Balai Sidang JCC, Jakarta (13/11).



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN



INDONESIA
OFFICIAL 40th MEMBER
SINCE OCTOBER 2023



PUSDIKLAT APUPPT TERIMA PENGHARGAAN KERJA SAMA KOMPETENSI AWARD 2023



KOMPETENSI AWARD 2023

PUSDIKLAT APU-PPT TERIMA PENGHARGAAN KERJASAMA KOMPETENSI AWARD 2023

PUSAT Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU-PPT) menerima Penghargaan Kerja Sama Kompetensi Award pada acara Penyerahan Sertifikat Akreditasi dan Penghargaan Lainnya Badan POM Awards, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM), Selasa (19/12).

Penghargaan diberikan oleh Plt. Kepala Badan POM, L. Rizka Andalusia kepada Kepala Pusdiklat APU-PPT, dengan predikat sebagai Instansi dengan Pengembangan Kompetensi Lintas Sektor Terbaik Tahun 2023 dalam kategori Kerjasama Pelatihan Teknis.

Akhyar Effendi mengungkapkan bahwa ini merupakan bentuk apresiasi kolaborasi

dan kontribusi nyata dalam meningkatkan kompetensi teknis dalam bidang APU-PPT bagi para pengawas obat dan makanan di lingkungan BPOM.

"Tentunya kita berharap sinergi dan kerja sama pengembangan kompetensi tersebut dapat terus berjalan dan bukan tidak mungkin lebih berkembang dengan isu dan tren tipologi tekini," ungkap Akhyar.



GLOSARIUM

AI	<i>Artificial Intelligence</i>	CAT	<i>Collaborative Analysis Team</i>	ISO	<i>International Organization for Standardization</i>	Nilai Inti	"Prinsip-prinsip atau keyakinan dasar yang dipegang teguh seorang individu atau organisasi dalam menjalankan aktivitasnya"
AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	CBCC	<i>Cross Border Cash Carrier</i>	ITKP	Indeks Tata Kelola Pengadaan	NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
AML	<i>Anti Money Laundering</i>	CIFG	<i>Counter ISIS Finance Group</i>	K/L/D	Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nominee	"Seseorang atau perusahaan yang namanya digunakan untuk pembelian suatu benda seperti saham, tanah dan bangunan, dan lainnya tetapi sebenarnya bukan pemilik asli dari benda tersebut"
AML CTF	<i>Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing</i>	CSM	<i>Cyber Security Maturity</i>	KAMI	Keamanan Informasi	NPSK	Norma Standar Prosedur dan Kriteria
ANRI	Arsip Nasional Republik Indonesia	Dirjen AHU	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	KPA	Kuasa Pengguna Anggaran	NRA	<i>National Risk Assessment</i>
Apgakum	Aparat Penegak Hukum	Ditjen	Direktorat Jenderal	KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi	NSPK	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
APH	Aparat Penegak Hukum	DJP	Direktorat Jenderal Pajak	KPU	Komisi Pemilihan Umum	OPAC	<i>Online Public Access Catalogue</i>
APU-PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	DTTOT	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris	KSP	Koperasi Simpan Pinjam	P3DN	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>	DUMAS	Pengaduan Masyarakat	KTT	Konferensi Tingkat Tinggi	PANRB	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ASN	Aparatur Sipil Negara	FATF	<i>Financial Action Task Force</i>	KUPVA	Kelompok Usaha Penukaran Valuta Asing	PBJ	Penyedia Barang dan Jasa
BAPEBTI	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	FGD	<i>Focus Group Discussion</i>	KYE	<i>Know Your Employee</i>	PBJP	Penyedia Barang dan/atau Jasa dan Profesi
BAWASLU	Badan Pengawas Pemilihan Umum	FICG	<i>Financial Intelligence Consutative Group</i>	LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	PDG	<i>Policy Development Group</i>
BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional	FinCEN	<i>Financial Crimes Enforcement</i>	LO	Laporan Operasional	Pemblokiran	"Tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka
BCMS	<i>Business Continuity Management System</i>	FIR on ML/TF	<i>Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing</i>	LP3K	Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan		
BECA AWARD	<i>Best Agmont Case Award</i>	FIU	<i>Financial Intelligence Unit</i>	LPJK	Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan		
BI	Bank Indonesia	GFC	<i>Green Financial Crime</i>	LPP	Lembaga Pengawas Pengatur		
BKN	Badan Kepegawaian Negara	HA	Hasil Analisis	LPSDK	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye		
BMN	Barang Milik Negara	HANI	Hari Anti Narkotika Internasional	Menkop dan UKM	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
BNN RI	Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia	HP	Hasil Pemeriksaan	MER	<i>Mutual Evaluation Report</i>		
BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	ICRG	<i>International Cooperation Review Group</i>	MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>		
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	IE	Indeks Efektivitas	MTN	<i>Medium Term Notes</i>		
BPOM	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	IFTI	<i>International Funds Transfer Instruction</i>	MYR	Malaysian Ringgit		
BPR	Bank Perkreditan Rakyat	IKK	Indikator Kinerja Kegiatan	NII	Negara Islam Indonesia		
BSN	Badan Standardisasi Nasional	IKU	Indikator Kinerja Utama				
BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara	INF	Informasi				
		IO	<i>Immediate Outcome</i>				
		ISIS	<i>Islamic State of Iraq and Syria</i>				



GLOSARIUM

	waktu tertentu"
Pemilu	Pemilihan Umum
Pencucian Uang	"Suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/ dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal"
Pendanaan Terorisme	"Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris."
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
PJK	Penyedia Jasa Keuangan
PJP LR	Penyelenggara Jasa Pembayaran Layanan Remitansi
PKPT	Program Kerja Pengawasan Tahunan
PKS	Perjanjian Kerja Sama
PMI	Pekerja Migran Indonesia
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMPJ	Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PPP	<i>Public Private Partnership</i>
PPSPM	Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal - Penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia
PTD	Penyelenggara Transfer Dana
PVA	Pedagang Valuta Asing
RAN PE AWARD	"Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme"
RB	Reformasi Birokrasi
RBA	<i>Risk Based Approach</i>
RENSTRA	Rencana Strategis
RKBN	Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara
RKDK	Penggunaan Rekening Dana Kampanye
RPD	Rencana Penarikan Dana
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RTMG	<i>Risk, Trends and Methods Group</i>
RUP	Rencana Umum Pengadaan
RUU	Rancangan Undang - Undang
Safe Deposit Box	"Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang

	secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunaannya"
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKTI	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SDI	Satu Data Indonesia
SDM	Sumber Daya Manusia
SGD	Singapore Dollar
SIMAN	Sistem Manajemen Aset Negara
SISPEKA	Sistem Informasi Penanganan Kejahatan Ekonomi
SKM	Sigaret Kretek Mesin
SKP	Sasaran Kinerja Pegawai
SKT	Sigaret Kretek Tangan
SNI ISO/IEC	" <i>Standar Nasional Indonesia The International Organization for Standardization/ International Electrotechnical Commission</i> "
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPAK	Survei Persepsi Anti Korupsi
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPI	Survei Penilaian Integritas

SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPKP	Survei Persepsi Kualitas Pelayanan
SPSE	Sistem Pengadaan Secara Elektronik
SRA	<i>Sectoral Risk Assessment</i>
SWI	Satgas Waspada Investasi
TA	Tahun Anggaran
THB	Thai Baht
TI	Teknologi Informasi
TKM	Transaksi Keuangan Mencurigakan
TP	Tindak Pidana
TPA	Tindak Pidana Asal
TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
UKPBJ	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Underlying	"Kegiatan yang mendasari transaksi Bank dengan Bank Indonesia untuk mendukung penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal"
UPR	Unit Pemilik Risiko
USD	United States Dollar
WBBM	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WBK	Wilayah Bebas Korupsi
WNA	Warga Negara Asing
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
ZI	Zona Integritas



Hak Cipta © 2023 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penulis atau penerbit.



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TAHUN 2023**

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat
www.ppatk.go.id